2022 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

JALAN KAPAS NO 10 YOGYAKARTA TELP (0274) 586563

PIMPINAN

DR. FRIDA ARIYANI, S.H., M..HUM
KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

MUH. DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H.
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

ABDUL KADIR RUMODAR, S.H
PANITERA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

WIDODO BUDI SANTOSO, SH
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA Tahun 2021.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA ini adalah penyampaian hasil pertanggung jawaban mengenai program kegiatan dan pelaksanaan kinerja selama Tahun Anggaran 2021.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami susun berdasarkan surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada Bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan), Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 3111/SEK/OT.01.2/12/2021 Tanggal 13 Desember 2021 dan Surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta W13.U/3030/OT.01.2/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021.

Pelaksanaan kegiatan dan program kerja serta inovasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 akan kami laporkan pada masing-masing bagian. Mulai dari Kebijakan Umum Peradilan, Visi dan Misi serta Rencana Strategis (Renstra), Keadaan Penyalesaian Perkara, Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana dan Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Pengawasan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini. Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disusun ini disadari jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan baik manyangkut materi maupun penyajiannya, oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran-saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan kinerja dan laporan yang akan datang. Semoga dengan tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini akan menjadi pedoman untuk perbaikan kinerja pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA.

Pengadilan Negeri Yogyakarta,

Ketua

Dr. FRIDA KRIYANI, S.H., M.Hum

NIP. 196802031992122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 3

BAB I 11

PENDAHULUAN 11

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN 11

B. VISI dan MISI 14

C . RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 14

D. PERISTIWA PENTING 15

BAB II 42

KEADAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA 42

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA 42

B. PENYELESAIAN PERKARA 49

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN) 58

BAB III 61

SUMBER DAYA MANUSIA 61

A. SUMBER DAYA MANUSIA 61

A. PROMOSI / MUTASI 65

B. PENSIUN 67

D. DIKLAT 68

BAB IV 72

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI 72

A. PENGELOLAAN KEUANGAN 72

I. **PENGELOLAAN ANGGARAN DIPA** 72

II. LAPORAN KEUANGAN PERKARA 80

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 87

II. SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG 89

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI 102

BAB V 126

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 126

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU 126

B. REFORMASI BIROKRASI 127

C. ZONA INTEGRITAS 127

D. PILOT PROJECT RAMAH KAUM RENTAN / DISABILITAS 128

E. EVALUASI PELAYANAN PUBLIK 133

F. POSBAKUM 134

G. INOVASI & KREATIVITAS PELAYANAN 135

I. INOVASI PROSES 135

II. **INOVASI PELAYANAN** 151
II. INOVASI SISTEM 157
BAB IV 167
PENGAWASAN 167
A. PENGAWASAN INTERNAL 167
B. EVALUASI INTERNAL 168
C. EVALUASI EKSTERNAL 171
BAB V 172
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 172
A. KESIMPULAN : 172
B. REKOMENDASI : 172

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pembacaan Komitmen Bersama....16
Gambar 2 Penandatanganan Pakta Integritas....16
Gambar 3 Public Campaign Tolak Suap dan Gratifikasi....17
Gambar 4 Audit Internal APM....18
Gambar 5 Audit Internal SMAP....18
Gambar 6 Penerimaan Penghargaan Role Model....19
Gambar 7 Piagam Penghargaan Role Model Pengadilan Ramah Kaum Rentan....19
Gambar 8 Penghargaan Anugerah Mahkamah Agung RI....20
Gambar 9 Penerimaan Penghargaan Lomba PTSP....21
Gambar 10 Penerimaan Penghargaan Lomba APH Ramah Anak....22
Gambar 11 Piagam Penghargaan KPAID....22
Gambar 12 Penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)....23
Gambar 13 Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)....23
Gambar 14 Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)....24
Gambar 15 Evaluasi SMAP oleh Badan Pengawasan MA RI....24
Gambar 16 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kesekretariatan se Wilayah DIY....25
Gambar 17 Pembinaan dari Biro Hukum dan Humas MA RI tentang Kepustakaan....25
Gambar 18 Pengawasan Daerah oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta....26
Gambar 19 Pengawasan Daerah oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta....27
Gambar 20 Pengawasan Daerah Oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta....27
Gambar 21 Opening Meeting Pengawasan Daerah oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta....28
Gambar 22 Surveilance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)....28
Gambar 23 Surveilance Akreditasi Penjaminan Mutu....29
Gambar 24 Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)....29
Gambar 25 Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)....30
Gambar 26 Kunjungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat....30
Gambar 27 Kunjungan dari Ombudsman RI....31
Gambar 28 Rapat Koordinasi Mootcourt Disabilitas....31
Gambar 29 Rapat Koordinasi Perencanaan Mootcourt Disabilitas....32
Gambar 30 Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)....33
Gambar 31 Kunjungan DPC Permahi....34
Gambar 32 Kunjungan Kerja Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta....34
Gambar 33 Peresmian Mushola Al-Mahkamah....35
Gambar 34 Rapat Koordinasi Relaas dan Panggilan dengan Pihak Eksternal....36
Gambar 35 Rapat Koordinasi Relaas dan Panggilan dengan Pihak Eksternal....36
Gambar 36 Rapat Koordinasi Delegasi dan Rogatori dengan Pihak Eksternal....37
Gambar 37 Rapat Koordinasi Restorative Justice dengan Pihak Eksternal....37
Gambar 38 Rapat Koordinasi SPPT-TI dengan Pihak Eksternal....38
Gambar 39 Kunjungan Kerja Kementrian PPN / Bappenas....39
Gambar 40 Kunjungan Kerja Kementrian PPN / Bappenas....39
Gambar 41 Kunjungan Kerja dari Komisi Yudisial....40
Gambar 42 Diskusi dan Pemutaran Filrm SAPDA dan Dinas P3APP2KB Kota Yogyakarta....41
Gambar 43 Tes Unire Pemeriksaan Narkoba....41
Gambar 44 Thermogun....94
Gambar 45 Thermodetector....95
Gambar 46 Washtafel....95
Gambar 47 Handsitiser tiap ruang....95
Gambar 48 Droplet Protektor....96
Gambar 49 Face shield....96
Gambar 50 Desinfektan....97
Gambar 51Desinfektan Aerosol....97

Gambar 52 Multivitamin 97
Gambar 53 Sarana Sidang Online 98
Gambar 54 Sarana Sidang Online 98
Gambar 55 Mediasi Online 99
Gambar 56 Swab Test 99
Gambar 57 Swab Test 100
Gambar 58 Vaksinasi Bagi Pegawai 100
Gambar 59 Vaksinasi Bagi Pegawai 101
Gambar 60 Vaksinasi Bagi Pegawai 101
Gambar 61 Server Pengadilan Negeri Yogyakarta 102
Gambar 62 Rapat Persidang Elektronik 104
Gambar 63 Rapat Tim IT 104
Gambar 64 Rapat Tim IT 105
Gambar 65 Rapat Panitia Sosialisasi Gugatan Sederhana 105
Gambar 66 Sosialisasi e-Court dan Gugatan Sederhana 106
Gambar 67 Sosialisasi e-Court dan Gugatan Sederhana 106
Gambar 68 Sosialisasi e-Court dan Gugatan Sederhana 107
Gambar 69 Sosialisasi e-Court dan Gugatan Sederhana 107
Gambar 70 Sosialisasi e-Court dan Gugatan Sederhana 108
Gambar 71 Sosialisasi e-Court & Gugatan Sederhana 108
Gambar 72 Halaman Login e-Court 109
Gambar 73 e-Court Corner Pengadilan Negeri Yogyakarta 109
Gambar 74 SIPP Pengadilan Negeri Yogyakarta 111
Gambar 75 Delegasi Pemeriksaan Saksi Via Teleconfrence 112
Gambar 76Delegasi Pemeriksaan Saksi Ahli Via Teleconfrence 112
Gambar 77 Pembuatan Video Mootcourt Disabilitas 113
Gambar 78 Pembuatan Video Mootcourt Disabilitas 113
Gambar 79 Delegasi Persidangan Pemeriksaan Saksi Ahli 114
Gambar 80 Website Pengadilan Negeri Yogyakarta 115
Gambar 81 Direktori Putusan MA 116
Gambar 82 Eraterang Badilum 116
Gambar 83 Langkah-langkah Mengajukan Surat Keterangan Elektronik 117
Gambar 84 Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu 117
Gambar 85 Aplikasi Antrian Sidang 118
Gambar 86 Aplikasi Antrian PTSP 119
Gambar 87 Aplikasi e-SKUM 119
Gambar 88 Aplikasi ATR 120
Gambar 89 Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP 120
Gambar 90 Aplikasi Komdanas 121
Gambar 91 Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung 122
Gambar 92 Aplikasi SAKTI Kementrian Keuangan 122
Gambar 93 Aplikasi SMART 123
Gambar 94 Aplikasi e-Monev Bapenas 123
Gambar 95 Aplikasi SIMARI 124
Gambar 96 Aplikasi SIMPONI 124
Gambar 97 Aplikasi OMSPAN 125
Gambar 98 Sarana Prasarana Disabilitas 131
Gambar 99 Sarana Prasarana Disabilitas 132
Gambar 100 Sarana Prasarana Disabilitas 133
Gambar 101 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 137
Gambar 102 Ruang Tamu Terbuka dan Doorlck Setiap Selasar Ruangan 137
Gambar 103 Proses Bisnis Pos Extension 141
Gambar 104 Milestone Pengadilan Pendidikan 145

Gambar 105 Rapat Koordinasi Dengan Dekan-Dekan Universitas....145
Gambar 106 Perjanjian Kerjasama dengan LAPAS Kelas II A Yogyakarta....150
Gambar 107 Perjanjian Kerjasama Dengan Universitas Atmajaya....151
Gambar 108 Standar Pelayanan Publik....154
Gambar 109 Kapas-10 Coworking Space....155
Gambar 110 Infografis Co-Working Space....155
Gambar 111 Penguatan Anti Korupsi dan Anti Suap....156
Gambar 112 Photoboth....156
Gambar 113 Antrian Sidang....157
Gambar 114 Antrian PTSP....158
Gambar 115 Aplikasi Transkrip Persidangan....158
Gambar 116 e-SKUM....159
Gambar 117 e-Court & eraterang Corner....159
Gambar 118 Voice Warning System....160
Gambar 119 Audio Gratifikasi....160
Gambar 120 Jogja Smart Service....161
Gambar 121 Media Informasi Digital....161
Gambar 122 Website Aksesible untuk Penyandang Disabilitas....162
Gambar 123 e-Permohonan Informasi Akademisi....162
Gambar 124 e-Permohonan Informasi Publik....163
Gambar 125 e-Posbakum....164
Gambar 126 Layanan Informasi DIgital Pengadilan Negeri Yogyakarta....165

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Perkara Perdata....42
Tabel 2 Tabel Perkara Pidana....43
Tabel 3 Statistik e-Court....44
Tabel 4 Perkara Perdata Banding....44
Tabel 5 Perkara Pidana....45
Tabel 6 Perkara Perdata Kasasi....46
Tabel 7 Perkara Pidana Kasasi....46
Tabel 8 Perkara Perdata PK....47
Tabel 9 Perkara Pidana PK....48
Tabel 10 Sisa Perkara Perdata....49
Tabel 11 Sisa Perkara Pidana....50
Tabel 12 Perkara Perdata Diputus Tepat Waktu....51
Tabel 13 Perkara Pidana....51
Tabel 14 Upaya Hukum Banding....52
Tabel 15 Upaya Hukum Kasasi Perkara Perdata....54
Tabel 16 Upaya Hukum Kasasi Pekara PHI....54
Tabel 17Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana....55
Tabel 18 Upaya Hukum PK Perkara Perdata....55
Tabel 19 Upaya Hukum PK Perkara Pidana....56
Tabel 20 Media Berhasil....57
Tabel 21 Perkara Anak melalui Diversi....57
Tabel 22 Pos Bantuan Hukum....58
Tabel 23 Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu....59
Tabel 24 Perkara Prodeo....59
Tabel 25 Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2021....61
Tabel 26 Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2021....64
Tabel 27 Keadaan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan....64
Tabel 28 Rekapitulasi Mutasi Hakim dan Pegawai Tahun 2021....65
Tabel 29 Rekapitulasi Pegawai dan Hakim Pensiun / Meninggal Dunia Tahun 2021....67
Tabel 30 Rekapitulasi Pensiun Hakim dan Pegawai Tahun 2021....68
Tabel 31 Rekapitulasi Diklat Hakim dan Pegawai Tahun 2021....68
Tabel 32 Diklat Hakim dan Pegawai Tahun 2021....68
Tabel 33 Reakpitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021....72
Tabel 34 Rekapitulasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dan Pagu Minus DIPA 01....75
Tabel 35 Rekapitulasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dan Pengembalian DIPA 03....76
Tabel 36 Rekapitulasi Laporan Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNBP DIPA 01....77
Tabel 37 Rekapitulasi Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNBP DIPA 03....78
Tabel 38 Biaya Perdata Gugatan....80
Tabel 39 Daftar Tanah dan Bangunan Gedung Tahun 2021....87
Tabel 40 Daftar Rumah Negara Tahun 2021....87
Tabel 41 Daftar Kendaraan Roda 2 Tahun 2021....87
Tabel 42 Daftar Kendaraan Dinas Roda 4 Tahun 2021....88
Tabel 43 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2021....88
Tabel 44 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2021....89
Tabel 45 Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2021....89
Tabel 46 Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung....89
Tabel 47 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2021....91
Tabel 48 Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2021....92
Tabel 49 Keadaan Teknologi Informasi dan Pendukungnya Tahun 2021....102

Tabel 50 Jumlah Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta yang di Daftarkan Melalui e-Court 103
Tabel 51 Alamat SIPP Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta.....111
Tabel 52 Permohonan Informasi 166
Tabel 53 Sidang Teleconference.....166

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA adalah instansi vertikal dari Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.

Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 diperlukan adanya usaha dan kerja keras untuk mewujudkan sebuah Badan Peradilan yang Agung dengan:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan Agenda Pembaruannya, maka di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA mempunyai program prioritas yang harus dilaksanakan, antara lain :

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Dengan adanya SK KMA I-I/144/2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA juga telah membuat website Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dengan alamat : www.pn.yogyakota.go.id.

Program Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan telah dapat memberikan kemudahan mendapatkan informasi kepada masyarakat pencari keadilan, baik pada website maupun administrasi di pengadilan.

Untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan, Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA telah mengimplementasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dimana telah diimplementasikan aplikasi PTSP dari Dirjen Badilum, E-SKum dan KIOS-K untuk informasi perkara dan antrian sidang, jadwal sidang, antrian PTSP, aplikasi IKM dan media informasi lainnya.

Sedangkan untuk ruang sidang Pengadilan Negeri dan Tipikor telah dipasang ATR dan alat perekam audio visual untuk membatu proses persidangan.

2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan.

Program pengembangan system peradilan yang akuntabel dan transparan tercermin dengan Pimpinan telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan RENSTRA, Penetapan Kinerja, IKU, Pemantauan Pencapaian kinerja, LKJiP, Penyusunan SAKIP. Pengelolaan Akuntabilitas kinerja tercermin:

1. Upaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani Akuntabilitas Kinerja;
2. Tersusunnya Pedoman Akuntabilitas Kinerja ;
3. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala;

Pelaporan melalui SIPP, Direktori Putusan, SIKEP MARI, SIMARI, Komdanas, e-LLK, Aplikasi SAS,SILABI, Monitor Jadwal Sidang dan lain-lain.

3. Program Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI

Dengan telah diterbitkannya Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 - 2035, Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA berusaha mengadakan perbaikan dan perubahan seperti apa yang tertuang dalam Cetak Biru tersebut. Rencana strategis telah direview dan berakhir di tahun 2021 ini.

4. Modernisasi layanan peradilan berbasis teknologi informasi dan Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam sistem peradilan modern, penegakan hukum mau tidak mau, suka atau tidak suka harus merespons perkembangan teknologi informasi. Karena sebagai fenomena perubahan paradigma, dimana pun negara-negara di dunia, khususnya negara hukum modern (yang sudah maju maupun berkembang) sistem peradilannya secara langsung atau tidak langsung merespons terjadinya sebuah interaksi sosial (masyarakat pencari keadilan) dengan penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.

Penggunaan teknologi informasi dalam sistem peradilan modern sesungguhnya merupakan salah satu ciri peradilan yang excellent, yaitu manajemen dan kepemimpinan peradilan sebagai “driver” lembaga peradilan, sehingga akan memudahkan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya finansial, dan proses peradilannya. Harapan hasil dari peradilan yang excellent adalah dipenuhinya kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan dalam berproses di pengadilan, keterjangkauan dan mudah

diaksesnya informasi perkara, dan adanya keterbukaan yang menimbulkan kepercayaan publik akan lembaga peradilan tersebut.

Pada Program PTSP Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Yogyakarta telah melaksanakan Pelayanan dalam satu meja pelayanan untuk pelayanan perkara perdata, pidana dan kepaniteraan hukum serta pelayanan surat masuk dalam satu meja pelayanan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan public, memangkas birokrasi pelayanan dan sebagai upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik .

5. Penguatan anti korupsi melalui pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Ketua Pegadilan Negeri Yogyakarta menginstruksikan kepada jajarannya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satu strateginya adalah “Strategi Pencegahan”.

Berbagai upaya pencegahan sebenarnya telah dilakukan, antara lain dengan meningkatkan mutu layanan, seperti yang dicontohkan melalui pembentukan *pelayanan terpadu satu pintu* (PTSP). Namun, dalam implementasinya, persepsi masyarakat masih mencerminkan adanya kelemahan, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang meninggalkan sekian celah bagi korupsi.

6. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Implementasi SNI ISO 37001 : 2016 telah dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan penetapan Inpres No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang diikuti dengan adopsi ISO 37001 : 2016 menjadi SNI ISO 37001 : 2016 melalui Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional No.248/KEP/BSN/11/2016 pada bulan November 2016. SNI ISO 37001 dirancang bagi organisasi untuk menaati peraturan perundang-undangan serta memiliki kemampuan untuk mencegah (*prevent*), mendeteksi (*detect*), dan menangani (*respond*) terjadinya tindak pidana suap dengan berdasar pada 6 prinsip yaitu prosedur yang proporsional, komitmen pimpinan, manajemen risiko, uji kelayakan (*due diligence*), komunikasi yang efektif, serta monitoring dan review/evaluasi. Penerapan keenam prinsip tersebut dilakukan dalam sebuah proses yang disebut PDCA yaitu *Plan, Do, Check,* dan *Act*. SMAP mendasarkan pada 44 klausul yang menjadi kriteria SMAP yang mana dalam penerapannya di Pengadilan Negeri hanya dilakukan pada 43 klausul karena 1 klausul yaitu adanya organ lain di bawah Pengadilan Negeri tidak diterapkan dalam penilaian.

Pada tahapan penerapan SNI ISO 37001 dilakukan persiapan yang meliputi training dan gap analysis, pengembangan sistem yang meliputi pengembangan kebijakan dan pengembangan dokumentasi, implementasi yang meliputi sosialisasi dan implementasi sistem, review sistem yang meliputi audit internal, tinjauan manajemen, dan persiapan sertifikasi, serta Sertifikasi yang meliputi

pemilihan lembaga sertifikasi, pelaksanaan audit, perbaikan hasil audit, dan keputusan sertifikasi. Pengadilan negeri yang diajukan sebagai *pilot project* saat itu diminta untuk melakukan *bribery assement* terhadap titik-titik rawan suap serta membuat program kerja untuk mengawasi titik-titik rawan suap tersebut. Dalam penerapannya, sistem yang telah ada dalam rangka melakukan pencegahan, pendeteksian, dan penindakan atas perilaku suap disinergikan dalam rangka pengendalian suap dan gratifikasi serta penanganan atas pelanggaran yang terjadi. Terhadap sistem yang telah terbangun dan mendapatkan akreditasi maka akan dilakukan *surveillance* pada setiap 1 tahun dan jika ditemukan pelanggaran maka sertifikat SNI ISO 37001: 2016 bisa dicabut.

Adapun dasar dari pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Yogyakarta yaitu berdasarkan surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada Bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan), Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 3111/SEK/OT.01.2/12/2021 Tanggal 13 Desember 2021 dan Surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta W13.U/3030/OT.01.2/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021.

Tujuan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini yaitu untuk mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2021 dan juga sebagai barometer untuk peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini berisi tentang kegiatan-kegiatan di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan

B. VISI dan MISI

1. Visi Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI :

   "Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta Yang Agung"

2. Misi Pengadilan Negeri Yogyakarata juga sesuai dengan Misi Mahkamah Agung RI yaitu:

   a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA.
   b. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
   c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA.
   d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA

C . RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Untuk mewujudkan visi dan misi diatas perlu adanya suatu perencanaan strategis di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA yang terfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif, sesuai tuntutan perkembangan jaman, kualitas hukum dan masyarakat pencari keadilan yang semakin hari semakin kompleks, dan semakin tinggi kualitasnya.

Sehingga terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik, dengan memperhitungkan tujuan, sasaran atau variabel yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

1. Terciptanya fungsi kekuasaaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Terciptanya pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.
3. Terciptanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Terciptanya manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional.
5. Tersedianya / terpenuhi sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas operasional terhadap sistem pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan yang ada pada tahun 2021 adalah:

a. Program dari lembaga Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam DIPA adalah:
   1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dalam program ini, Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA yang merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama, selalu berupaya untuk memperkuat kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum dalam rangka mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap hukum pada umumnya dan kepada institusi lainnya beserta infrastruktur yang ada, sehingga diharapkan terwujudnya lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas, sehingga pelayanan prima dalam penegakan hukum dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

   2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

      Pada Program ini di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA tersedia anggaran untuk perkara operasional persidangan PHI, Pengamanan Persidangan dan Pemberian Konsumsi bagi Terdakwa, pembebasan biaya Perkara dan adanya pelayanan Pos Bantuan Hukum khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu.

   3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung

      Pada Program ini pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial, Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Yogyakarta tersedia anggaran untuk pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi, Peralatan dan Fasilitas Pendukung Perkantoran serta Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Teknologi Informasi.

D. PERISTIWA PENTING

Peristiwa Penting tahun 2021 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021 :

1. Penandatanganan Pakta Integritas

Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 bertempat di Ruang Aula Pengadilan Negeri Yogyakarta melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan

Negeri Yogyakarta, Frida Ariyani, S.H., M.Hum. Kegiatan dimulai dengan sambutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pada sambutannya Ketua menyampaikan amanat bahwa pelaksanaan Penandatangan Pakta Integritas ini berdasarkan Permenpan No. 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penandatangan Pakta Integritas yang di awali oleh Ketua, Wakil, Hakim, Panitera dan Sekretaris serta diikuti oleh seluruh ASN dan PPNPN Pengadilan Negeri Yogyakarta

Gambar 1 Pembacaan Komitmen Bersama

Gambar 2 Penandatanganan Pakta Integritas

2. Public Campaign – Kampanye Simpatik Tolak Suap dan Gratifikasi Pengadilan Negeri Yogyakarta

Pada Hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melakukan Kegiatan Kampanye Simpatik tolak Suap, pungli dan Gratifikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam memberikan pelayanan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan siap melayani masyakarakat serta menerangkan adanya sistem prodeo dan eraterang.

Gambar 3 Public Campaign Tolak Suap dan Gratifikasi

3. Audit Internal Akreditasi Penjaminan Mutu

Pada tanggal 9 – 16 Maret 2021 dilaksanakan Audit Internal Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dibuka dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum. didampingi oleh Ketua Audit Internal Pengadilan Negeri Yogakarta, Bandung Suhermoyo, S.H.,M.Hum. Opening meeting ini dihadiri oleh perwakilan Hakim, Panitera, Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta beserta Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Yogyakarta

Gambar 4 Audit Internal APM

Gambar 5 Audit Internal SMAP

4. Penerimaan Pengharaan Role Model Pengadilan Ramah Kaum Rentan / Berkebutuhan Khusus

Ketua Mahkamah Agung mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebagai Pembina Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan/Berkebutuhan Khusus Tahun 2020.

Gambar 6 Penerimaan Penghargaan Role Model

Gambar 7 Piagam Penghargaan Role Model Pengadilan Ramah Kaum Rentan

5. Pengadilan Negeri Yogyakarta meraih Penghargaan (Award) Pelaksanaan Gugatan Sederhana Terbaik

Mahkamah Agung (MA) didukung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Hukumonline kembali menggelar Anugerah MA Tahun 2021. Anugerah MA 2021 kali ini ada tiga kategori besar yakni penghargaan *(award)* pelaksanaan Peradilan Elektronik (E-Court), Gugatan Sederhana (GS), dan Mediasi baik dari sisi pengadilan, pengguna dari kalangan advokat, maupun hakim mediator termasuk memberi penghargaan khusus kepada Pengadilan Tinggi terbaik yang melaksanakan fungsi pembinaan.

Pengumuman para pemenang penghargaan 3 kategori besar itu disampaikan pada perayaan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung (HUT MA) ke-76, yang digelar secara daring pada Kamis 19 Agustus 2021. Salah satu tujuan pemberian Anugerah MA 2021 ini untuk memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengadilan-pengadilan, para advokat, dan para hakim mediator yang telah aktif memanfaatkan/mengoptimalkan penerapan E-Court, GS, dan Mediasi di pengadilan.

Pengadilan Negeri Yogyakarta memperoleh penghargaan Kategori Pelaksanaan Gugatan Sederhana Terbaik (Juara I) untuk Pengadilan Negeri Kelas IA.

Diharapkan adanya Anugerah MA 2021 ini juga mendorong pimpinan pengadilan untuk lebih semangat melaksanakan kebijakan pemberlakuan Perma tentang E-Court, Perma tentang Gugatan Sederhana, dan Perma tentang Mediasi.

Gambar 8 Penghargaan Anugerah Mahkamah Agung RI

6. Penerimaan Penghargaan Lomba PTSP Dirjen Badilum Tahun 2021 Juara 1 Pengadilan Negeri Kelas IA

Gambar 9 Penerimaan Penghargaan Lomba PTSP

Pengadilan Negeri Yogyakarta meraih peringkat I lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2021 tingkat Nasional dengan kategori Pengadilan Negeri Kelas IA. Penyerahan penghargaan PTSP ini diserahkan di akhir Acara Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan Ketua Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum dan Penyerahan Penghargaan Lompa PTSP 2021, yang dilaksanakan di Trans Resort Hotel Seminyak Bali pada hari Kamis 4 November 2021 .

Kejuaraan lomba PTSP Tahun 2021 diadakan melalui beberapa tahapan seleksi. Pada awal penjaringan semua Pengadilan Negeri menyajikan video Layanan PTSP berdasarkan standar Badilum. Video PTSP PN Yogyakarta mengantarkan PN Yogyakarta maju ke tahap selanjutnya. Dan pada bulan Agustus, PN Yogyakarta secara langsung mendapat kunjungan dari Badilum untuk menilai langsung PTSP dan melakukan wawancara secara langsung kepada para petugas PTSP, Ketua, Panitera dan Sekretaris PN Yogyakarta.

Penghargaan PTSP diberikan langsung oleh YM Prof.Dr. H. Muhammad Syarifudin, S.H., MH., kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum. Dengan kemenangan yang diraih ini semoga dapat membuat Pelayanan PTSP PN Yogyakarta semakin lebih baik kedepannya.

7. Penerimaan Penghargaan Lomba KPAID Awards Tahun 2021 Juara 1

Untuk memenuhi Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor: 005/5853 tanggal 24 November 2021 Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum. menghadiri kegiatan Penghargaan KPAID Kota Yogyakarta Award Tahun 2021. Kegiatan dilaksanakan pada Selasa 30 November 2021 pukul 18.30 WIB yang bertempatkan di Pessona Hotel Tugu Yogyakarta (Hotel KHAS Tugu Yogyakarta). Pengadilan Negeri Yogyakarta mendapatkan Penghargaan Juara Pertama pada Nominasi Aparat Penegak Hukum Ramah Anak, yang menjadikan Pengadilan yang Pertama di Indonesia yang mendapatkan penghargaan tersebut.

Gambar 10 Penerimaan Penghargaan Lomba APH Ramah Anak

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
DAERAH KOTA YOGYAKARTA

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA:

PENGADILAN NEGERI
KOTA YOGYAKARTA

sebagai

JUARA I

Kategori **Aparat Penegak Hukum Ramah Anak**
Dalam KPAID Kota Yogyakarta Award Tahun 2021

Yogyakarta, 30 November 2021

Ketua KPAID
Kota Yogyakarta

Sylvi Dewajani, M. Sc, Psikolog

Gambar 11 Piagam Penghargaan KPAID

8. Penerimaan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2021

Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum. menghadiri Undangan Penyerahan Penghargaan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang dilaksanakan pada Selasa 14 Desember 2021 sesuai dengan Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor: 2593/BP/HM.00/12/2021. Kegiatan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Ketua Mahkamah Agung RI, Gedung Mahkamah Agung RI Lantai 13. Penyerahan Sertifikat SMAP diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, YM Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H.,M.H. kepada 7 (tujuh) Pengadilan Negeri. Ketujuh Pengadilan Negeri tersebut yaitu Pengadilan

Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Ternate, Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Penyerahan Sertifikat SMAP didasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor: 63/BP/SK/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Penetapan Hasil Evaluasi I Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) kepada 7 (tujuh) Pengadilan Negeri tersebut.

Gambar 12 Penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

SERTIFIKAT

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor 63/BP/SK/XII/2021 Tahun 2021

Menyatakan :

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Telah dilakukan Evaluasi I penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

dengan Predikat:

(A) Nilai : 88,38

Evaluasi II terhadap penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) akan dilakukan pada tahun berikutnya.

Ketua Tim Evaluasi
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

AVIANTARA

Jakarta, 01 Desember 2021
Plt. Kepala Badan Pengawasan

DWIARSO BUDI SANTIARTO

Gambar 13 Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

9. Evaluasi SMAP Oleh Badan Pengawasan MA RI

Gambar 14 Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Dalam rangka memastikan berjalannya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka diadakan Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sesuai dengan Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor: 508/BP/ST/IX/2021 tanggal 28 September 2021.

Gambar 15 Evaluasi SMAP oleh Badan Pengawasan MA RI

Opening Meeting Evaluasi SMAP dilaksanakan di Ruang Aula Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 Oktober 2021, yang dihadiri oleh seluruh pimpinan, Hakim, pejabat kepaniteraan, pejabat kesekretariatan dan seluruh pelaksana. Evaluasi yang dilakukan adalah Tinjauan Dokumen, Uji Petik dan Wawancara yang berlangsung selama 2 (dua) hari sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021. Sedangkan proses keseluruhan Evaluasi Penerapan SMAP ini berlangsung sampai dengan 13 Oktober 2021.

10. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Gambar 16 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kesekretariatan se Wilayah DIY

Dalam rangka meningkatkan kinerja mempercepat pelaksanaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) maka dilakukan pembinaan dan koordinasi Pengadilan Negeri Se-Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kesekretariatan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se DIY yang dilakukan di Ruang Aula Pengadilan Negeri Yogyakarta sesuai dengan Surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: W13-U/2336/HM.01.1/X/202 tanggal 7 Oktober 2021. Kegiatan dimulai pukul 08.30 WIB. Rapat koordinasi membahas perkembangan tentang penyampaian Materi Keuangan dan Umum, bagaimana progress penyerapan keuangan, membahas evaluasi dan pelaksanaan aplikasi Kepegawaian dan yang terakhir juga membahas Evaluasi dan Materi sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

11. Monitoring Kepustakaan dari Biro Hukum dan Humas MA RI

Gambar 17 Pembinaan dari Biro Hukum dan Humas MA RI tentang Kepustakaan

Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 di Lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan dalam rangka pembinaan perpustakaan di lingkunan Peradilan, Pengadilan Negeri Yogyakarta mendapatkan kunjungan kerja dari tim Pustakawan Mahkamah Agung RI pada tanggal 09 November 2021 pukul 09.00 WIB. Kedatangan tim disambut baik oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum. yang ditemani oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kedatangan tim melihat langung kondisi Perpustakaan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Tujuan dari kunjungan tim tersebut juga dalam rangka melihat Implementasi, Pengelolaan, dan Penataan Perpustakaan di Pengadilan, khususnya Pengadilan Negeri Yogyakarta.

12. Pengawasan Daerah oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Gambar 18 Pengawasan Daerah oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Jumat 30 April 2021 Pengadilan Negeri Yogyakarta mendapat kunjungan dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Maksud dari kunjugan ini adalah pengawasan serta pembinaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mana diwakilkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Gatot Suharnoto, S.H. didampingi dengan tim Pengawasan Pengadilan Tinggi Yogyakarta sesuai dengan Surat Tugas dari Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: W13-U/95/ST/KPT/IV/2021 tanggal 27 April 2021. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum beserta Hakim, Panitera dan Sekretaris menyambut hangat kedatangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan tim Pengawasan.

Gambar 19 Pengawasan Daerah oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta

13. Pengawasan Daerah oleh Pengadilan Tinggi Yogyaakrta

Gambar 20 Pengawasan Daerah Oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Rabu 8 Desember 2021 Pengadilan Negeri Yogyakarta mendapat kunjungan dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Maksud dari kunjugan ini adalah Pengawasan Daerah Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pembinaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Gatot Suharnoto, S.H. didampingi dengan tim Pengawasan Pengadilan Tinggi Yogyakarta sesuai dengan Surat Tugas dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: W13-U/360/ST/WKPT/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum beserta Hakim dan ASN Pengadilan Negeri Yogyakarta menyambut hangat kedatangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan tim Pengawasan.

Gambar 21 Opening Meeting Pengawasan Daerah oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Pada Opening Meeting, Bapak Gatot Suharnoto, S.H. memberikan sambutan sekaligus pembinaan untuk Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pada pembinaan Bapak Gatot Suharnoto, S.H., menekankan untuk teliti saat pembuatan Berita Acara dan memperhatikan juga Court Kalendar yang dibuat. Pengawasan akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu 8 Desember 2021 sampai dengan 9 Desember 2021. Semoga dengan adanya pengawasan dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta, menjadi dapat menjadikan Pengadilan Negeri Yogyakarta kearah lebih baik lagi

14. Penilaian PTSP dan Surveilance APM Tahun 2021 oleh Badilum

Gambar 22 Surveilance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Gambar 23 Surveilance Akreditasi Penjaminan Mutu

Dalam rangka mengikuti Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan menjamin kualitas Manajemen Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), tim dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan kunjungan langsung untuk melaksanakan Penilaian PTSP dan Assessment Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Yogyakarta, sesuai dengan Surat Tugas Dirjen Badilum Nomor 155/DJU3/ST/KP0.1.1/8/2021 tanggal 5 Agustus 2021. Pengadilan Negeri Yogyakarta mendapat jadwal pada tanggal 13 Agustus 2021. Kegiatan dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana kesiapan menuju Lomba PTSP dan mengukur sejauh mana komitmen dan konsistensi seluruh Hakim dan ASN Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam mempertahankan mutu / kualitas manajemen sistem yang telah berjalan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

15. Pemeriksaan Dokumen dan Bukti Fisik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Gambar 24 Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pada Hari Jumat, 26 Februari 2021 pukul 10.00 WIB Tim Pemeriksa BPK RI mengunjungi Pengadilan Negeri Yogyakarta demi pengecekan fisik langsung terhadap dokumen-dokumen yang diminta dan sudah di unggah melalui *Google Drive* sesuai dengan Surat Tugas Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 26/ST/V-XVI.1/01/2021 tanggal 15 Januari 2021. Pada saat itu tim pemeriksa datang 4 (empat) orang dan kegiatan pemeriksaan dilakukan di ruang Rapat Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Gambar 25 Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

16. Kunjungan Sekretariat Jenderal DPR RI Ke Pengadian Negeri Yogyakarta

Kamis 1 April 2021 Pengadilan Negeri Yogyakarta kedatangan tamu dari Perwakilan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakya RI pukul 10.00 WIB. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum. beserta perwakilan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, menyambut baik atas kedatangan para tamu. Kegiatan tersebut bertujuan untuk Koordinasi tentang Undang Undang ITE di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pengadilan Negeri Yogyakarta menyiapkan data-data dokumen putusan yang berkaitan dengan UU ITE. Pada koordinasi ini disampaikan juga kelebihan dari UU ITE dan juga kekurangan dari UU ITE yang sudah berjalan, terutama di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Diharapkan melalui koordinasi ini, akan memperluas ilmu Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berkaitan dengan UU ITE.

Gambar 26 Kunjungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

17. Kunjungan Ombudsman Republik Indonesia ke Pengadilan Negeri

Gambar 27 Kunjungan dari Ombudsman RI

Kamis, 29 April 2021 pukul 10.00 WIB Pengadilan Negeri Yogyakarta mendapat kunjungan dari Ombudsman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor: B/570/PC.01.01/IV/2021 tanggal 21 April 2021. Kunjungan ini merupakan kajian singkat atau Rapid Assessment mengenai Pelaksanaan Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Kedatangan tim Ombudsman Republik Indonesia disambut baik oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum. yang didampingi oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sari Sudarmi, S.H. dan Nuryanto, S.H.,M.H. serta Panitera, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Kegiatan dilakukan di Ruang Rapat Lantai 2 Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kegiatan dimulai dari pengenalan dari pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta dan setelah itu pengenalan dari pihak Ombudsman Republik Indonesia. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian maksud dan tujuan kunjungan tim Ombudsman Republik Indonesia ke kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta.

18. Rapat Koordinasi Kegiatan Mootcourt Disabilitas

Gambar 28 Rapat Koordinasi Mootcourt Disabilitas

Dalam rangka mewujudkan Pengadilan yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas, Pengadilan Negeri Yogyakarta bekerja sama dengan Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Kegiatan Mootcourt Disabilitas sesuai dengan surat Undangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor W13.U1/1801/OT.1.1/IV/2021 tanggal 16 April 2021. Kegiatan ini diadakan di Ruang Aula Pengadilan Negeri Yogyakarta Hari Jumat 23 April 2021 pukul 08.30 WIB. Mootcourt ini bertujuan untuk meningkatkan sistem Peradilan Inklusif di wilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta serta berkontribusi dalam penyusunan kebijakan secara nasional untuk mengefektifkan pelaksanaan mekanisme penilaian personal dan membangun sistem rujukan yang memadai bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Kegiatan ini mengundang Direktur Yayasan SAPDA, 6 (enam) Fakultas Hukum se-DIY antara lain Universitas Gajah Mada, Universitas Islam Indonesia, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Universitas Janabadra, Universitas Ahmad Dahlan dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga serta mengundang Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta - Pusat Bantuan Hukum dan Konsultasi Universitas Ahmad Dahlan.

Gambar 29 Rapat Koordinasi Perencanaan Mootcourt Disabilitas

Senin, 26 April 2021 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Yayasan SAPDA. Rapat diadakan di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pukul 11.00 WIB. Rapat ini bertopik mengenai Rencana Mootcourt Disabilitas bagaimana idealnya penilaian personal baik kebutuhan dasar maupun ahli penyandang disabilitas berhadapan hukum, terutama Hukum Pidana. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Pelaksana Mootcourt Disabilitas, Heri Kurniawan, S.H.,M.H didampingi oleh Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan serta dari Tim SAPDA.

19. Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Jumat 24 September 2021 telah dilaksanakan Sosialisasi dan Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kegiatan dilakukan di Ruang Aula Pengadilan Negeri Yogyakarta pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini turut mengundang:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta

2. Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta

3. Kepala Lembaga Permasyarakatan Yogyakarta

4. Kepala Lembaga Permasyarakatan Perempuan Yogyakarta

5. Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta di Sleman.

6. Kepala Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta

7. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta

8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

9. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta

10. Ketua PERADI Cabang Yogyakarta

11. Ketua IKADIN Cabang Yogyakarta

12. Ketua KAI Cabang Yogyakarta

13 Ketua PKBH Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh Pengadilan untuk mengatasi Resiko adanya penyuapan dengan menerapkan Sistem SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) sebagaimana semangat yang dibangun UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diharapkan dengan penerapan SMAP dapat memperkuat komitmen pengadilan untuk menjadi Pengadilan yang Agung. Semoga sinergisitas antar Aparat penegak hukum dapat berkesinambungan sebagai langkah percepatan menuju lembaga dan dan masyarakat yang bebas dari Korupsi, Suap dan Gratifikasi.

Gambar 30 Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

20. Kunjungan DPC Permahi

Rabu 29 September 2021 Pengadilan Negeri Yogyakarta mendapat kunjungan dari Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) sesuai dengan Surat Ketua DPC PERMAHI DIY Nomor: 013/Ka.PERMAHI.DIY/Umum/IX/2021 tanggal 23 September 2021. Kedatangan DPC PERMAHI DIY diterima dan disambut dengan hangat oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum. Kunjungan ini beragendakan dengan silaturahmi sekaligus pemaparan Organisasi, Kepengurusan, dan Program Kerja DPC PERMAHI DIY 2021 - 2023. Kegiatan berlangsung di Ruang Mediasi/Diversi Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Gambar 31 Kunjungan DPC Permahi

21. Kunjungan Kerja Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Gambar 32 Kunjungan Kerja Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Rabu 29 September 2021 Pukul 10.00 WIB Pengadilan Negeri Yogyakarta mendapat Kehormatan dengan kunjungan dari Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Bapak H. Suripto, S.H.,M.H beserta rombongan. Kedatangan Pak Suripto dan rombongan, disambut hangat dan baik oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum yang didampingi oleh segenap Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Tempat yang pertama didatangi adalah Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai ruang pelayanan publik bagi para pencari keadilan. Usai dari ruang PTSP rombongan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta melanjutkan kegiatan ramah tamah di Ruang Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta

22. Peresmian Mushola Al-Mahkamah

Gambar 33 Peresmian Mushola Al-Mahkamah

Senin 29 November 2021 pukul 08.00 WIB, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum. didampingi Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta meresmikan renovasi Mushola Al-Mahkamah Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dalam peresmian tersebut, ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti peresmian penggunaan Mushola oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta juga memberikan sambutan, yang mana pada sambutannya menyampaikan bersyukur atas selesainya renovasi Mushola Al-Mahkamah. Beliau juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Panitia, semua tim renovasi dan semua yang terlibat dalam renovasi Mushola Al-Mahmakah. Mushola Al-Mahkamah adalah sarana Ibadah Umat Muslim yang disediakan bagi para Pegawai dan Pengunjung yang datang ke Pengadilan Negeri Yogyakarta.

23. Rapat Koordinasi Relaas dan Panggilan dengan Pihak Eksternal

Selasa 19 Oktober 2021 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Perkara Pelaksanaan Relaas Panggilan dan Eksekusi Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kegiatan dilakukan pukul 09.00 WIB di Ruang Aula Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kegiatan ini mengundang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Bapak Gatot Suharnoto, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Bapak Sugeng Riyono, S.H.,M.Hum., Ketua Pengadilan Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Perwakilan dari Kepolisian, Bank, Penasihat Hukum dan Kelurahan.

Gambar 34 Rapat Koordinasi Relaas dan Panggilan dengan Pihak Eksternal

Gambar 35 Rapat Koordinasi Relaas dan Panggilan dengan Pihak Eksternal

24. Rapat Koordinasi Delegasi dan Rogatori dengan Pihak Eksternal

Selasa 26 Oktober 2021 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Pelaksanaan Delegeasi dan Rogatori di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kegiatan ini turut mengundang seluruh Ketua, Panitera, dan Koordinator Delegasi Pengadilan Negeri se- DIY.

Pemaparan materi oleh Narasumber yaitu Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Bapak Rio Kumitas Ambarsakti, S.H. Pada pemaparannya, Pak Rio menyampaikan mekanisme penanganan Delegasi panggilan/pemberitahuan, bagaimana proses delegasi tersebut tidak menjadi hambatan sesuai dengan SEMA Nomor 6 Tahun 2014. Selain membahas delegasi, Pak Rio juga menyampaikan mengenai Rogatori. Kegiatan dilanjutkan dan diakhiri dengan diskusi dan foto bersama.

Gambar 36 Rapat Koordinasi Delegasi dan Rogatori dengan Pihak Eksternal

25. Rapat Koordinasi Restorative Justice dengan Pihak Eksternal

Gambar 37 Rapat Koordinasi Restorative Justice dengan Pihak Eksternal

Untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (restorative justice) di pengadilan, Senin 8 November 2021 pukul 09.00 WIB Pengadilan Negeri Yogyakarta mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Perkara Berbasis Keadilan (Restorative Justice). Kegiatan dilakukan secara luring di Ruang Aula Pengadilan Negeri Yogyakarta. Adapun yang berlaku sebagai Narasumber pada kegiatan ini adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Bapak Achmad Yusak, S.H.,M.H. Kegiatan ini juga mengundang Ketua Pengadilan Negeri se-DIY, Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Kepala Polresta Yogyakarta, Kepala Lapas

Yogyakarta, Kepala Lapas Perempuan Yogyakarta, Kepala Lapas Narkotika Yogyakarta, Kepala Rutan Yogyakarta dan Kepala Lapas Anak Yogyakarta serta Kepala Bapas Yogyakarta.

Diharapkan dengan Rakor ini akan dicapai suatu pemahaman dan kesepahaman secara menyeluruh tentang pelaksanaan Penanganan perkara berbasis Keadilan Restoratif (Restoratif Justice). Bagi Stake Holder dan pemangku Kepentingan yang berkaitan dengan Penegakan Hukum, sesuai dengan amanat dan keinginan Pemerintah RI serta pelayanan hukum yang berkeadilan.

26. Rapat Koordinasi SPPT- TI dengan Pihak Eksternal

Gambar 38 Rapat Koordinasi SPPT-TI dengan Pihak Eksternal

Senin 15 November 2021 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kegiatan dibuka oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Bapak Gatot Suharnoto, S.H. Pada sambutan pembukaannya Bapak Gatot Suharnoto, S.H. juga menyampaikan Sosialisasi mengenai aplikasi "Sipanah Hati". Aplikasi tersebut merupakan aplikasi layanan masyarakat. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian Materi SPPT-TI. Bertindak sebagai Narasumber adalah yang pertama dari Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham D.I Yogyakarta, Ibu Gusti Ayu Putu Suwardani, Bc.IP.,S.H.,M.S.i. dan untuk narasumber kedua yaitu Kepala Sub Direktorat Statistik dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Bapak Yayat Sudrajat. S.H.,M.H.,M.M. Melalui Rapat Koordinasi ini dan pengembangan SPPT-TI diharapkan dapat mempermudah, memperlancar tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara pidana yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

27. Kunjungan Kerja Kementrian PPN / Bappenas ke Pengadilan Negeri Yogyakarta

Selasa 16 November 2021 pukul 10.00 WIB Pengadilan Negeri Yogyakarta mendapatkan kunjungan kerja dari Tim Monitoring Evaluasi Kementerian PPN/ Bappenas sesuai dengan Surat Kementerian PPN/Bappenas Nomor: 14356/PP 06 01/Dt 7 3/B/11/2021 tanggal 9 November 2021. Kedatangan tim disambut baik oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum. yang ditemani perwakilan Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Gambar 39 Kunjungan Kerja Kementrian PPN / Bappenas

Gambar 40 Kunjungan Kerja Kementrian PPN / Bappenas

Untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan serta akurat maka diadakan pengumpulan data dan peninjauan langsung ke lapangan pada Prioritas Nasional Zona Integritas dan Perkembangan Pelaksanaan e-Court yang mendukung Kemudahan Berusaha di Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh Tim Monev Kementerian PPN/Bappenas. Kedatangan Tim Monev PPN/Bappenas juga dalam rangka mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program prioritas pembangunan bidang Hukum.

28. Kunjungan Kerja dari Komisi Yudisial

Gambar 41 Kunjungan Kerja dari Komisi Yudisial

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Pelatihan "Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial" pada tanggal 6 s.d. 9 Juli 2021 di Kota Yogyakarta, yang mana telah diikuti 40 (empat puluh) Peserta yang diantaranya berasal dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka dilakukan kegiatan survey dampak keberhasilan pelatihan tersebut sesuai dengan Surat Komisi Yudisial Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Nomor: 129/RP/KH.01.01/11/2021 tanggal 11 November 2021. Kegiatan survey dilakukan oleh tim Sub. Bagian Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial RI pada tanggal 17 November 2021. Evaluasi pelatihan pada kesempatan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran sejauh mana terjadi perubahan tingkah laku yang diharapkan pada peserta pelatihan. Hasil pengukuran dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kekuatan dan kekurangan pelatihan yang sudah dilakukan untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan pelatihan berikutnya dan utamanya untuk mendapatkan gambaran sejauh mana hasil pelatihan memberikan pengaruh positif bagi pesertanya.

29. Diskusi dan Pemutaran Film Sapda dan Dinas P3AP2KB Kota Yogyakarta

Senin 29 November 2021, menyambut Hari Anti Kekerasan seluruh Dunia tanggal 25 November yang berdekatan diperingatinya Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada tanggal 3 Desember, Sapda yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Dinas P3AP2KB Kota Yogyakarta memperingatinya dengan kegiatan Pemutaran Film NYALA, MOOD COURT KDRT PEREMPUAN DISABILITAS SERTA MITRA KELUARGA yang diselenggarakan di Aula Pengadilan Negeri Yogyakarta pukul 14.00 WIB. Adapun tujuan kegiatan ini dilakukan adalah Memperluas advokasi dan edukasi melalui media film hasil produksi SAPDA dan film DP3AP2KB Kota Yogyakarta terkait upaya pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap Perempuan dan Meningkatkan pemahaman mengenai gender, kekerasan pada disabilitas serta pemahaman aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan. Kegiatan ditutup dengan Diskusi Interaktif antara peserta dengan Para Narasumber. Semoga dengan diadakannya kegitan ini dapat meningkatkan pemahaman peserta terkait gender, kekerasan pada disabilitas serta aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan

Gambar 42 Diskusi dan Pemutaran Filrm SAPDA dan Dinas P3APP2KB Kota Yogyakarta

30. Tes Urine Pemeriksaan Narkoba

Rabu 1 Desember 2021 pukul 09.00 WIB telah dilaksanakannya Kegiatan Tes Urine di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kegiatan ini bekerja sama dengan BNN Kota Yogyakarta. Kegiatan dilakukan di Ruang Aula Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kegiatan dibagi menjadi dua bagian, Sosialisasi dan Pengambilan Tes Urine. Kegiatan dimulai dengan sosialisasi yang diawali dengan pembukaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H.,M.H. Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi oleh Kepala BNN Kota Yogyakarta, AKBP Khamdani S.Sos. Sosialisasi yang dibawakan mengenai FKDM Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza di Wilayah, khususnya Kota Yogyakarta. Setelah Sosialisasi barulah dimulai pengambilan Tes Urine.

Gambar 43 Tes Unire Pemeriksaan Narkoba

BAB II

KEADAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Keadaan perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

1. Tabel Keadaan Perkara Tingkat Pertama

1. Perkara Perdata (Klasifikasi Perkara)

Tabel 1 Tabel Perkara Perdata

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Total Beban 2021	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa Perkara 2021
1	**PN Yogyakarta**						
	Perdata Gugatan	72	170	242	24	177	65
	Perdata Permohonan	26	335	361	17	343	18
	Gugatan Sederhana	0	9	9	0	9	0
	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
	PHI	7	80	87	0	85	2
Jumlah		105	594	699	41	614	85

2. Perkara Pidana (Klasifikasi Perkara)

Tabel 2 Tabel Perkara Pidana

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Total Beban 2021	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa Perkara 2021
1	**PN Yogyakarta**						
	Pidana Biasa	62	345	407	0	368	39
	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	208	208	0	208	0
	Lalu lintas	0	5254	5254	0	5254	0
	Tindak Pidana Korupsi	0	15	15		3	12
	Pidana Anak	3	15	18	0	16	2
	Pidana Praperadilan	0	3	3	0	3	0
Jumlah		65	5840	5905	0	5852	53

Statistik Aktivasi E-Court Pengadilan Negeri

Tabel 3 Statistik e-Court

No	Pengadilan	Jumlah Terdaftar	SKUM (Rp)	Gugatan	Permohonan	Bantahan	Gugatan Sederhana	Total
1	**PT Yogyakarta**							
1	PN Yogyakarta	513	287.776.000	168	334	5	10	513
Jumlah		513	287.776.000	168	334	2	9	513

2. Tabel Keadaan Perkara Tingkat Banding

1. Perkara Perdata Banding (Klasifikasi Perkara)

Tabel 4 Perkara Perdata Banding

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Total Beban 2021	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa Perkara 2021
1	**PN Yogyakarta**						
	Perdata Gugatan	0	38	38	1	33	2
	Perdata Permohonan	-	-	-	-	-	-
	Gugatan Sederhana	-	-	-	-	-	-

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Total Beban 2021	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa Perkara 2021
	Perlawanan/Derden Verzet	-	-	-	-	-	-
	PHI	-	-	-	-	-	-
Jumlah		20	38	38	1	33	2

2. Perkara Pidana Banding (Klasifikasi Perkara)

Tabel 5 Perkara Pidana

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Total Beban 2021	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa Perkara 2021
1	**PN Yogyakarta**						
	Pidana Biasa	2	16	18	1	15	2
	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
	Lalu lintas	0	0	0	0	0	0
	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0	0
	Pidana Anak	1	0	1	0	1	0
	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
Jumlah		3	16	18	1	15	2

3. Tabel Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

1. Perkara Perdata Kasasi (Klasifikasi Perkara)

Tabel 6 Perkara Perdata Kasasi

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Total Beban 2021	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa Perkara 2021
1	**PN Yogyakarta**						
	Perdata Gugatan	24	29	53	0	8	45
	Perdata Permohonan	0	1	0	0	0	0
	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
	Perlawanan/Derden Verzet	0	2	5	0	1	4
	PHI	0	41	47	0	18	29
Jumlah		33	73	105	0	27	78

2. Perkara Pidana Kasasi (Klasifikasi Perkara)

Tabel 7 Perkara Pidana Kasasi

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Total Beban 2021	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa Perkara 2021
1	**PN Yogyakarta**						
	Pidana Biasa	9	14	23	1	9	13
	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Total Beban 2021	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa Perkara 2021
	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
	Lalu lintas	0	0	0	0	0	0
	Tindak Pidana Korupsi	1	3	4	0	4	
	Pidana Anak	2	2	4	0	2	1
	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
Jumlah		13	22	36	2	0	23

4. Tabel Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK)

1. Perkara Perdata PK (Klasifikasi Perkara)

Tabel 8 Perkara Perdata PK

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Total Beban 2021	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa Perkara 2021
1	**PN Yogyakarta**						
	Perdata Gugatan	4	4	8	0	1	7
	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Total Beban 2021	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa Perkara 2021
	PHI	0	0	0	0	0	0
Jumlah		4	4	8	0	1	7

2. Perkara Pidana PK (Klasifikasi Perkara)

Tabel 9 Perkara Pidana PK

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Total Beban 2021	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa Perkara 2021
1	**PN Yogyakarta**						
	Pidana Biasa	1	0	1	0	1	0
	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
	Lalu lintas	0	0	0	0	0	0
	Tindak Pidana Korupsi	0	2	2	0	0	2
	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
Jumlah		1	0	3	0	1	2

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Perkara Perdata

Tabel 10 Sisa Perkara Perdata

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Tahun 2020	Sisa Tahun 2020 Yg di Cabut 2021	Sisa Th 2020 yg di Putus 2021	Sisa Perkara 2020 Yg Belum diputus
1	**PN Yogyakarta**				
	Perdata Gugatan	72	5	71	1
	Perdata Permohonan	26	0	26	0
	Gugatan Sederhana	0	0	0	0
	Perlawanan (Derden Verzet)	0	0	0	0
	PHI	7	0	7	0
Jumlah		105	5	104	1

Perkara Pidana

Tabel 11 Sisa Perkara Pidana

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Tahun 2020	Sisa Tahun 2020 Yg di Cabut 2021	Sisa Th 2020 yg di Putus 2021	Sisa Perkara 2020 Yg Belum diputus
1	**PN Yogyakarta**				
	Pidana Biasa	62	0	62	0
	Pidana Singkat	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	0	0	0
	Lalu lintas	0	0	0	0
	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0
	Pidana Anak	3	0	3	0
	Pidana Praperadilan	0	0	0	0
Jumlah		65		0	

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Perkara Perdata

Tabel 12 Perkara Perdata Diputus Tepat Waktu

No	Pengadilan / Perkara	Perkara Yg Ditangani		Perkara Yang Diputus	Putusan Kurang Dari 5.Bulan	Putusan Lebih Dari 5.Bulan
		Sisa 2020	Masuk 2021			
1	**PN Yogyakarta**					
	Perdata Gugatan	72	170	177	143	34
	Perdata Permohonan	26	335	343	0	0
	Gugatan Sederhana	0	9	9	0	0
	Perlawanan (Derden Verzet)	0	0	0	0	0
	PHI	7	80	85	85	0
Jumlah		68	491	408	408	

Perkara Pidana

Tabel 13 Perkara Pidana

No	Pengadilan / Perkara	Perkara Yg Ditangani		Perkara Yang Diputus	Putusan Kurang Dari 5.Bulan	Putusan Lebih Dari 5.Bulan
		Sisa 2020	Masuk 2021			
1	**PN Yogyakarta**					

No	Pengadilan / Perkara	Perkara Yg Ditangani		Perkara Yang Diputus	Putusan Kurang Dari 5.Bulan	Putusan Lebih Dari 5.Bulan
		Sisa 2020	Masuk 2021			
	Pidana Biasa	62	345	368	368	0
	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	208	208	208	0
	Lalu lintas	0	5254	5254	5254	0
	Tindak Pidana Korupsi	0	15	3	3	0
	Pidana Anak	3	15	16	16	0
	Pidana Praperadilan	0	3	3	3	0
Jumlah		65	5840	5852	5852	0

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Upaya Hukum Banding

Tabel 14 Upaya Hukum Banding

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan PN 2020 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2021 (Contentius)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1	**PN Yogyakarta**				
	Perdata Gugatan	0	105	38	67
	Perdata Permohonan	0	317	0	0

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan PN 2020 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2021 (Contentius)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
	Gugatan Sederhana	0	9	0	0
	Perlawanan/Derden Verzet	0	105	38	67
	PHI	0	317	0	0
Jumlah					

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan PN 2020 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2021 (Contentius)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1	**PN Yogyakarta**				
	Pidana Biasa	3	368	18	353
	Pidana Singkat	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	208	0	208
	Lalu lintas	0	5254	0	5254
	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0
	Pidana Anak	0	0	0	16
	Pidana Praperadilan	0	0	0	3
Jumlah		3	5849	0	5834

Upaya Hukum Kasasi

Perkara Perdata

Tabel 15 Upaya Hukum Kasasi Perkara Perdata

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan Banding 2020 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2021	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	**PN Yogyakarta**				
	Perdata Gugatan	0	38	29	9
	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0
Jumlah					

Perkara PHI

Tabel 16 Upaya Hukum Kasasi Pekara PHI

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan Tk. I 2020 Belum BHT	Jumlah Putusan Tk. I 2021	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	**PN Yogyakarta**				
	PHI	0	85	41	44
Jumlah					

Perkara Pidana

Tabel 17Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan Banding 2020 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2021 Yg Diterima dr PT	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	**PN Yogyakarta**				
	Pidana Biasa	1	15	12	43
	Pidana Singkat	-	-	-	-
	Pidana Cepat	-	-	-	-
	Lalu lintas	-	-	-	-
	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0
	Pidana Anak	0	0	0	0
	Pidana Praperadilan	0	0	0	0
Jumlah		1	15	12	43

Perkara yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

Perkara Perdata

Tabel 18 Upaya Hukum PK Perkara Perdata

No	Pengadilan/Perkara	Putusan Tk. I Thn 2021 Yg Telah BHT	Putusan Banding Thn 2021 Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2021	Permohonan PK Tahun 2021	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK
1	**PN Yogyakarta**					

No	Pengadilan/Perkara	Putusan Tk. I Thn 2021 Yg Telah BHT	Putusan Banding Thn 2021 Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2021	Permohonan PK Tahun 2021	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK
	Perdata Gugatan	103	32	4	4	25
	Perdata Permohonan	317	0	0	0	0
	Gugatan Sederhana	9	0	0	0	0
	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0
	PHI	0	0	0	0	0
Jumlah						

Perkara Pidana

Tabel 19 Upaya Hukum PK Perkara Pidana

No	Pengadilan/Perkara	Putusan Tk. I Thn 2021 Yg Telah BHT	Putusan Banding Thn 2021 Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2021	Permohonan PK Tahun 2021	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK
1	**PN Yogyakarta**					
	Pidana Biasa	352	4	11	0	367
	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	0	0	0	0
	Lalu lintas	0	0	0	0	0
	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	2	0

No	Pengadilan/Perkara	Putusan Tk. I Thn 2021 Yg Telah BHT	Putusan Banding Thn 2021 Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2021	Permohonan PK Tahun 2021	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	
	Pidana Anak	0	0	0	0	0	
	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	
Jumlah		352	4	11	2	367	0

4. JumlahPerkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi

Tabel 20 Media Berhasil

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Mediasi	Status			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Proses Mediasi	Tidak dapat dilaksanakan
1	Pengadilan Negeri Yogyakarta	170	9	147	14	
Jumlah		170	9	147	14	

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Tabel 21 Perkara Anak melalui Diversi

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status		
				Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
1	Pengadilan Negeri Yogyakarta	15	8	2	6	0
Jumlah		15	8	2	6	0

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

1. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)

Tabel 22 Pos Bantuan Hukum

No	Satuan Kerja	Organisasi Pemberi Layanan	Jumlah Layanan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Ket
1	PN Yogyakarta	LBH Universitas Ahmad Dahlan	534 Layanan	48.000.000	48.000.000	0	
Jumlah							

Menurut SEMA Nomor:10 Tahun 2010, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Peradilan Umum diartikan sebagai ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Ruang Posbakum digunakan untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat. Posbakum diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum mereka.

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

1. Konsultasi
2. Pembuatan Dokumen Hukum
3. Pendampingan persidangan

Kendala yang dihadapi :

1. Resiko Penyalahgunaan wewenang (sebagai lapak menjual jasa)
2. Resiko penyuapan

Langkah antisipasi dan penyelesaian :

1. Pakta Integritas semua petugas pos bakum
2. Voice Warning System anti penyuapan dan anti gratifikasi
3. Banner / Informasi Mekanisme Pengaduan
4. Monitoring tiap bulan oleh hakim pengawas

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Tabel 23 Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

No	Satuan Kerja	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perkara	Pagu Anggaran	Jumlah Serapan	Sisa Anggaran	Ket
1	PN Yogyakarta	0	0	0	0	0	
Jumlah							

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Tabel 24 Perkara Prodeo

No	Satuan Kerja	Target Perkara	Jumlah Perkara	Pagu Anggaran	Jumlah Serapan	Sisa Anggaran	Ket
1	PN Yogyakarta	3 Perkara	7 Perkara	2.760.000	732.200	2.027.800	
Jumlah							

Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA pada tahun anggaran 2021 ini mendapat alokasi anggaran dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang tertuang dalam DIPA No.005.03.099128/2021 untuk 3 (tiga) perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) Rp. 2,760,000,-. terealisasi 7 (tujuh) perkara yaitu Rp. 732.200,-, sisa anggaran Rp. 2.027.800,-. hal ini disebabkan tidak adanya masyarakat yang mengajukan perkara baik perkara pidana maupun perdata yang dibiayai oleh pembebasan biaya perkara. Untuk perkara perdata, keseluruhan pendaftaran perkara dilakukan secara e-court sehingga penyerapan anggaran sangat minim. Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA telah melakukan sosialisasi dan public campaign ke masyarakat melalui desa-desa akan tetapi perkara yang ditangani melalui prodeo sangat minim.

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

Penyelesaian perkara di tingkat pertama baik dari pendaftaran perkara sampai dengan putusan, minutasi, upaya hukum maupun eksekusi.

Kendala yang dihadapi :

Penggguna layanan yang mendaftar perkara prodeo sangat sedikit, dikarenakan tingkat ekonomi masyarakat sudah baik

Langkah antisipasi dan penyelesaian :

Sosialisasi kepada masyarakat baik melalui public campaign, media masa maupun website.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur yang menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan. Dengan beban kerja yang ada dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi jumlah, pendidikan dan kompetensi. Adapun keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 25 Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2021

No	No	Nama	NIP	Jabatan	Pangkat
KETUA, WAKIL KETUA DAN HAKIM					
1	1	Dr.FRIDA ARIYANI, SH.,M.Hum	19680203 199212 2 001	Ketua	Pembina Utama Madya (IV/d)
2	2	MUH.DJAUHAR SETYADI, SH.,MH	19680706 199603 1 006	Wakil Ketua	Pembina Utama Muda (IV/c)
3	3	LILIK NURAINI, SH	19620218 198512 2 001	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya (IV/d)
4	4	NURIL HUDA, SH, M.Hum	19591128 199212 1 001	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya (IV/d)
5	5	P.COKRO HENDRO MUKTI, SH	19650920 199203 1 004	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya (IV/d)
6	6	SARI SUDARMI, SH	19650506 199212 2 001	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya (IV/d)
7	7	SUNDARI, SH.,MH	19640704 199212 2 002	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya (IV/d)
8	8	AGNES HARI NUGRAHENI, SH.,MH	19670120 199303 2 003	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya (IV/d)
9	9	TRI RACHMAT SETIJANTA, SH.,MH	19651012 198603 1 002	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
10	10	MUSTAJAB, SH.,MH	19651008 198601 1 001	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
11	11	NURYANTO, SH.,MH	19671121 199403 1 007	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
12	12	SUPARMAN, S.H.,M.H.	19640820 199212 1 001	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
13	13	ERNA INDRAWATI, SH.,MH	19620927 199003 2 001	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
14	14	NASRULLOH, SH	19690724 199603 1 002	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
15	15	SRI ARI ASTUTI, SH.,MH	19700414 199603 2 001	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
16	16	VONNY TRISANINGSIH, SH.,MH	19671023 199603 2 002	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
17	17	PURNAMA, SH.,MH	19681006 199603 1 001	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
18	18	TRI RISWANTI, SH.,M.Hum	19710222 199603 2 001	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
19	19	MAHAPUTRA, SH., MH.	19610706 199003 1 007	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
20	20	MOCH. ARIF SATIYO WIDODO, SH.,MH	19690320 199403 1 002	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
21	21	A.SURYO HENDRATMOKO, SH	19711112 199903 1 004	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
22	22	HERI KURNIAWAN, SH.,MH	19720831 199403 1 002	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
23	23	AGUS SETIAWAN, SH.,Sp.Not	19740808 200012 1 001	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
STRUKTURAL KEPANITERAAN (TEKNIS)					

24	1	ABDUL KADIR RUMODAR, SH	19630717 198503 1 004	Panitera	Pembina (IV/a)
25	2	NARTI HARTATI, SH	19670222 198903 2 001	Panitera Muda Pidana	Penata Tk.I (III/d)
26	3	NANIK MULYANI SRI UTAMI, SH	19660405 198502 2 001	Panitera Muda Tipikor	Penata Tk.I (III/d)
27	4	KISWANTANA,SH	19690527 199403 1 002	Panitera Muda PHI	Penata Tk.I (III/d)
28	5	DIAN UMAWATI,SH., MH	19780708 200604 2 001	Panitera Muda Perdata	Penata Tk.I (III/d)
29	6	EKA SURYA SETIAWAN, SH	19760613 200012 1 001	Panitera Muda Hukum	Penata Tk.I (III/d)
PANITERA PENGGANTI					
30	1	THESIANA MAYA FITRIA A, SH.,MH	19780127 200212 2 003	Panitera Pengganti	Pembina (IV/a)
31	2	KUS YULIANI,SH	19640801 199203 2 002	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
32	3	RR.DINAWATI, SH	19671020 199303 2 005	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
33	4	Rr. SRI WINASTUTI,SH	19690714 199403 2 005	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
34	5	ANNA HENY W,SH	19660602 199903 2 003	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
35	6	MARIA LUSIATI,SH	19691115 199203 2 004	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
36	7	KUWAT WAHYU MURDANA,SH	19690805 199203 1 004	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
37	8	YANI WIDIYANTI, SH	19700119 199203 2 002	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
38	9	SRI SUWANTI, SH	19700610 199203 2 002	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
39	10	NURI MAHAR KESTRI,SH	19750905 200112 2 001	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
40	11	NOORMAN NEFONANTO,SH	19640109 198903 1 003	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
41	12	NUNUNG DIAH RST, SH	19660409 199003 2 003	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
42	13	ANTONIUS ANDI SUSANTO, SH	19711110 200604 1 001	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
43	14	SURYONO NUGROHO,SH	19660518 198803 1 001	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
44	15	DEWI INDRIYANI, SH	19830427 200805 2 001	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
45	16	HERI SANTOSA, SH	19820331 200805 1 001	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
46	17	RULLIANA YUDAWATI, SH	19790709 200904 2 004	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
47	18	YUDHA AYU TIMORNIYATI, SH	19760615 200604 2 002	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
48	19	M.V. NANIK SETIASIH	19631210 198503 2 002	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
49	20	TUNTUM RAHAYU,SH	19620507 198603 2 005	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
50	21	RR. WORO HAPSARI D,SH	19770607 200012 2 002	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
51	22	RIKE SIMBALAGO, SH	19850805 200912 2 005	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
52	23	NAFISATUN ANA FITRIA UTAMI, SH	19820706 201101 2 009	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
53	24	AGUS RIYANTO, SH	19711106 199303 1 002	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
54	25	YUNITA NILA KRISNA, SH	19900613 200904 2 001	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk.I (III/b)
JURUSITA					
55	1	HERI PRASETYA, SH	19730626 199403 1 003	Jurusita	Penata Tk I (III/d)
56	2	LUSI RACHMAYANI,SE.SH	19750825 200604 2 003	Jurusita	Penata Tk.I (III/d)
57	3	ARLYO PERDANA PUTRA,SH	19800707 200805 1 001	Jurusita	Penata Tk.I (III/d)
58	4	HERI CATUR PUDIYANTO	19670414 199303 1 004	Jurusita	Penata (III/c)
59	5	NANANG SUPRIYADI, SE.,SH.,M.Kn	19730525 200604 1 004	Jurusita	Penata (III/c)
60	6	NURMAYA REZEKY AR, SH	19800101 200805 2 002	Jurusita	Penata Muda Tk.I (III/b)
61	7	SALASA AGUS EKOYADI, SH	19721004 199303 1 005	Jurusita	Penata Muda Tk.I (III/b)
JURUSITA PENGGANTI					
62	1	JEANNE PAMELA,S.Kom,MT	19820922 200904 2 008	JSP / Staf Kepan Perdata	Penata Tk. I (III/d)
63	2	NARSIYO	19641116 198903 1 003	JSP / Staf Sub Bag Umum dan Keu	Penata Muda Tk.I (III/b)
64	3	WARSIYATI	19700117 199003 2 001	JSP / Staf Kepan Pidana	Penata Muda Tk.I (III/b)
65	4	DOMINGOS DOUTEL	19760101 199510 1 001	JSP / Staf Sub Bag Umum dan Keu	Penata Muda Tk.I (III/b)
66	5	TAUFIK HENDRAWAN, SE	19861122 201101 1 004	JSP / Staf Kepan Perdata	Penata Muda (III/a)
67	6	MOHAMAD SAID IDUL FITRI, SH	19681221 199003 1 002	JSP / Staf Kepan Perdata	Penata Muda (III/a)
STRUKTURAL KESEKRETARIATAN (NON TEKNIS)					

68	1	WIDODO BUDI SANTOSO, SH	19730921 199303 1 004	Sekretaris	Pembina (IV/a)
69	2	WALJIYANTO,ST.,MM	19800831 200604 1 003	Ka.Sub Bag. Umum dan Keuangan	Penata Tk.I (III/d)
70	3	EVENDI NUGROHO,ST	19810330 200604 1 004	Ka.Sub Bag.Kepeg. Ortalak	Penata Tk.I (III/d)
71	4	YENNY VIKKY EFFENDY,ST.SH.M.Eng	19840410 200904 2 016	Ka.Sub Bab PTIP	Penata Tk.I (III/d)
TENAGA FUNGSIONAL					
72	1	YETI EKO ISBANDIYAH, S.IP	19650426 198503 2 003	Analis kepegawaian Ahli Muda	Penata Tk.I (III/d)
73	2	NUGRAHA ABDILLAH, S.Kom	19910203 201903 1 005	Pranata Komp.Ahli Pertama	Penata Muda (III/a)
STAFF					
74	1	KUNCORO SETYA R,SE.,MM	19860724 201101 1 005	Penyusun Laporan Keuangan	Penata (III/c)
75	2	YUDI WIDIARSONO, S.Kom	19800917 201101 1 004	Bendahara-Umum dan Keu	Penata (III/c)
76	3	ARDI WICAKSONO, ST	19851018 201503 1 001	Analis Humas	Penata Muda Tk.I (III/b)
77	4	NOVITA DIASTUTI, A.Md	19891126 201503 2 003	Pengelola Kepegawain-Kortala	Pengatur Tk I (II/d)
78	5	MOH. RUSDIANTO	19721216 199303 1 001	Teknisi Sarana dan Prasarana-Umum	Pengatur (II/c)
79	6	NINDYA YOSDALU PUTRA	19780619 201408 1 004	Pengadministrasi Hukum	Pengatur Muda Tk.I(II/b)
80	7	OKTA EMILIA LARASATI, SH	19951016 202012 2 006	Analis Perkara Peradilan	Penata Muda (III/a)
81	8	NADYA MAULANI MELYANA, A.Md. A.P	19960325 202012 2 003	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Pengatur (II/c)
82	9	DWI NOVIANDARU, A.Md	19971113 202012 1 005	Pengelola Sistem dan Jaringan	Pengatur (II/c)
HAKIM AD HOC PHI					
83	1	DIAH SUSILOWATI,SH	19660321 0220121 2 022	HAKIM AD HOC PHI	
84	2	HERI PURNOMO, S.Si	19700409 0220160 2 041	HAKIM AD HOC PHI	
HAKIM AD HOC TIPIKOR					
85	1	BINSAR PANTAS P.S,SH	19750326 0220200 2 009	HAKIM AD HOC TIPIKOR	
PPNPN					
86	1	DONI SURIPTO		SOPIR	
87	2	TUNJUNG SULAKSANA P		SOPIR	
88	3	FAHMI HIDAYAT		SOPIR	
89	4	KEMAS INDARTO		SATPAM	
90	5	WIRIT WINOTO		SATPAM	
91	6	BARIYAH		SATPAM	
92	7	ARIF PRIHENDARTO		SATPAM	
93	8	BUDI PRASETYO		SATPAM	
94	9	ANDIK SULISTYO		SATPAM	
95	10	DENY DWI SUSILO		SATPAM	
96	11	PEBRIANTO		SATPAM	
97	12	SAPTO BAHTIAR		SATPAM	
98	13	BAMBANG NUGROHO A MARTANTYO		CLEANING SERVICE	
99	14	SUDARMADI		CLEANING SERVICE	
100	15	NGADIYO		CLEANING SERVICE	
101	16	DWI RIYANTO		CLEANING SERVICE	
102	17	ANGGA PERDANA PUTRA		CLEANING SERVICE	
103	18	EDI SISWANTO		CLEANING SERVICE	
104	19	DIAH SUKORINI,SH		PRAMUBHAKTI	
105	20	NOVIA IKE DEVITA, S.Kom.		PRAMUBHAKTI	

Tabel 26 Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2021

No	Satuan Kerja	Hakim					Teknis						Non Teknis			Jumlah
		Ketua	Wakil Ketua	Hakim	Hakim Ad Hoc Tipikor	Hakim Ad Hoc PHI	Panitera	Wakil Panitera	Panitera Muda	Panitera Pengganti	Juru Sita	Juru Sita Pengganti	Sekretaris	Ka Sub Bagian	JA/JF	
1	PN YOGYAKARTA	1	1	21	1	2	1	-	5	25	7	6	1	3	11	**85**
Jumlah		**1**	**1**	**21**	**1**	**2**	**1**	**0**	**5**	**25**	**7**	**6**	**1**	**3**	**11**	**85**

Secara lebih terperinci, keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan berdasarkan Pangkat / Golongan dan Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 27 Keadaan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

No	Satuan Kerja	Jenjang Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	
1	PN YOGYAKARTA	-	1	7	4	45	24	1	**82**
Jumlah		**0**	**1**	**7**	**4**	**45**	**24**	**1**	**82**

A. PROMOSI / MUTASI

Rekapitulasi Promosi / Mutasi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 28 Rekapitulasi Mutasi Hakim dan Pegawai Tahun 2021

NO	NAMA	-TMT. MUTASI MASUK -JABATAN LAMA -JABATAN BARU	-TMT. MUTASI KELUAR -JABATAN LAMA -JABATAN BARU
1	2	3	4
1	ABDUL KADIR RUMODAR	-04-01-2021 - PANITERA PN SRAGEN - PANITERA PN YOGYA	
2	ZULFAHMI ANWAR, SH.,MH		-04-01-2021 PANITERA PN YOGYAKARTA PANITERA PN PALEMBANG
3	NURIL HUDA,SH,MHUM	01/02/2021 - HAKIM PN KUPANG - HAKIM PN YOGYA	
4	OKTA EMILIA LARASATI,SH	01/02/2021 CPNS	
5	NADYA MAULANI MELYANA,A,Md.A.P	01/02/2021 CPNS	
6	DWI NOVIANDARU,A.Md	01/02/2021 CPNS	
7	ENY KISDARYANTI, SE.,SH		-28-06-2021 STAF/PELAKSANA/ANALIS PERKARA PANITERA PENGGANTI PN BANTUL
8	BANDUNG SUHERMOYO, SH.,M.Hum		-30-06-2021 HAKIM PN YOGYAKARTA HAKIM TINGGI PT KENDARI

9	YUNITA	-01-07-2021 - PP PN WONOSOBO - PP PN YOGYAKARTA	
10	WIYANTO, SH.,MH		-02-07-2021 HAKIM PN YOGYAKARTA WKPN PONOROGO
11	NENDEN RIKA PUSPITASARI, SH		-05-07-2021 HAKIM PN YOGYAKARTA HAKIM PN SEMARANG
12	EKO WAHONO, A.Md		-05-07-2021 PANITERA PENGGANTI PN YOGYAKARTA PANITERA PENGGANTI PN MALANG
13	Dr.FAHMIRON, SH.,M.Hum		-12-07-2021 WKPN YOGYAKARTA KPN TANJUNG PINANG
14	MUH.DJAUHAR SETYADI	-14-07-2021 - WKPN TANJUNG PINANG - WKPN YOGYAKARTA	
15	ANJAR DWIYANTO, SH		-25-10-2021 ANALIS PERKARA PERADILAN PN YK PANITERA PENGGANTI PN BANTUL
16	HERIYENTI, SH.,MH		-01-11-2021 HAKIM PN YOGYAKARTA HAKIM PN SEMARANG
17	TITIK BUDI WINARTI, SH		-01-11-2021 HAKIM PN YOGYAKARTA HAKIM PN SURABAYA
18	AGUS NAZARUDDINSYAH, SH		-01-11-2021 HAKIM PN YOGYAKARTA HAKIM PN SEMARANG

18	IDA RATNAWATI, SH.,MH		-01-11-2021 HAKIM PN YOGYAKARTA HAKIM PN SEMARANG
20	AGNES HARI NUGRAHENI, SH.,MH	01/11/2021 - HAKIM PN BALIKPAPAN - HAKIM PN YOGYA	
21	VONNY TRISANINGSIH, SH.,MH	01/11/2021 - HAKIM PN BANJARMASIN - HAKIM PN YOGYA	

B. PENSIUN

Rekapitulasi pensiun Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 29 Rekapitulasi Pegawai dan Hakim Pensiun / Meninggal Dunia Tahun 2021

NO	NAMA	KETERANGAN PENSIUN / MENINGGAL DUNIA
1	2	4
1	DANI RUSDIAH,ST,SH	-01-02-2021 HAKIM AD HOC PHI PENSIUN
2	SAMSUL HADI,SH.MSc	10/02/2021 HAKIM ADHOC TIPIKOR PN YK PENSIUN
3	RINA LISTYOWATI,SH,MH	10/02/2021 HAKIM ADHOC TIPIKOR YK PENSIUN
4	INDRI HARI PURNOMO	01/05/2021 JURUSITA PENGGANTI YK PENSIUN
5	JATMAKA	01/06/2021 JURUSITA PENGGANTI YK PENSIUN
6	EDI SETIA BUDI	-10-07-2021 JURUSITA PENGGANTI PN YK MENINGGAL
7	ENCANG HERMAWAN	-01-11-2021 HAKIM AD HOC TIPIKOR PN YK PURNA TUGAS
8	SYAMSUL BAHRI, SH	-01-11-2021 HAKIM AD HOC TIPIKOR PN YK PURNA TUGAS

Rekapitulasi pensiun Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 30 Rekapitulasi Pensiun Hakim dan Pegawai Tahun 2021

No	Satuan Kerja	Tipe / Kelas	Batas Usia Pensiun	Meninggal	Pensiun Dini	**Jumlah**
1	PN Yogyakarta	IA	7	1	-	8
Jumlah			7	1	-	8

D. DIKLAT

Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 31 Rekapitulasi Diklat Hakim dan Pegawai Tahun 2021

No	Satuan Kerja	Tipe / Kelas	Jenis Diklat				**Jumlah**
			Diklat PIM III	Diklat PIM IV	Diklat Teknis	Diklat Fungsional	
1	PN Yogyakarta	IA	-	1	9	2	
Jumlah			-	-		-	

Tabel 32 Diklat Hakim dan Pegawai Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT	WAKTU PELAKSANAAN
1	Ardi Wicaksono, ST	Pelatihan Basic Video Editing	Kantor (online)	1-5 Februari 2021
2	Abdul Kadir Rumodar, SH	Pelatihan Kompetensi Kehumasan	Kantor (online)	1-5 Februari 2021
3	A.Suryo Hendratmoko, SH	Pelatihan General English For Adults	Kantor (online)	1-9 Februari 2021

4	Agus Setiawan, SH.,Sp.Not	Pelatihan General English For Adults	Kantor (online)	1-9 Februari 2021
5	Dian Umawati, SH.,MH	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	Kantor (online)	22 Februari - 11 Juni 2021
6	Eko Wahono, SH	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	Kantor (online)	22 Februari - 11 Juni 2021
7	Agus Setiawan, SH.,Sp.Not	Pelatihan Ilmu Jurnalistik	Kantor (online)	15-18 Februari 2021
8	Yenny Vikky E, ST.,SH.,M.Eng	Pelatihan Basic Image Editing With Adobe Photoshop	Kantor (online)	22-26 Februari 2021
9	Heriyenti, SH.,MH	Pelatihan Terpadu Sertifikasi SPPA	Kantor (online)	4 Maret - 13 April 2021
10	Yenny Vikky E, ST.,SH.,M.Eng	Pelatihan Manajemen Aset	Kantor (online)	15 - 19 Maret 2021
11	Agus Setiawan, SH.,Sp.Not	Pelatihan Public Speaking And Effective Communication Skill	Kantor (online)	15 - 19 Maret 2021
12	Heri Kurniawan, SH.,MH	Short Course Pedoman Penyelesaian Perkara HKI	Kantor (online)	23-25 Maret 2021
13	Ardi Wicaksono, ST	Pelatihan Basic Booklet Design with Adobe Indesign	Kantor (online)	5-9 April 2021
14	Agus Setiawan, SH.,Sp.Not	Pelatihan Sertifikasi Niaga Kepailitan dan PKPU	Kantor (online)	12 April - 25 Mei 2021
15	Yenny Vikky E, ST.,SH.,M.Eng	Pelatihan E-Learning Penyegaran PPK	Kantor (online)	26-30 April 2021
16	Heriyenti, SH.,MH	FGD Peningkatan Kualitas Pelayanan Berbasis ISO 9001:2015	Gedung TP PKK Kota Yogyakarta	31 Mei 2021
17	Abdul Kadir Rumodar, SH	Bimtek Kepaniteraan se Wilayah Hukum PT Yogyakarta	Hotel Eastparc Yogyakarta	9-11 Juni 2021
18	Narti Hartati, SH	Bimtek Kepaniteraan se Wilayah Hukum PT Yogyakarta	Hotel Eastparc Yogyakarta	9-11 Juni 2021
19	Eka Surya Setiawan, SH	Bimtek Kepaniteraan se Wilayah Hukum PT Yogyakarta	Hotel Eastparc Yogyakarta	9-11 Juni 2021
20	A.Andi Susanto, SH	Bimtek Kepaniteraan se Wilayah Hukum PT Yogyakarta	Hotel Eastparc Yogyakarta	9-11 Juni 2021
21	Widodo Budi Santoso, SH	Bimtek Kesekretariatan se Wilayah Hukum PT Yogyakarta	Hotel Eastparc Yogyakarta	9-11 Juni 2021
22	Waljiyanto, ST.,MM	Bimtek Kesekretariatan se Wilayah Hukum PT Yogyakarta	Hotel Eastparc Yogyakarta	9-11 Juni 2021

23	Ardi Wicaksono, ST	Bimtek Kesekretariatan se Wilayah Hukum PT Yogyakarta	Hotel Eastparc Yogyakarta	9-11 Juni 2021
24	Yenny Vikky E, ST.,SH.,M.Eng	Bimtek Kesekretariatan se Wilayah Hukum PT Yogyakarta	Hotel Eastparc Yogyakarta	9-11 Juni 2021
25	Dr.Frida Ariyani, SH.,M.Hum	Workshop Identifikasi Kebutuhan Khusus Perempuan dan Anak dengan Dissabilitas Berhadapan dengan Hukum	Yogyakarta Plaza Hotel	28-29 Juni 2021
26	Agus Setiawan, SH.,Sp.Not	Pelatihan Sertifikasi Niaga bidang HKI	Kantor (online)	30 Juni- 6 Agustus 2021
27	Dwi Noviandaru, A.Md	Latsar CPNS	Kantor (online)	21 Juli -12 Oktober 2021
28	Nadya Maulani M, A.Md.A.P	Latsar CPNS	Kantor (online)	22 Juli -12 Oktober 2021
29	Ardi Wicaksono, ST	Pelatihan Laporan Kinerja	Kantor (online)	28-29 Juni 2021
30	Kuncoro Setya R, SE.,MM	Pelatihan Manajemen Aset	Kantor (online)	12-16 Juli 2021
31	Yenny Vikky E, ST.,SH.,M.Eng	Pelatihan E-Learning Penyusunan Laporan Kinerja	Kantor (online)	12-16 Juli 2021
32	Heri Kurniawan, SH.,MH	Workshop Cakap Hukum bagi Perempuan dan Anak dengan Disabilitas dalamHukum perdata bersama tiga profesi dan akademisi	Kantor (online)	27 Juli 2021
33	Tri Riswanti, SH.,M.Hum	Pelatihan Teknik Menyusun Resume Putusan Pengadilan (Executive Summary)	Kantor (online)	4-5 Agustus 2021
34	Okta Emilia Larasati, SH	Pelatihan Pemecahan Masalah Praktis (Practical Problem Solving)	Kantor (online)	10-13 Agustus 2021
35	Muh.Djauhar Setyadi, SH.MH	Workshop Implementasi Perma No 3 Tahun 2017 di Pengadilan dan pendampingan 3 profesi terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas berhadapan dengan Hukum	Kantor (online)	12 Agustus 2021
36	Muh.Djauhar Setyadi, SH.MH	Pelatihan Mengenal Kebutuhan Khusus dan Cara Berinteraksi Dengan Disabilitas Fisik	Kantor (online)	20 Agustus 2021
37	Heriyenti, SH.,MH	Pelatihan Mengenal Kebutuhan Khusus dan Cara Berinteraksi Dengan Disabilitas Fisik	Kantor (online)	21 Agustus 2021
38	Nindya Yosdalu Putra	Pelatihan Mengenal Kebutuhan Khusus dan Cara Berinteraksi Dengan Disabilitas Fisik	Kantor (online)	22 Agustus 2021
39	Lusi Rachmayani, SE.,SH	Pelatihan Mengenal Kebutuhan Khusus dan Cara Berinteraksi Dengan Disabilitas Fisik	Kantor (online)	23 Agustus 2021

40	Diah Sukorini, SH	Pelatihan Mengenal Kebutuhan Khusus dan Cara Berinteraksi Dengan Disabilitas Fisik	Kantor (online)	24 Agustus 2021
41	Bariyah	Pelatihan Mengenal Kebutuhan Khusus dan Cara Berinteraksi Dengan Disabilitas Fisik	Kantor (online)	25 Agustus 2021
1	Ardi Wicaksono, ST	Pelatihan Basic Video Editing	Kantor (online)	1-5 Februari 2021
2	Abdul Kadir Rumodar, SH	Pelatihan Kompetensi Kehumasan	Kantor (online)	1-5 Februari 2021

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

I. PENGELOLAAN ANGGARAN DIPA

REKAPITULASI
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA
TAHUN ANGGARAN 2020 DAN TAHUN ANGGARAN 2021

Tabel 33 Reakpitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN 2020				TAHUN 2021			
		PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%	Rp
	B. Pegawai	16.950.059.000	16.874.147.661	99,55	75.909.339	16.560.475.000	16.337.263.363	98,65	223.211.637
	B. Barang Opr	2.418.659.000	2.353.673.789	97.31	64.985.211	2.583.017.000	2.559.839.490	99,10	23.177.510
	B. Barang Non Opr	.....	.....	.....	.....	24.600.000	24.464.296	99,45	135.704
	B. Modal	25.000.000	24.600.960	98,40	399.040	265.000.000	264.961.000	99,98	39.000
	Jumlah 01	**19.393.718.000**	**19.252.424.410**	**99, 27**	**141.293590**	**19.433.092.000**	**19.186.528.149**	**98,73**	**246.563.851**
	B. Barang (03)	269.654.000	265.896.557	98,61	2.680.000	226.904.000	224.610.819	98,99	2.293.181
	Jumlah 03	**269.654.000**	**265.896.557**	**98,61**	**2.680.000**	**226.904.000**	**224.610.819**	**98,99**	**2.293.181**
	Jumlah 01 + 03	**19.663.372.000**	**265.896.557**	**98,61**	**2.680.000**	**19.659.996.000**	**19.411.138.968**	**98,86**	**248.857.032**

Keterangan :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

1. Belanja Pegawai

Terjadi sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 223.211.637,- untuk belanja pegawai karena ada 3 hakim adhoc yag pensiun selama periode th 2021

2. Belanja Barang Operasional

Terjadi sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 23.177.510,- untuk Belanja Barang Operasional karena :

1. sisa pada akun sewa rumah dinas hakim
2. sisa pada langganan aplikasi untuk telekonferen (zoom Meeting)
3. Belanja Barang Non Operasional

Terjadi sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 135.704,- untuk belanja covid dan stranas P4GN karena sudah dibelanjakan dengan nilai alat/jasa terkecil

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Terjadi sisa pagu penyerapan anggaran sebesar Rp 39.000,- untuk belanja modal karena sudah maksimal.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Terjadi sisa pagu anggaran sebesar Rp 2.293.181,- dalam manajemen peradilan (DIPA Badan Peradilan Umum)/ Belanja Barang karena terdapat sisa dalam penyelesaian perkara karena hal-hal sebagai berikut:

1049.005.004 Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat Pertama:

1049.005.038.051	:	Dalam belanja pendaftaran berkas perkara sebesar Rp.3.390,- karena sudah tidak terdapat lagi berkas perkara yang akan digandakan / dijilidkan
1049.005.038.052	:	Dalam belanja penetapan hari sidang sebesar Rp.0,-
1049.005.038.053	:	Dalam belanja pemeriksaan disidang pengadilan sebesar Rp.0,-
1049.005.038.054	:	Dalam belanja minutasi/upaya hukum sebesar Rp. 900,- karena sudah maksimal
1049.005.038.055	:	Dalam belanja pengiriman salinan putusan kpd JPU sebesar Rp42.800,- karena sudah maksimal .
1049.005.038.056	:	Dalam belanja Pengiriman surat penahanan sebesar Rp.49.450,- karena sudah tidak ada surat penahan yang dikirim .
1049.005.038.057	:	Dalam belanja penanganan perkara banding sebesar Rp.1.000,-karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.
1049.005.038.058	:	Dalam belanja penanganan pkr kasasi dan PK sebesar Rp.1.040,- karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.

B. 1049.005.004 Perkara Tipikor yang diselesaikan di tingkat Pertama:

1049.005.039.051	:	Dalam belanja pendaftaran berkas perkara sebesar Rp.500,-karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.

1049.005.039.052 : Dalam belanja penetapan hari sidang sebesar Rp.0,-

1049.005.039.053 : Dalam belanja pemeriksaan disidang pengadilan sebesar Rp.14.747,- karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.

1049.005.039.054 : Dalam belanja minutasi/upaya hukum sebesar Rp. 50,- karena sudah tidak terdapat lagi berkas perkara yang akan digandakan / dijilidkan .

1049.005.039.055 : Dalam belanja pengiriman salinan putusan kpd JPU sebesar Rp0,- karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.

1049.005.039.056 : Dalam belanja Pengiriman surat penahanan sebesar Rp.4.000,-

karena sudah tidak ada surat penahanan yang dikirim .

1049.005.039.057 : Dalam belanja penanganan perkara banding sebesar Rp.500,-

karena habis .

1049.005.039.058 : Dalam belanja penanganan perkara kasasi dan PK sebesar Rp.2.000,- karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.

C. 1049.005.004 Perkara PHI yang diselesaikan di tingkat Pertama

1049.005.040.051 : Dalam belanja pendaftaran berkas perkara sebesar Rp.0,-

karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.

1049.005.040.052 : Dalam belanja penetapan majelis hakim sebesar Rp.0,-

1049.005.040.053 : Dalam belanja pemeriksaan disidang pengadilan sebesar Rp.0,- karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.

1049.005.040.054 : Dalam belanja minutasi/upaya hukum sebesar Rp. 0,-

karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.

1049.005.040.055 : Dalam belanja pengiriman salinan putusan kpd para pihak sebesar Rp0,-

karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan..

1049.005.040.056 : Dalam belanja penanganan pkr kasasi dan PK sebesar Rp.7.500,-

karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan. .

1049.005.040.057 : Dalam belanja eksekusi putusan pengadilan sebesar Rp.50.000,-karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.

1049.006. Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Yogyakarta:

1049.006.004.051 : Dalam belanja Biaya Perkara sebesar Rp 1.617.800 karena sudah tidak terdapat lagi perkara Prodeo yang diajukan sehingga tidak ada Belanja Bahan, Barang Persediaan Konsumsi maupun perjalanan dinas dalam kota yang direalisasikan.

1049.006.004.052 : Dalam belanja Biaya Eksekusi sebesar Rp 410.000,00 karena tidak ada perkara eksekusi yang diajukan secara Prodeo.

ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN (ABT)

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)

Tabel 34 Rekapitulasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dan Pagu Minus DIPA 01

NO	JENIS BELANJA	2020	2021	KENAIKAN
PAGU AWAL		**PAGU 2020**	**PAGU 2021**	**KENAIKAN**
1	DUKUNGAN MANAJEMEN	-	8,600,000	8,600,000
2	GAJI DAN TUNJANGAN	16.922.745.000	16.922.745.000	0
3	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	2.380.629.000	2,537,177,000	156.548.000
4	BELANJA MODAL	25.000.000	265,000,000	240.000.000
	JUMLAH I	**19.328.374.000**	**19.733.522.000**	**405.148.000**

ABT		PAGU 2020	PAGU 2021	KENAIKAN
1	BELANJA MODAL	.....-.....	.....-.....	.....
2	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	.....-.....	45.840.000	45.840.000
3	NON OPERASIONAL	.....-.....	16.000.000	16.000.000
	JUMLAH II	.....-.....	**61.840.000**	**61.840.000**

PAGU MINUS		PAGU 2020	PAGU 2021	KENAIKAN
1	GAJI DAN TUNJANGAN	180.499.000	-	-
	JUMLAH III	**180.499.000**	**-**	**-**
	TOTAL	**19.508.876.899**	**19.795.362.000**	**466.988.000**

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN (ABT)

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

DIPA BADAN PERADILAN UMUM (03)

Tabel 35 Rekapitulasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dan Pengembalian DIPA 03

NO	JENIS BELANJA	2020	2021	KENAIKAN
PAGU AWAL		**PAGU 2020**	**PAGU 2021**	**KENAIKAN**
1	BELANJA BARANG	269.654.000	265.454.000	.....
ABT		**ABT 2020**	**ABT 2021**	**KENAIKAN**
1	BELANJA BARANG	.....-.....	9.450.000	.....
PENGEMBALIAN		**PENGEMBALIAN 2020**	**PENGEMBALIAN 2021**	**KENAIKAN**
1	BELANJA BARANG	.....-.....	48.000.000	.....
	TOTAL	269.654.000	.....	.....

Untuk DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) tidak terdapat alokasi ABT / Pengurangan Anggaran baik untuk tahun anggaran 2020 maupun tahun 2021.

Sedangkan DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) tidak terdapat alokasi ABT / Pengurangan Anggaran baik untuk tahun anggaran 2020 maupun tahun 2021.

REKAPITULASI

LAPORAN REALISASI PENGELOLAAN PENDAPATAN PNBP

TAHUN ANGGARAN 2020 DAN TAHUN ANGGARAN 2021

DIPA 01

Tabel 36 Rekapitulasi Laporan Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNBP DIPA 01

NO.	AKUN & URAIAN PENDAPATAN		TAHUN 2020		TAHUN 2021		PENDAPATAN	
			ESTIMASI PENDAPATAN	PENERIMAAN	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	22.269.511	-	19.580.000	- 2.689.511	- 12.07
		JUMLAH	-	22.269.511	-	19.580.000	- 2.689.511	- 12.07

Penjelasan :

Akun 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

Terdapat penurunan penerimaan pendapatan sebesar Rp - 2.689.511 (- 12,07 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan pendapatan sewa tanah, Gedung dan bangunan karena Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta jumlahnya berkurang di tahun 2021, sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

REKAPITULASI

LAPORAN REALISASI PENGELOLAAN PENDAPATAN PNBP

TAHUN ANGGARAN 2020 DAN TAHUN ANGGARAN 2021

DIPA 03

Tabel 37 Rekapitulasi Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNBP DIPA 03

NO.	AKUN & URAIAN PENDAPATAN		**TAHUN 2020**		**TAHUN 2021**		**PENDAPATAN**	
			ESTIMASI PENDAPATAN	PENERIMAAN	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	-	130.000	-	-	130.000	100
2	425232	Pendapatan Uang meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan		6.490.000		7.640.000	1.150.000	15.05
3	425233	Pendapatan Ongkos Perkara		17.830.000		19.785.000	1.955.000	9,88
4	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya		101.969.500		65.788.300	-36.181.200	-54,99
		JUMLAH	-	126.419.500	-	93.213.300	-33.206.200	35,62

Penjelasan :

Akun 425231 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan

Terdapat penurunan penerimaan pendapatan sebesar Rp -130.000 (-100 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan Pendapatan Pengesahan Surat dibawah tangan karena terjadi penurunan permintaan dikarenakan dapat melakukan pengunduhan (*download*) secara mandiri melalui sistem e-Court.

Akun 425232 Pendapatan Pendapatan Uang meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan

erdapat kenaikan penerimaan pendapatan sebesar Rp 1.150.000 (15.05 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera karena ada kenaikan jumlah perkara di Tahun 2021

Akun 425233 Pendapatan Ongkos Perkara

Terdapat kenaikan penerimaan pendapatan sebesar Rp 1.955.000 (9,88 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan pendapatan ongkos perkara karena kenaikan jumlah perkara di Tahun 2021

Akun 425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya

Terdapat penurunan penerimaan pendapatan sebesar Rp -36.181.200 (-54.99 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan belanja pegawai karena penurunan jumlah perkara di Tahun 2021.

II. LAPORAN KEUANGAN PERKARA
BIAYA PERDATA GUGATAN

Tabel 38 Biaya Perdata Gugatan

Uraian	Keadaan Keuangan				Keterangan
	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	
Saldo Awal	587.856.647,84				Biaya lain lain terdiri dari biaya penggandaan dan surat menyurat,
Penerimaan		702.946.500,00			
Biaya Proses/ATK/Pemberkasan*)			38.175.000,00		
Biaya Panggilan			128.280.200,00		
Biaya Penerjemah			-		
Biaya Pemberitahuan			121.549.000,00		
Biaya Sita			-		
Biaya Pemeriksaan Setempat			21.835.000,00		
Biaya Sumpah			19.570.000,00		
Biaya Saksi Ahli			-		
Biaya Pengiriman			38.290.000,00		
Biaya Materai			4.980.000,00		
PNBP Biaya Pendaftaran			19.570.000,00		
PNBP Redaksi			4.840.000,00		

PNBP Lain-lain			20.707.000,00		
Pengembalian Sisa Panjar			218.274.800,00		
Biaya Lain-lain			23.500.200,00		
Saldo Akhir				631.231.947,84	
Jumlah	**587.856.647,84**	**702.946.500,00**	**659.571.200,00**	**631.231.947,84**	

BIAYA PROSES PERDATA

Uraian	Keadaan Keuangan				Keterangan
	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	
Saldo Awal	7.616.800,00				
Penerimaan		38.175.000,00			
Pengeluaran			35.128.000,00		
Saldo Akhir				10.663.800,00	
Jumlah	7.616.800,00	38.175.000,00	35.128.000,00	10.663.800,00	

BIAYA EKSEKUSI PERDATA

Uraian	Keadaan Keuangan				Keterangan
	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	
Saldo Awal	7.645.538.374,00				
Penerimaan		134.445.000,00			

Biaya Materai			420.000,00		
Biaya Leges			-		
Biaya Sita Eksekusi			5.000.000,00		
Biaya Juru Sita			3.500.000,00		
Biaya Pengumuman Lelang/Iklan			-		
Biaya Juru Lelang			-		
Biaya Lelang			-		Biaya lain lain terdiri dari biaya penggandaan dan surat menyurat, pelaksanaan eksekusi, dan penyerahan hasil lelang
Biaya Saksi			5.200.000,00		
Biaya Pemberitahuan			18.885.000,00		
Biaya Keamanan			-		
Pengembalian Sisa Panjar Eksekusi			107.174.000,00		
PNBP			1.915.000,00		
Lain-lain			41.043.000,00		
Saldo Akhir				7.596.846.374,00	
Jumlah	7.645.538.374,00	134.445.000,00	183.137.000,00	7.596.846.374,00	

BIAYA KONSIGNASI

Uraian	Keadaan Keuangan				Keterangan
	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	
Saldo Awal	7.032.873.251,00				
Penerimaan (Uang Konsinyasi dan Panjar Konsinyasi)		0,00			
Biaya Pelaksanaan Penawaran			0,00		
Biaya pendaftaran			0,00		
Biaya Proses/ATK			0,00		
Redaksi			0,00		
Materai			0,00		
Leges			0,00		
Pengambilan Uang Konsinyasi			0,00		
Biaya Lain-lain			0,00		
Saldo Akhir				7.032.873.251,00	
Jumlah	7.032.873.251,00	0,00	0,00	7.032.873.251,00	

BIAYA PERDATA KHUSUS (PHI)

Uraian	Keadaan Keuangan				Keterangan
	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	
Saldo Awal	6.581.000,00				
Penerimaan		29.200.000,00			
Biaya Proses/ATK/Pemberkasan*)			1.575.000,00		
Biaya Panggilan			3.810.000,00		
Biaya Penerjemah			-		
Biaya Pemberitahuan			9.360.000,00		
Biaya Sita			-		
Biaya Pemeriksaan Setempat			-		
Biaya Sumpah			150.000,00		
Biaya Saksi Ahli			-		
Biaya Pengiriman			2.314.000,00		
Biaya Materai			50.000,00		
PNBP Biaya Pendaftaran			350.000,00		
PNBP Redaksi			60.000,00		
PNBP Lain-lain			430.000,00		

Pengembalian Sisa Panjar			8.197.000,00		
Biaya Lain-lain			3.796.000,00		
Saldo Akhir				5.689.000,00	
Jumlah	6.581.000,00	29.200.000,00	30.092.000,00	5.689.000,00	

BIAYA EKSEKUSI PERDATA KHUSUS (PHI)

Uraian	Keadaan Keuangan				Keterangan
	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	
Saldo Awal	5.525.000,00				
Penerimaan		373.068.500,00			
Biaya Materai			30.000,00		
Biaya Leges			-		
Biaya Sita Eksekusi			-		
Biaya Juru Sita			-		
Biaya Pengumuman Lelang/Iklan			-		
Biaya Juru Lelang			-		
Biaya Lelang			-		
Biaya Saksi			400.000,00		
Biaya Pemberitahuan			600.000,00		

Biaya Keamanan			-		
Pengembalian Sisa Panjar Eksekusi			325.000,00		
PNBP			-		
Lain-lain			372.942.500,00		
Saldo Akhir				4.296.000,00	
Jumlah	5.525.000,00	373.068.500,00	374.297.500,00	4.296.000,00	

REKAP BIAYA PERKARA PERDATA

Uraian	Keadaan Keuangan					
	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
Biaya Perkara	587.856.647,84	702.946.500,00	659.571.200,00	631.231.947,84		
Biaya Eksekusi	7.645.538.374,00	134.445.000,00	183.137.000,00	7.596.846.374,00		
Biaya Konsinyasi	7.032.873.251,00	0,00	0,00	7.032.873.251,00		
Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00		
PHI*)	12.106.000,00	402.268.500,00	404.389.500,00	9.985.000,00		
Jumlah	15.278.374.272,84	1.239.660.000,00	1.247.097.700,00	15.270.936.572,84	15.269.993.972,84	942.600,00

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

I. SARANA DAN PRASARANA GEDUNG.

Ada 2 (dua) gedung Kantor. Pertama Gedung Kantor Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA Jl. Kapas No. 10 Yogyakarta dibangun diatas tanah seluas 7385 m2, terdiri dari 2 (dua) lantai, dan gedung Tipikor di Jl Prof Dr Soepomo 12 Yogyakarta dengan rincian sarana dan prasara gedung dan fasilitas perkantoran sebagai berikut:

1. Tanah dan Bangunan Gedung

Tabel 39 Daftar Tanah dan Bangunan Gedung Tahun 2021

No	Satker	Luas Tanah (m²)	Bangunan (m²)	Peruntukan	Pemegang Hak Atas Tanah
1	PN Yogyakarta	3.163	1.295	Gedung Tipikor dan PHI	Pemerintah RI Cq. MA RI
		7.385	3.610	Gedung Kantor	Pemerintah RI Cq. MA RI

2. Rumah Negara

Tabel 40 Daftar Rumah Negara Tahun 2021

No	Satker	Jumlah	Kondisi			Pemegang Hak Atas Tanah
			Baik	Rusak	Rusak Berat	
1	PN Yogyakarta	19	10	9		Pemerintah RI Cq. MA RI

3. Kendaraan Dinas Roda 2

Tabel 41 Daftar Kendaraan Roda 2 Tahun 2021

No	Satker	Merk	Type	Jumlah	Kondisi
1	PN Yogyakarta	Honda	Supra 125	3	Baik
		Honda	HONDA GL. IIISPORT	1	Baik
		Honda	HONDA SUPRA FIT X	1	Baik

No	Satker	Merk	Type	Jumlah	Kondisi
		Honda	HONDA SUPRA FIT	4	Baik
		Honda	HONDA GP III MEGA PRO	2	Baik
		Honda	HONDA NF 100 D	1	Baik
Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)				12	

4. Kendaraan Dinas Roda 4

Tabel 42 Daftar Kendaraan Dinas Roda 4 Tahun 2021

No	Satker	Merk	Type	Jumlah	Kondisi
1	PN Yogyakarta	Toyota	Altis	2	Baik
		Toyota	Vios	2	Baik
		Toyota	Innova G	1	Baik
		Toyota	Innova V	1	Baik
		Toyota	Kijang KF 40	1	Baik
		Toyota	Kijang LX	1	Baik
		Toyota	Avanza	1	Baik
Jumlah Kendaraan Roda 4 (Empat)				9	

b. **Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung**

Tabel 43 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2021

No	Satker	Jenis Pengadaan
1	PN Yogyakarta	3 Unit PC Kepaniteraan 1 Set Mesin Antrian Sidang 1 Set Ruang Sidang Online

c. **Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung**

Tabel 44 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2021

No	Satker	Jenis pemeliharaan	Keterangan
1	PN Yogyakarta	1. Penambahan jalur akses hakim 2. Penggantian backdrop ruang sidang anak 3. Penggantian backdrop dan sekat ruang sidang Chandra 4. Renovasi pos Satpam 5. Penambahan daya listrik 6. Pemeliharaan toilet difabel 7. Pemeliharaan Kantin 8. Pemeliharaan sumur bor 9. Pemeliharaan rumah dinas	

d. **Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung**

Tahun 2021 tidak ada Penghapusan Sarana Dan Prasarana Gedung.

Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2021

Tabel 45 Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2021

No	Satker	Tanggal	Jenis barang	Keterangan
1	PN Yogyakarta	-	-	-

II. SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG

Hal-hal yang dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas Pengadilan antara lain adanya sarana dan prasarana fasilitas penunjang. Dalam hal ini sarana dan prasarana fasilitas Gedung pada Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 46 Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

No	Nama Barang	Pengadaan 2021	Jumlah 2021
1	Komputer	3	72
2	Laptop		51
3	Infokus/LCD		2
4	PABX		2
5	Mesin Ketik		10
6	Mesin Stensil		-
7	Mesin Fotokopi		1

No	Nama Barang	Pengadaan 2021	Jumlah 2021
8	AC		69
9	Faximile		5
10	Brankas		5
11	Sound system		6
12	Mesin Absensi		2
13	Tabung Pemadam Api		1
14	CCTV		5
15	UPS		4
16	Genset		2
17	Handy Cam		2
18	Pesawat telepon		2
19	Printer		42
20	Scanner		8
21	Server		3
22	Lemari Kayu		55
23	Lemari Besi		25
24	Filling Kabinet Kayu		-
25	Filling Kabinet Besi		19
26	Buffet		8
27	Rak		67
28	Meja Kerja Kayu		150
29	Kursi Kayu		54
30	Kursi Besi Metal		290
31	Sice		15
32	Bangku Panjang Kayu		60
33	Meja Rapat		3
34	Meja Komputer		8
35	Meja Resepsionis		4
36	Mesin Absensi sidik Jari		-
37	Kamera		2

No	Nama Barang	Pengadaan 2021	Jumlah 2021
38	Ht		4
39	Sekat		7
40	Meja Sidang		-
41	Kursi Hakim		-
42	Meja Telepon		3
43	Mesin Hitung		1
44	Kipas Angin		8
45	Televisi		18
46	RIG		-
47	Kulkas		2
48	External Hardisk		-
49	Hardisk		-
50	Anti Virus		-
51	Acces Point		9
52	Rak Server		1
53	Router		4
54	Air Curtain		0
54	Switch Hub 24 port		
55	Sumur		

a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2021

Tabel 47 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2021

No	Satker	Jenis Pemeliharaan	Keterangan
1	PN Yogyakarta	1. Pemeliharaan peralatan mesin : - Perawatan kendaraan dinas - Perawatan genset - Perawatan AC, PC, Printer, Fax, Fotokopi, soundsystem, proyektor, 2. Pemeliharaan jaringan : - Jaringan CCTV - Jaringan telpon - Jaringan internet.	

b. Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Pada tahun 2021 tidak ada penghapusan sarana dan prasarana fasilitas gedung.

Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2021

Tabel 48 Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2021

No	Satker	Tanggal	Jenis Barang	Keterangan
1	PN Yogyakarta	-	-	-

III. SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN PENCEGAHAN COVID 19

Disaat pandemi diperlukan tindakan yang cepat, tepat dan bijak. Instrumen-instrumen hukum dan peradilan haruslah tetap difungsikan namun dengan pertimbangan yang matang agar dapat ikut berperan dalam mengurangi dan memotong mata rantai penyebaran virus Covid-19.

Mahkamah Agung telah dengan cepat merespon situasi pandemi ini dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 beserta perubanhannya, SEMA Nomor 9 tahun 2021 yang merupakan perubahan SEMA 8 tahun 2021 serta SE SEKMA Nomor 8 tahun 2021 dan juga beberapa penyesuaian jam kerja melalui Work From Home dan Work From Office, penyesuaian anggaran bahkan penyesuaian dan terobosan dalam hukum acara telah pula dilakukan tandas Ketua MA RI. Adanya pandemi Covid-19 ini juga telah menjadi pemantik bagi Mahkamah Agung dalam menyusun payung hukum bagi proses persidangan secara elektronik atau e-Litigasi.

PERMA Nomor 1 tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elek tronik telah dikembangkan untuk perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara serta tata usaha militer. Bahkan khusus untuk persidangan secara daring dalam perkara pidana, pidana militer dan jinayat, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2021.

Pengadilan Negeri Yogyakarta berharap bahwa berbagai terobosan ini tidak hanya respon sesaat di masa pandemi namun juga diletakkan sebagai bukti kesiapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi informasi dan dalam rangka mewujudkan visi dan misi menjadi badan peradilan yang agung.

Rp. 53.800.000,00 dianggarkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 yang meliputi pelaksanaan rapid test dan swab test secara berkala, melakukan penyemprotan

desinfektan secara rutin, pengadaan hand sanitizer, pengadaan multivitamin, pengadaan masker, sarung tangan, dan berbagai hal lain terkait Covid-19.

Dengan adanya situasi tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta juga menyesuaikan postur anggaran kepada pencegahan pandemi Covid-19.

1. **Kesiapan Sumber Daya Manusia**

Pengadilan Negeri Yogyakarta membuat kebijakan pencegahan penyebaran COVID terkait SDM :

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA Nomor W13.U1/3394/SP/KPN/8/2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Tata Kerja Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait PPKM pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA bahwa terhitung tanggal 24 - 31 Agustus 2021, Hakim, Hakim Ad Hoc Tipikor, Hakim Ad Hoc PHI dan ASN menjalankan tugas kedinasan secara WFO dan WFH secara bergantian.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA Nomor W13.U1/3329/SP/KPN/8/2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Tata Kerja Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait PPKM pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA bahwa: Terhitung tanggal 17 - 24 Agustus 2021, Hakim, Hakim Ad Hoc Tipikor, Hakim Ad Hoc PHI dan ASN menjalankan tugas kedinasan secara WFO dan WFH secara bergantian
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA Nomor W13.U1/3284/SP/KPN/8/2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Tata Kerja Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait PPKM pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA bahwa Terhitung tanggal 10 - 16 Agustus 2021, Hakim, Hakim Ad Hoc Tipikor, Hakim Ad Hoc PHI dan ASN menjalankan tugas kedinasan secara WFO dan WFH secara bergantian
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA Nomor W13.U1/3200/SP/KPN/8/2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Tata Kerja Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait PPKM pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA bahwa: Terhitung tanggal 2 - 9 Agustus 2021, Hakim, Hakim Ad Hoc Tipikor, Hakim Ad Hoc PHI dan ASN menjalankan tugas kedinasan secara WFO dan WFH secara bergantian
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA Nomor W13.U1/3134/SP/KPN/7/2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Tata Kerja Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait PPKM Darurat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA bahwa: terhitung tanggal 26 Juli - 2 Agustus 2021, Hakim,

Hakim Ad Hoc Tipikor, Hakim Ad Hoc PHI dan ASN menjalankan tugas kedinasan secara WFO dan WFH secara bergantian

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA Nomor W13.U1/3044/SP/KPN/7/2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Tata Kerja Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait PPKM Darurat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA bahwa: terhitung tanggal 21 - 25 Juli 2021, Hakim, Hakim Ad Hoc Tipikor, Hakim Ad Hoc PHI dan ASN menjalankan tugas kedinasan secara WFO dan WFH secara bergantian
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA Nomor W13.U1/2846/SP/KPN/7/2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Tata Kerja Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait PPKM Darurat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA bahwa terhitung tanggal 6 - 20 Juli 2021, Hakim, Hakim Ad Hoc Tipikor, Hakim Ad Hoc PHI dan ASN menjalankan tugas kedinasan secara WFO dan WFH secara bergantian.

2. **Sarana dan Prasarana, meliputi Sarana dan Prasarana Preventif dan Pembiayaan**

Sarana dan prasarana preventif meliputi :

- Thermogun

Gambar 44 Thermogun

- Thermodetector

Gambar 45 Thermodetector

- Washtafel

Gambar 46 Washtafel

- Handsanitiser, ditempatkan disetiap ruang sidang dan pintu masuk gedung

Gambar 47 Handsitiser tiap ruang

- Droplet Protektor, ditempatkan disetiap area petugas PTSP, Ruang Sidang, Petugas Antrian sidang, petugas posbakum

Gambar 48 Droplet Protektor

- Masker
- Sarung Tangan
- Face shield

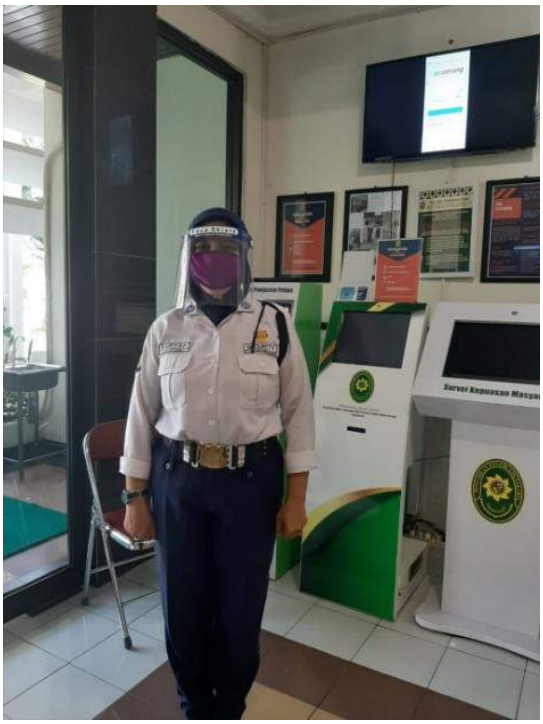

Gambar 49 Face shield

- Desinfektan

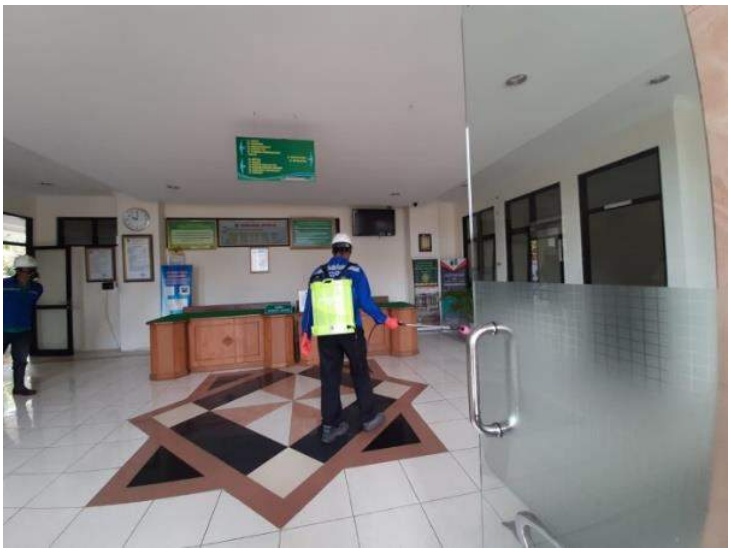

Gambar 50 Desinfektan

- Desinfektan Aerosol untuk berkas

Gambar 51Desinfektan Aerosol

- Multivitamin

Gambar 52 Multivitamin

- Sarana sidang online, Mediasi Online dan Rapat Online

Gambar 53 Sarana Sidang Online

Gambar 54 Sarana Sidang Online

Gambar 55 Mediasi Online

3. Tindakan Pencegahan

- Pembatasan Jam Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) selama masa pencegahan penyebaran corona virus Disease 2020 (Covid-19) pada Pegadilan Negeri Yogyakarta sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA

- Rapid Test / Swabtest

Gambar 56 Swab Test

Gambar 57 Swab Test

10 Desember 2021; Tepat Pukul 09.00 WIB berada di ruang Aula Pengadilan Negeri Yogyakarta dilaksanakanakan pemeriksaan Swab Test Antigen COVID -19 sebagai salah satu upaya untuk memutus penularan virus corana bagi seluruh pegawai di lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta. dan juga sebagai bentuk Screening awal dari potensi penyebaran virus COVID-19. Dalam pelaksanaan swab test antigen covid 19 ini Pengadilan Negeri Yogyakarta bekerja sama dengan Rumah Sakit UII Yogyakarta. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum. selalu mengingatkan kepada pegawainya agar tetap terus menjaga kesehatan dan tetap selalu fit dalam bekerja, apabila mengalami gejala sakit, beliau mengingatkan untuk langsung di periksakan ke pihak RS atau pos kesehatan.

- Vaksinasi

Gambar 58 Vaksinasi Bagi Pegawai

Gambar 59 Vaksinasi Bagi Pegawai

Gambar 60 Vaksinasi Bagi Pegawai

- Pembentukan Satuan Tugas Covid -19 yang bertugas dalam penanganan pencegahan dan penanggulangan penyebaran corona virus Disease 2020 (Covid-19) di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. Penanganan saat Bencana

- Penunjukkan Petugas Operator Website Informasi Sebaran Covid-19 di Lingkungan Peradilan pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogayakarta Kelas IA.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.

Dalam rangka mendukung administrasi perkara berbasis elektronik khususnya pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan E-Court serta E-Office, dukungan Teknologi Informasi mutlak dibutuhkan. Pembenahan dan peningkatan teknologi informasi merupakan salah satu prioritas demi terwujudnya keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi Pengadilan yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.

Keadaan perangkat teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 49 Keadaan Teknologi Informasi dan Pendukungnya Tahun 2021

No	Satuan Kerja	Keadaan Teknologi Informasi dan pendukungnya									
		Internet	Server	PC	Laptop	Printer	Acces s Point	Router	Switch Hub	Layar Informasi	KiosK
2	PN Yogyakarta	180 Mbps	3	72	51	42	16	2	16	5	5

Gambar 61 Server Pengadilan Negeri Yogyakarta

1. IMPLEMENTASI E-COURT

Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melaksanakan E-Court sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Secara garis besar, proses E-Court dimulai pendaftararan perkara *(e-filling)*, pembayaran elektronik *(e-payment)*, pemanggilan *(e-summons)* dan persidangan secara elektronik *(e-litigation).* Adapun implementasi E-Court pada Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Jumlah Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta
Yang Daftarkan Melalui e-Court Tahun 2021

Tabel 50 Jumlah Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta yang di Daftarkan Melalui e-Court

Jenis Perkara	Perkara Masuk	Putus	Sisa Perkara
Gugatan	168	103	65
Permohonan	334	316	18
Bantahan	5	4	1
Gugatan Sederhana	10	9	1
Jumlah	513	432	85

Kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain :

1. Sosialisasi *E-Court* dan E-Litigasi.
2. Menyediakan Pojok *E-Court / E-Court Corner.*
3. Melakukan pendampingan pendaftaran *E-Court.*
4. Monitoring dan evaluasi implementasi *E-Court.*

Bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melakukan rapat dan sosialisasi dengan para hakim, panitera pengganti, jurusita, jurusita pengganti dan Peradi mengenai Perma tersebut yaitu :

- **Rapat Hakim tentang Persidangan Elektronik**

  Selasa, 3 Maret 2021 telah dilaksanakan Rapat Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta di ruang Rapat Lantai 2 Pengadilan Negeri Yogyakarta. Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum. didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dr. Fahmiron, S.H.,M.Hum. Rapat dihadiri oleh seluruh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, baik Hakim Karir maupun Hakim Ad Hoc. Rapat Hakim ini membahas tentang Persidangan Elektronik di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Gambar 62 Rapat Persidang Elektronik

- **Rapat Tim IT dan Tim Creative**

Rabu, 10 Maret 2021 pukul 08.30 WIB telah diadakan Rapat Penggunaan dan Pelaksanaan Teknologi Informasi, Website, dan Media Sosial di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kegiatan dilakukan di Ruang Rapat Pengadilan Negeri Yogyakarta. Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum. didampingi Panitera, Sekretaris, Ketua Area II dan Ketua Are VI Zona Integritas beserta anggota dan juga didampingi oleh Tim Kreatif Pengadilan Negeri Yogyakarta.

-

Gambar 63 Rapat Tim IT

Gambar 64 Rapat Tim IT

- **Rapat Panitia Kegiatan Sosialisasi Gugatan Sederhana, e-Court dan e-litigasi**

Kamis, 25 Maret 2021 telah dilaksanakan Rapat Panitia Kegiatan Sosilasisasi Gugatan Sederhana, e-Court dan e-Litigasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Rapat diadakan pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Lantai 2 Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kegiatan dipimpin oleh Ketua Panitia yaitu Wiyanto, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pada Rapat ini membahas susunan acara untuk sosialisasi nanti, membahas konsumsi, dan membahas target atau tamu undangan untuk sosilasisasi ini.

Gambar 65 Rapat Panitia Sosialisasi Gugatan Sederhana

- **Sosialisasi e-Court, e-Litigasi dan Gugatan Sederhana sekaligus launching Aplikasi LIDYA**

Selasa, 6 April 2021, bertempat di aula Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah dilaksanakan Sosialisasi e-Court, e-Litigasi dan Gugatan Sederhana serta Launching Aplikasi LIDYA (Layanan Informasi Digital Pengadilan Negeri Yogyakarta). Acara dimulai pukul 09.00 WIB. Tamu undangan dalam acara ini : Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta, KPKNL Yogyakarta, BPN Kota Yogyakarta, DPD KAI Kota Yogyakarta, Perwakilan Bank Kota Yogyakarta, seperti BNI, BRI, BPD DIY dan Perwakilan dari Advokat seperti DPC Ikadin Kota Yogyakarta dan DPC Peradin Kota Yogyakarta

Gambar 66 Sosialisasi e-Court dan Gugatan Sederhana

Gambar 67 Sosialisasi e-Court dan Gugatan Sederhana

Gambar 68 Sosialisasi e-Court dan Gugatan Sederhana

- **Webinar Sosialisasi e-Court dan Gugatan Sederhana**

Gambar 69 Sosialisasi e-Court dan Gugatan Sederhana

Dalam rangka perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan yang beriringan dengan tuntutan perkembangan zaman serta teknologi modern, serta dalam rangka meningkatkan profesi Advokat yang professional dan berintegritas, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta bekerja sama dengan PERADI Kota Yogyakarta mengadakan acara “Webinar e-Court dan Gugatan Sederhana” pada hari Sabtu, 1 Mei 2021 pukul 09.00- 12.00 WIB kepada Advokat sebagai Penegak Hukum dan Pengguna Terdaftar dalam sistem e-Court dan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

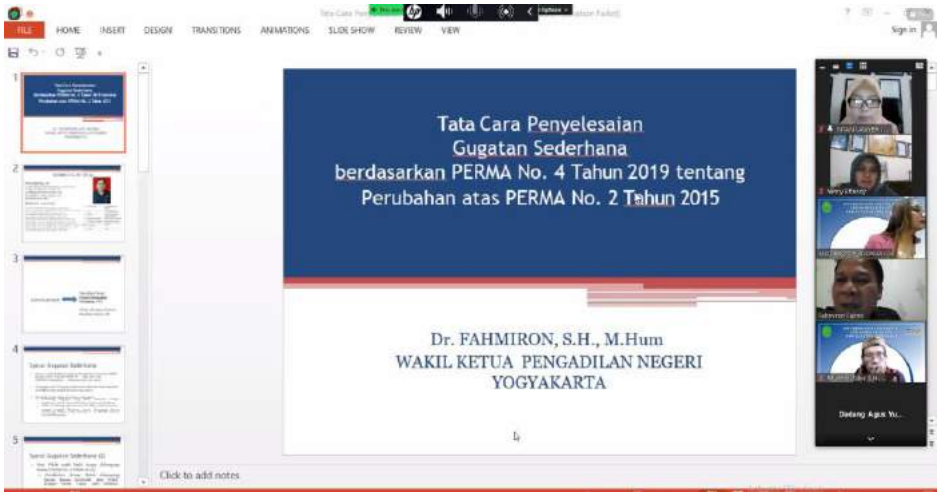

Gambar 70 Sosialisasi e-Court dan Gugatan Sederhana

Acara dibuka oleh Host Ibu Intan Nur Rahmawati, S.H, M.H, C.PL , CPCLE, CTA dan dimoderatori oleh Ibu Gloria Sidauruk, S.H., M.H. Welcome speech oleh Bp. Eriek Wahyu, S.H., MKn selaku Ketua OC Webinar, kemudian dilanjutkan sambutan oleh Bp. DR. Fahmiron, S.H, M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta. Beliau berharap, dengan adanya sosialisasi ini, prosentase penyelesaian perkara perdata secara e-Litigasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta semakin meningkat.

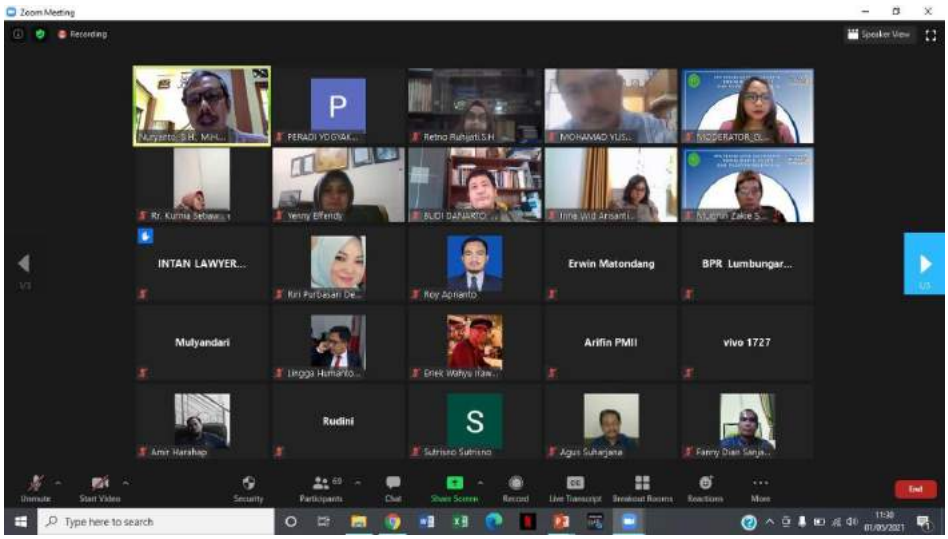

Gambar 71 Sosialisasi e-Court & Gugatan Sederhana

Pemaparan Materi Gugatan Sederhana disampaikan oleh Bp. DR. Fahmiron, S.H, M.Hum dan Materi e-Court beserta simulasi oleh Bp. Nuryanto, S.H., M.H dan Ibu Yenny Viky Effendy, ST, SH, M.Eng. Peserta seminar diikuti sebanyak 90 orang. Secara keseluruhan acara berlangsung lancar, tanpa menemui kendala yang berarti. Acara ditutup oleh Bp. Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Ketua DPC PERADI Kota Yogyakarta. Semoga kedepan dapat diadakan kembali acara yang sama dengan materi-materi yang berbeda.

Bahwa untuk mendukung pelaksanaan E-Court, telah disiapkan ***corner E Court*** untuk mendaftar perkara secara elektronik dengan disediakan ruangan sendiri dengan perlengkapannya.

Gambar 72 Halaman Login e-Court

Gambar 73 e-Court Corner Pengadilan Negeri Yogyakarta

Kendala yang dihadapi :

1. Jumlah sarana prasarana seperti laptop, scanner pada PTSP, *E-Court Corner* ataupun bagi Panitera Pengganti masih terbatas.
2. Masih kurangnya pemahaman Hakim maupun Panitera Pengganti tentang *E-Court.*
3. Sistem yang belum sempurna, masih banyak bugs sehingga mengganggu proses *E-Court* maupun E-Litigasi itu sendiri.
4. Terjadi Error ketika pencari keadilan memilih metode pembayaran melalui ATM Bank BRI.
5. Pengembalian sisa panjar kepada pihak tidak bisa dilakukan melalui *E-Court.*
6. Jurusita tidak dapat mengecek relas panggilan yang telah dikirimkan melalui *E-Court* apakah telah diterima pihak atau belum (tidak terdapat notifikasi).

Langkah Antisipasi Dan Penyelesaian :

1. Sosialisasi, Pendampingan dan Forum Group Diskusi pada internal setiap minggu bagi Hakim dan Panitera Pengganti.
2. Konsultasi dengan tim pengembang / development jika terdapat kendala pada system.
3. Pendampingan secara terus menerus kepada pengguna layanan.
4. Memilih pembayaran melalui Bank lain.
5. Untuk pengembalian sisa panjar perkara yang didaftarkan melalui e-court, tetap dilakukan secara manual.
6. Jurusita melakukan konfirmasi melalui Telepon/SMS/Whatsapp kepada pihak mengenai relas panggilan yang telah dikirmkan melalui E-Court.

2. IMPLEMENTASI SIPP DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

Manajemen administrasi perkara diinternal Pengadilan Negeri Yogyakarta dijalankan oleh seluruh kepaniteraan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA beserta Panitera Pengganti dengan dukungan dari bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan. Sampai saat ini Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA telah menerapkan SIPP versi 4.1.1 yang telah terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun Mahkamah Agung baik SIAP maupun Direktori Putusan MA. Data sudah termutakhirkan berdasarkan kondisi data perkara yang sebenarnya.

Dalam implementasi SIPP, diadakan pelatihan, evaluasi dan monitoring. Indikator kinerja, kepatuhan pemasukan (input) data, kelengkapan data dan validasi data adalah prasyarat mutlak dalam pengisian SIPP. Keempat indikator tersebut menjadikan implementasi SIPP tidak cukup sekedar mengejar warna hijau semata, terlebih dilakukan dengan cara-cara yang tidak semestinya.

SIPP dari waktu ke waktu terus mengalami pembenahan serta peningkatan fasilitas. Pengadilan Negei Yogyakarta telah menerapkan SIPP, dimana data perkara pada SIPP Tingkat Banding dan SIPP Pengadilan Negeri saling terkoneksi sehingga informasi perkara dapat diakses masyarakat cukup melalui SIPP Pengadilan Negeri, baik itu proses pada tingkat pertama maupun banding. Disamping itu, putusan yang di*upload* ke SIPP secara otomatis juga ter*upload* ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Secara rutin, database SIPP pada Pengadilan Negeri dilakukan sinkronisasi, baik ke Mahkamah Agung maupun website masing-masing Pengadilan Negeri. Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Yogyakarta menjadi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Pengadilan Negeri menggunakan SIPP versi 4.1.1

Alamat SIPP Web pada Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 51 Alamat SIPP Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta

No	Satker	Alamat SIPP
1	PN Yogyakarta	sipp.pn-yogyakota.go.id

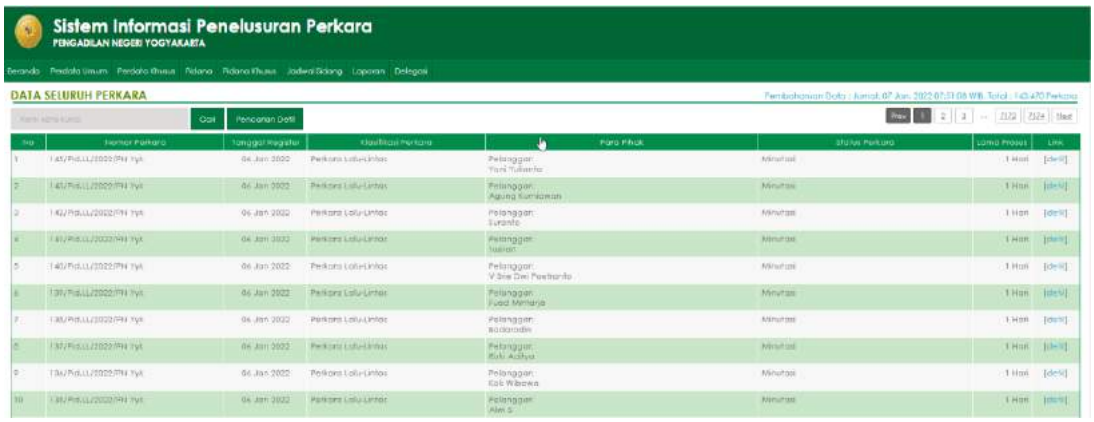

Gambar 74 SIPP Pengadilan Negeri Yogyakarta

Untuk mendorong terwujudnya Badan Peradilan yang Agung, Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA melakukan pembenahan Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu prioritas perubahan, yang diharapkan dapat memiliki Sistem informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu. Kebijakan yang diambil salah satunya adalah dengan pendampingan secara terus menerus baik dari tingkat supervisi, operator maupun user dalam implementasi dari masing - masing aplikasi dilakukan secara rutin. Sedangkan sarana dan prasaran IT :

- **26 Agustus 2021 : Delegasi pemeriksaan saksi via teleconference**

Kamis, 26 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB Pengadilan Negeri Yogyakarta memberikan bantuan Fasilitas Delegasi Pemeriksaan Saksi Via Teleconfrence atas Perkara yang diajukan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Perkara Nomor : 126/Pdt.G/2020/PN Lbp dengan Nomor Surat : W2.U4/14.209/ HK.02/ VIII/ 2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan agenda pemeriksaan saksi dari tergugat INTERVENSI-II / TERGUGAT I dan TERGUGAT INTERVENSI-VI /TERGUGAT V.

Gambar 75 Delegasi Pemeriksaan Saksi Via Teleconfrence

- **Delegasi Permohonan Pemeriksaan Saksi Ahli Teleconfrence**

Kamis 17 Desember 2021 pukul 09.00 WIB Pengadilan Negeri Yogyakarta mendapatkan permohonan Persidangan Delegasi bersama Pengadilan Negeri Banyuwangi sesuai dengan Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Banyuwangi Nomor: B/1952/HUK.1.1.1/XII/2021 Tanggal 15 Desember 2021. Adapun acara persidangannya adalah Pemeriksaan Saksi Ahli Hukum acara Pidana dengan Nomor Perkara 4/Pid Pra/2021/PN Byw. Karena terjadi berbagai kendala situasi yang mengakibatkan Ahli tersebut tidak dapat memberikan pendapatnya langsung di depan Persidangan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, maka diadakan Pemeriksaan Saksi Ahli tersebut secara teleconference di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Gambar 76Delegasi Pemeriksaan Saksi Ahli Via Teleconfrence

- **Pembuatan Video Mootcourt Disabilitas**

Gambar 77 Pembuatan Video Mootcourt Disabilitas

Gambar 78 Pembuatan Video Mootcourt Disabilitas

Jumat 4 Juni dan Senin 7 Juni 2021, Pengadilan Negeri Yogyakarta yang bekerja sama dengan Yayasan SAPDA tengah melakukan pengambilan video Mootcourt Disabilitas. Kegiatan ini dimulai dari pagi hingga menjelang petang, dengan melalui beberapa proses pengambilan video guna memperbagus video yang dihasilkan dengan arahan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Bapak Heri Kurniawan, S.H., M.H dan Bapak A. Suryo Hendratmoko, S.H, Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta Bapak Widodo Budi Santoso, S.H. dan juga tim dari SAPDA. Tempat pengambilan video dilakukan di Aula hingga ruang hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

- **Persidangan Delegasi Pengadilan Negeri Banyuwangi ke Pengadilan Negeri Yogyakarta**

Rabu 29 September 2021 telah dilaksanakan Sidang Delegasi hukum acara Pidana dalam sidang Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2021/PN.Byw sesuai dengan Surat Permohonan VENA NAFTALIA, S.H & Associates Nomor: 06/Pmh-Tele/VN-LF/IX/2021 tanggal 27 September 2021. Adapun agenda persidangan tersebut adalah pemersiksaan terhadap ahli hukum yang berada di Yogyakarta.

Dikarenakan adanya beberapa kendala situasi yang mengakibatkan Ahli tersebut tidak dapat memberikan pendapatnya langsung di depan Persidangan di Pengadilan Negeri Banyuwangi maka persidangan dilakukan dengan Persidangan elektronik sebagaimana Pasal 11 ayat 4 Perma No. 4 Tahun 2020 yang difasilitasi oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pada Persidangan tersebut menunjuk Bapak Nuryanto, S.H.,M.H sebagai Hakim dan Ibu Narti Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti.

-

Gambar 79 Delegasi Persidangan Pemeriksaan Saksi Ahli

3. WEBSITE PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

Website Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA dapat diakses di: http://pn-yogyakota.go.id

Website tersebut berisi profil, transparansi laporan, kegiatan, berita pengadilan, persyaratan, info perkara, putusan dan pengumuman Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA

Gambar 80 Website Pengadilan Negeri Yogyakarta

4. DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI untuk Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA dapat diakses di: http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta

Direktori Putusan merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengupload perkara yang menempuh upaya hukum baik banding, kasasi maupun PK dan perkara tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun setelah implementasi SIPP versi 3.2.0, data putusan merupakan hasil sinkronisasi dari SIPP pengadilan.

Rekapitulasi putusan yang diupload dalam Direktoru Putusan MA oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Tahun 2021 sebanyak 955 (Sembilan ratus lima puluh lima).

Gambar 81 Direktori Putusan MA

5. APLIKASI ERATERANG

ERATERANG atau elektronik surat keterangan merupakan produk aplikasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dan berlaku di semua Pengadilan Negeri / Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. Eraterang sebagai media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via HP/ Gawai dan Komputer/ PC).

Gambar 82 Eraterang Badilum

Jenis Surat Keterangan yang bisa dilayani melalui aplikasi Eraterang :

- Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit;
- Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana;
- Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya;
- Surat Keterangan di Pidana karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik;
- Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara.

Gambar 83 Langkah-langkah Mengajukan Surat Keterangan Elektronik

6. APLIKASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebuah instrumen Pengadilan Negeri sebagai bentuk kemudahan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kegiatan pendaftaran surat masuk dan keluar, buku tamu, permohonan surat keterangan, pemohonan penyitaan dan penggeledahan. Dimana staf pengadilan akan menghemat waktu dalam melakukan pembuatan dokumen atau pemberian informasi kepada masyarakat. Adapun ruang lingkup aplikasi PTSP :Register Surat

- Register Surat Keterangan
- Register Buku Tamu
- Register Penyitaan
- Register Penggeledahan

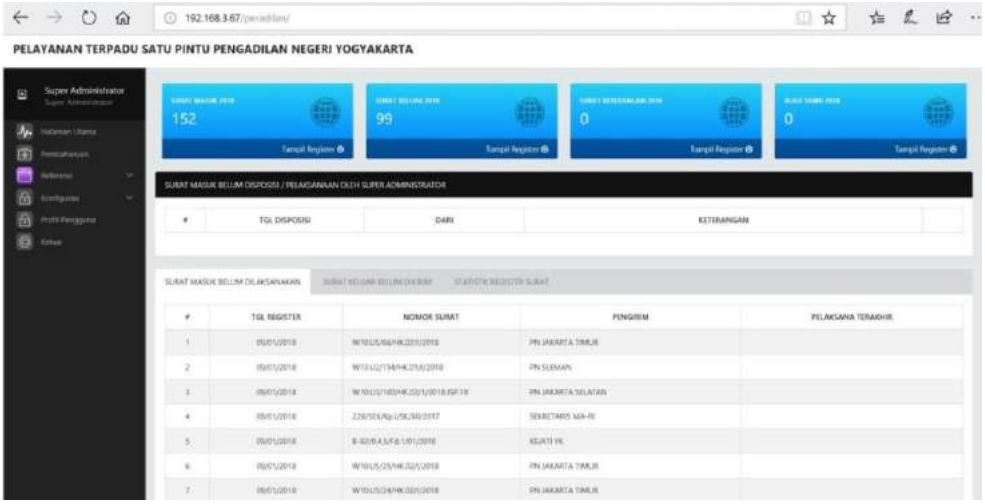

Gambar 84 Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7. APLIKASI ANTRIAN SIDANG

Antrian Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah layanan kepada Pencari Keadilan dimana Para Pihak yang berperkara akan dipanggil dan disebut nama pihak untuk memasuki ruang sidang dengan sistem yang sudah terkoneksi dengan Aplikasi Absensi Pihak (Roll Sidang) di Meja Informasi dan Terkoneksi dengan data perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Aplikasi ini berdasarkan kedatangan dan kelengkapan para pihak, yaitu dengan cara para pihak melaporkan kedatangan ke meja informasi. Para pihak yang sudah lengkap akan disidangkan terlebih dahulu, disamping itu masyarakat dapat mengetahui persidangan suatu perkara berkaitan dengan ruang sidang, status persidangan atau sudah selesai sidang.

Pemanggilan Pihak dapat dilakukan dengan menggunakan Personal Komputer, Laptop atau Handphone Android. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan adanya peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Gambar 85 Aplikasi Antrian Sidang

8. **APLIKASI ANTRIAN PELAYANAN / PTSP**

Antrian Pelayanan Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah layanan kepada Pencari Keadilan dimana pencari keadilan akan dipanggil sesuai dengan nomor urut antrian dengan sistem yang sudah terkoneksi dengan Aplikasi di Meja PTSP dan dan Media Informasi.

Gambar 86 Aplikasi Antrian PTSP

9. APLIKASI ESKUM

e-SKUM adalah Sistem Aplikasi Menghitung Sendiri Panjar Biaya Perkara yang dilakukan oleh Para Pencari Keadilan di Loby Utama dengan menggunakan alat e-SKUM.

Maksud dan Tujuan dalam penerapan Sistem Aplikasi e-SKUM adalah untuk memberikan pelayanan terbaik serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan akhir terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik di pengadilan agar pelayanan peradilan dapat terselenggara lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan.

Gambar 87 Aplikasi e-SKUM

10. **APLIKASI ATR**

Aplikasi Transkrip Persidangan (ATP) adalah sebuah inovasi aplikasi peradilan yang dibuat untuk merubah proses administratif peradilan dari konvensional menjadi berbasis teknologi informasi. Aplikasi ini digunakan untuk merekam suara pembicara dalam proses persidangan yang kemudian dikonversi dalam bentuk text didalam komputer dan dikemas menjadi sebuah trasnkrip persdiangan.

Gambar 88 Aplikasi ATR

11. APLIKASI MONITORING SIPP

Aplikasi Monitoring adalah sebuah aplikasi turunan dari SIPP yang digunakan untuk memonitoring dan evaluasi implementasi SIPP di pengadilan. Fitur-fitur aplikasi monitoring cukup membantu dalam evaluasi dan pengawasan internal, namun sangat perlu dikembangkan lagi sesuai kebutuhan terhadap informasi pengawasan SIPP.

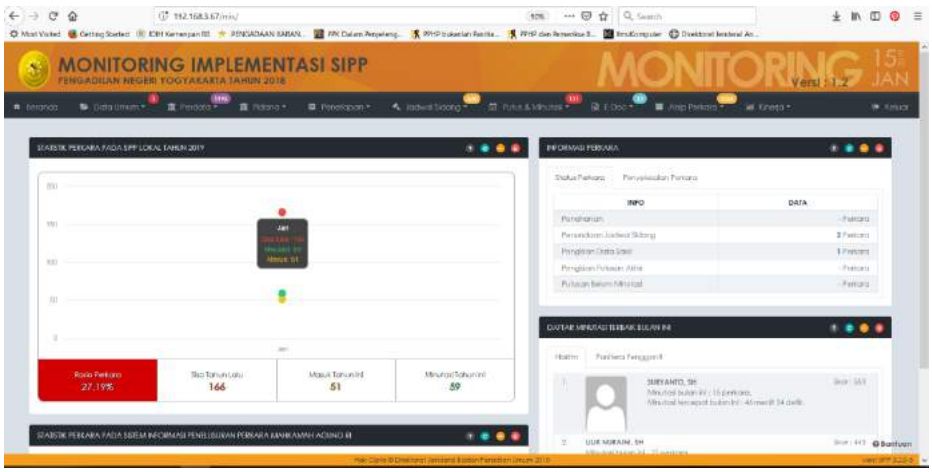

Gambar 89 Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP

12. **SMS GATEWAY MAHKAMAH AGUNG**

Merupakan aplikasi laporan keadaan perkara, laporan bantuan hukum dan pos bantuan hukum. Yang beranggung jawab terhadap isi data: Kepaniteraa Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan PHI dan Kepaiteraan Tipikor. Aplikasi tersebut dapat diakses di : http://sms.mahkamahagung.go.id/index.php/main/index/1

13. **AUDIO VISUAL PEREKAM SIDANG TIPIKOR**

Software perekam persidangan yang dapat digunakan mereview jalannya persidangan tipikor.

14. **KOMDANAS**

Merupakan aplikasi laporan kegiatan dan komunikasi data nasional bagian Kepegawaian, Keuangan dan Umum, Perencanaan, IT dan Pelaporan serta Kepaniteraan Peradata yang terintegrasi.

Aplikasi tersebut dapat diakses di http://komdanas.mahkamah agung.go.id

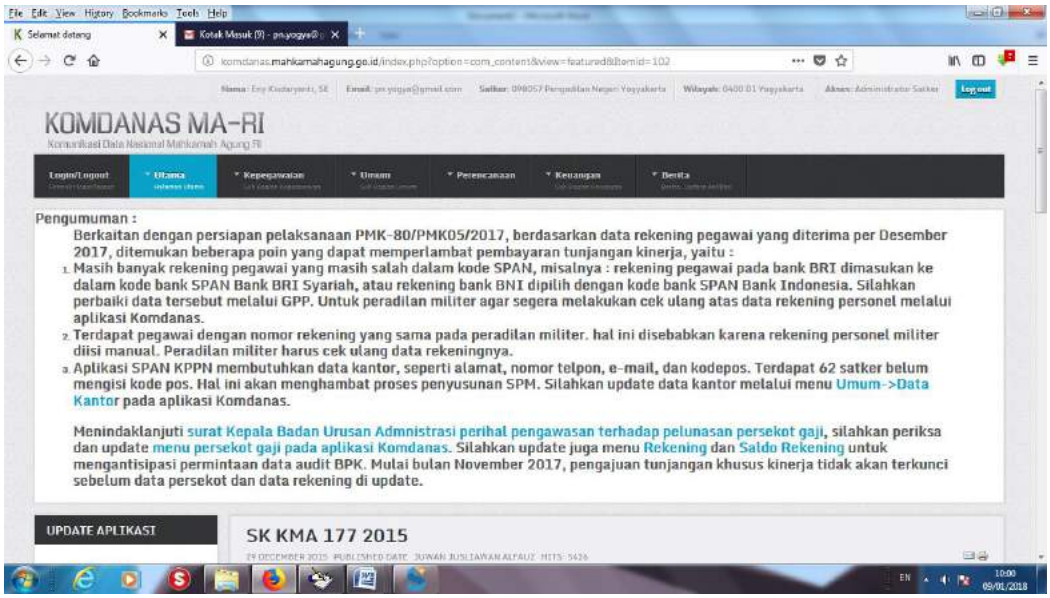

Gambar 90 Aplikasi Komdanas

14. APLIKASI SIKEP DAN APLIKASI KEPEGAWAIAN DARI BKN

Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI.

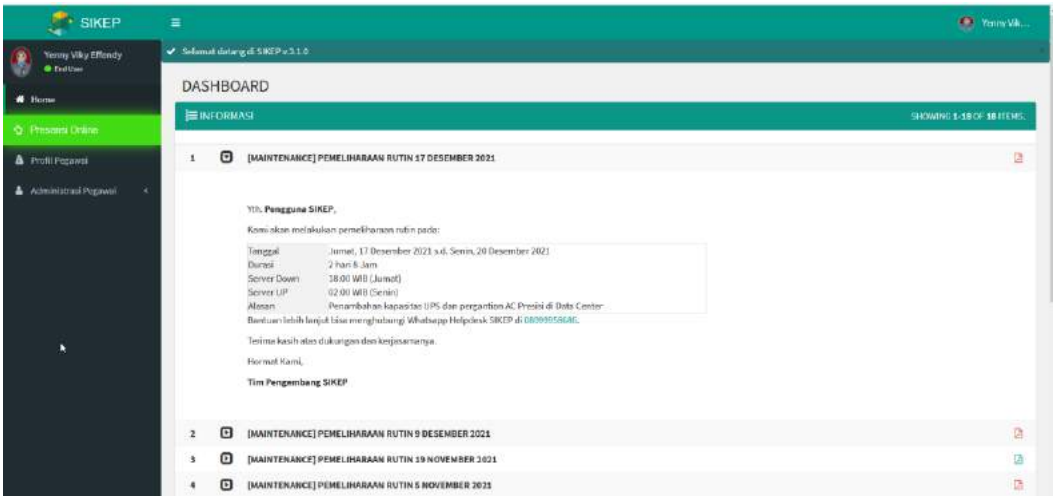

Gambar 91 Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung

15. SAKTI

Gambar 92 Aplikasi SAKTI Kementrian Keuangan

Aplikasi SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran

16. SMART

Sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran.

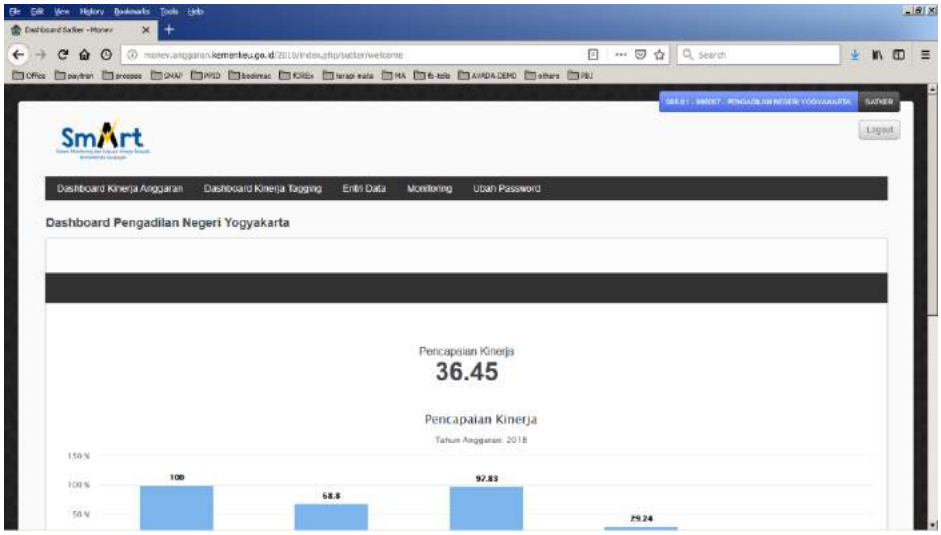

Gambar 93 Aplikasi SMART

17. MONEV BAPENAS

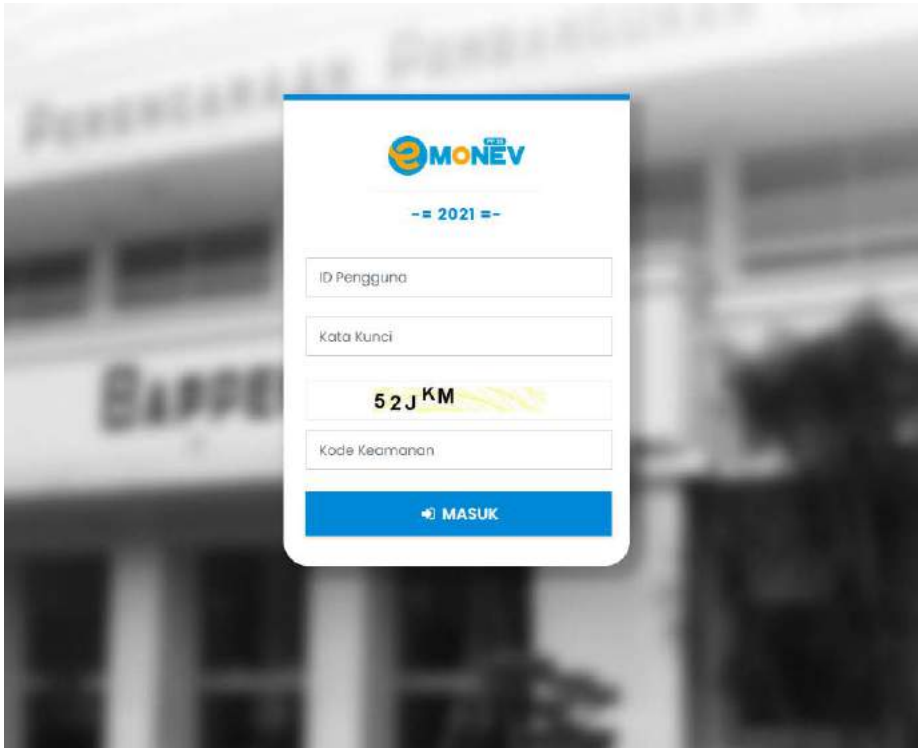

Gambar 94 Aplikasi e-Monev Bapenas

18. SIMARI

System Informasi Mahkamah Agung RI yang terintegrasi, baik dari system informasi perkara, system informasi keuangan dsb.

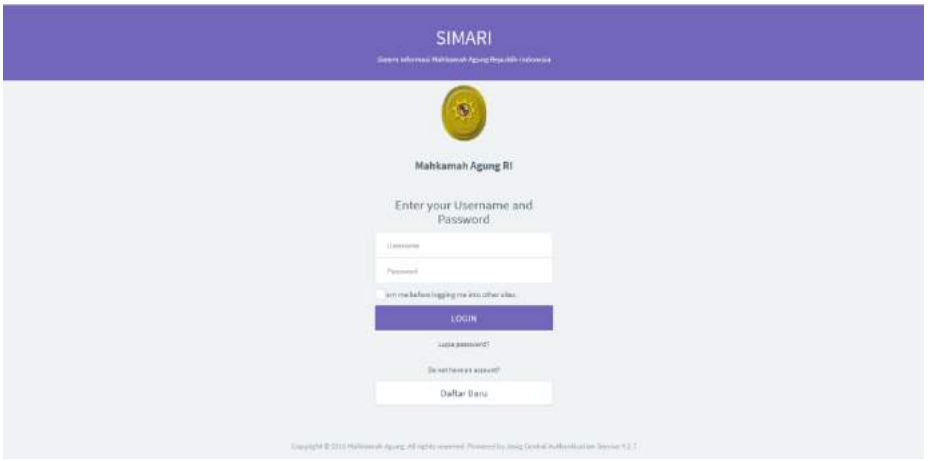

Gambar 95 Aplikasi SIMARI

19. SIMPONI

System informasi penerimaan negara bukan pajak secara on line.

Gambar 96 Aplikasi SIMPONI

20. OMSPAN

Aplikasi yang digunakan dalam rangka memantau transaksi dalam system perbendaharaan dan anggaran Negara (SPAN) yang menyajikan informasi sesuai kebutuhan / reporting.

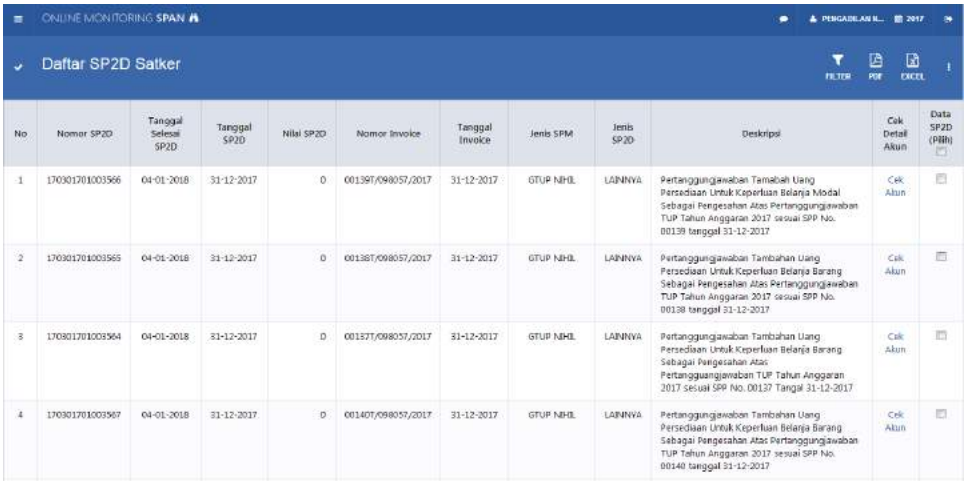

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Data SP2D (Pilih)
1	170301701003566	04-01-2018	31-12-2017	0	001397/098057/2017	31-12-2017	GTUP NIHIL	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Modal Sebagai Pengesahan Atas Pertanggungjawaban TUP Tahun Anggaran 2017 sesuai SPP No. 00139 tanggal 31-12-2017	Cek Akun	
2	170301701003565	04-01-2018	31-12-2017	0	001387/098057/2017	31-12-2017	GTUP NIHIL	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Sebagai Pengesahan Atas Pertanggungjawaban TUP Tahun Anggaran 2017 sesuai SPP No. 00138 tanggal 31-12-2017	Cek Akun	
3	170301701003564	04-01-2018	31-12-2017	0	001377/098057/2017	31-12-2017	GTUP NIHIL	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Sebagai Pengesahan Atas Pertangguangjawaban TUP Tahun Anggaran 2017 sesuai SPP No. 00137 Tangal 31-12-2017	Cek Akun	
4	170301701003567	04-01-2018	31-12-2017	0	001407/098057/2017	31-12-2017	GTUP NIHIL	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Sebagai Pengesahan Atas Pertanggungjawaban TUP Tahun Anggaran 2017 sesuai SPP No. 00140 tanggal 31-12-2017	Cek Akun	

Gambar 97 Aplikasi OMSPAN

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Dalam melaksanakakan tugas dan fungsinya Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adapun program-program yang telah dilaksanakan antara lain:

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Yogyakarta melakukan berbagai upaya demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya adalah mengikuti program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan peradilan Umum. Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian Court Performance Excellent/ICPE).

Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu: 1) Kepemimpinan (leadership); 2) Perencanaan Strategis (strategic planning); 3) Fokus Pelanggan (customer focus); 4) Sistem Dokumentasi (document system); 5) Manajemen Sumber Daya (resource management); 6) Manajemen Proses (process management); dan 7) Hasil Kinerja (performance results).

Pengadilan Negeri Yogyajarta pada tahun 2016 mendapatkan nilai A (Excellent) sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor : TAPM.007/QMR/SERTIFIKAT/09/2016

Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Umum ini dilakukan penilaian kembali setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tangal 29 Agustus 2016 sampai dengan 29 Agustus 2021 dengan rencana audit survellence pada :

Bulan Februari Tahun 2017

Bulan Agustus Tahun 2017

Bulan Februari Tahun 2018

Bulan Agustus Tahun 2018

Bulan Februari Tahun 2020

Bulan Agustus Tahun 2021

Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Umum

Pada Tanggal 13 Agustus 2021, Tim Asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum melakukan assesmen di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

B. REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia (aparatur).

Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA mengimplementasikan program Reformasi Birokrasi dan telah dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei tahun 2018 yang telah di Asesor oleh Tim Reformasi dari Mahkamah Agung RI dengan Capaian **85,12** (Delapan Puluh lima Koma Dua Belas) dengan nilai yang sangat baik.

C. ZONA INTEGRITAS

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional, sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi yaitu (1) Birokrasi yang Bersih dari KKN dan Akuntabel, (2) Birokrasi yang Efektif dan Efisien, (3) Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan salah satu *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut.

Pengadilan Negeri Yogyakarta mempunyai **komitmen** untuk mewujudkan **WBK/WBBM** melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam **hal pencegahan korupsi** dan **peningkatan kualitas pelayanan publik**.

Pengadilan Negeri Yogyakarta membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokasi secara baik sehingga mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja, dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik. Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Yogyakarta berkesempatan untuk mendapatkan predikat WBK. Sedangkan pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Yogyakarta belum berkesempatan untuk mendapatkan predikat WBBM, namun demikian, tidak berhenti disini, pembangunan dan pemeliharaan Zona Integritas menuju WBBM tetap kami lanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

D. PILOT PROJECT RAMAH KAUM RENTAN / DISABILITAS

Penerapan pengadilan inklusif, yaitu layanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Tujuan :

Menjamin kehormatan, perlindungan, pemberdayaan, penegakan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas / kaum rentan yang berhadapan hukum

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 476/SEK/OT.01.1/3/2020 11 Maret 2020
Hal : Pengusulan Unit Pelayanan Publik (UPP) dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Disabilitas

Yth. Deputi Pelayanan Publik
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dan surat Deputi Pelayanan Publik Nomor B/47/PP.05/2020 perihal Permohonan Pengusulan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Disabilitas, serta hasil analisis dan verifikasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. 2 (dua) satuan kerja sebagai Unit Pelayanan Publik (UPP) yaitu:
   1) Pengadilan Negeri Denpasar
   2) Pengadilan Agama Surabaya
2. 11 (sebelas) satuan kerja sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Disabilitas yaitu:
   1) Pengadilan Negeri Wonosari
   2) Pengadilan Negeri Mojokerto
   3) Pengadilan Negeri Watampone
   4) Pengadilan Negeri Yogyakarta
   5) Pengadilan Negeri Karanganyar
   6) Pengadilan Negeri Batam
   7) Pengadilan Agama Kab. Malang
   8) Pengadilan Agama Semarang
   9) Pengadilan Agama Bandung
   10) Pengadilan Agama Makassar
   11) Pengadilan Agama Medan

Demikian penyampaian dari kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI

A.M. Fauzan Hasyim

- ✓ Merupakan pilot project dari Kemenpan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Disabilitas sesuai dengan Surat Sekma No. 476/SEK/OT.01.1/3/2020 dan Surat Debuti Pelayanan Publik Nomor B/47/PP.05/2020 11 dari 910 pengadilan se indonesia
- ✓ Menjalin kerjasama MoU dengan pihak SADPA dalam rangka pendampingan disabilitas berhadapan hukum di dalam maupun di luar pengadilan dengan memberikan pendampingan psikososial dan proses pemulihan.

- ✓ Menjalin kerjasama dengan Pihak Pemerintah Kota Yogyakarta dengan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak yang berhadapan hukum.
- ✓ Menjalin Kerjasama dengan LSM Rifka Annisa berupa pendampingan psikososial dan atau bimbingan konseling terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum

Milestone Program Pengadilan
Menuju Pelayanan Pengadilan Inklusif

LANGKAH-LANGKAH YANG SUDAH DIAMBIL :

- ✓ Memberikan sosialisasi kepada para Hakim, Pegawai dan seluruh jajaran untuk dapat merubah ***mindset*** bahwa dalam pelayanan dan penanganan perempuan dan anak penyandang disabilitas harus didasarkan pada dasar hak asasi (***right based***) bukan atas dasar kasihan (***charity based***).
- ✓ Merubah perspektif bahwa penyandang difabel bukan lagi orang yang tidak dapat melakukan sesuatu seperti orang normal lainnya, melainkan orang yang dapat melakukan sesuatu dengan **kemampuan yang berbeda.**
- ✓ Sosialisasi kepada hakim dan pegawai mengenai pedoman mengadili perkara perempuan dan anak penyandang disabilitas.
- ✓ Memberikan sarana-prasarana yang akses dan ramah terhadap penyandang disabilitas.
- ✓ Mengidentifikasi adanya perlakuan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

- ✓ Perlakuan yang sama dalam system peradilan.
- ✓ Mengupayakan dan mengakomodasi keterangan penyandang difabel (tuna rungu) dengan menyediakan penerjemah tuna rungu

Kecamatan *Subdistrict*	Tunggal	Ganda	Multi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mantrijeron	200	11	0	211
Kraton	213	9	1	223
Mergangsan	132	8	1	141
Umbulharjo	522	31	2	555
Kotagede	266	10	1	277
Gondokusuman	275	2	0	277
Danurejan	123	23	2	148
Pakualaman	100	19	1	120
Gondomanan	226	6	0	232
Ngampilan	109	10	4	123
Wirobrajan	279	19	2	300
Gedongtengen	239	2	1	242
Jetis	300	21	2	323
Tegalrejo	291	12	2	305
Jumlah/Total	3275	183	19	3477

Catatan/Note : Pendataan dilakukan 2 (dua) tahun sekali.

Sumber: Dinas Sosial Kota Yogyakarta
Source: The Social Welfare Services of Yogyakarta Municipality

https://jogjakota.bps.go.id

SARANA – PRASARANA

- ✓ Desk Pelayanan PTSP yang dapat diakses dan dijangkau penyandang disabilitas.
- ✓ Loket khusus untuk Pengguna Layanan Disabilitas
- ✓ Form disabilitas Pelayanan PTSP untuk pengguna layanan, sehingga dapat diketahui sejak awal kebutuhan alat bantu dan perlakuan apa yang harus diterapkan
- ✓ Posisi prioritas untuk penyandang disabilitas di persidangan
- ✓ Priority Seat yang dapat diakses dan dijangkau penyandang disabilitas.
- ✓ Kursi Roda dan Tongkat di lobby PTSP / Drop In Gedung
- ✓ Toilet Khusus dapat diakses dan dijangkau penyandang disabilitas.
- ✓ Jalur akses masuk ke gedung dapat diakses dan dijangkau penyandang disabilitas
- ✓ Video / audio visual untuk sosialisasi yang diterjemahkan dengan bahasa isyarat
- ✓ Situs Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri
- ✓ SOP Penanganan Difabel

- ✓ *Sosialisasi* Penanganan Hukum Yang Ramah Dan Akses Bagi Perempuan Dan Anak Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum dengan Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Oktober 2021
- ✓ Konsultasi dan Pengumpulan Data dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan tanggal 17 Oktober 2021 di Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh utusan Debuti Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementrian Sekretariat Negara RI

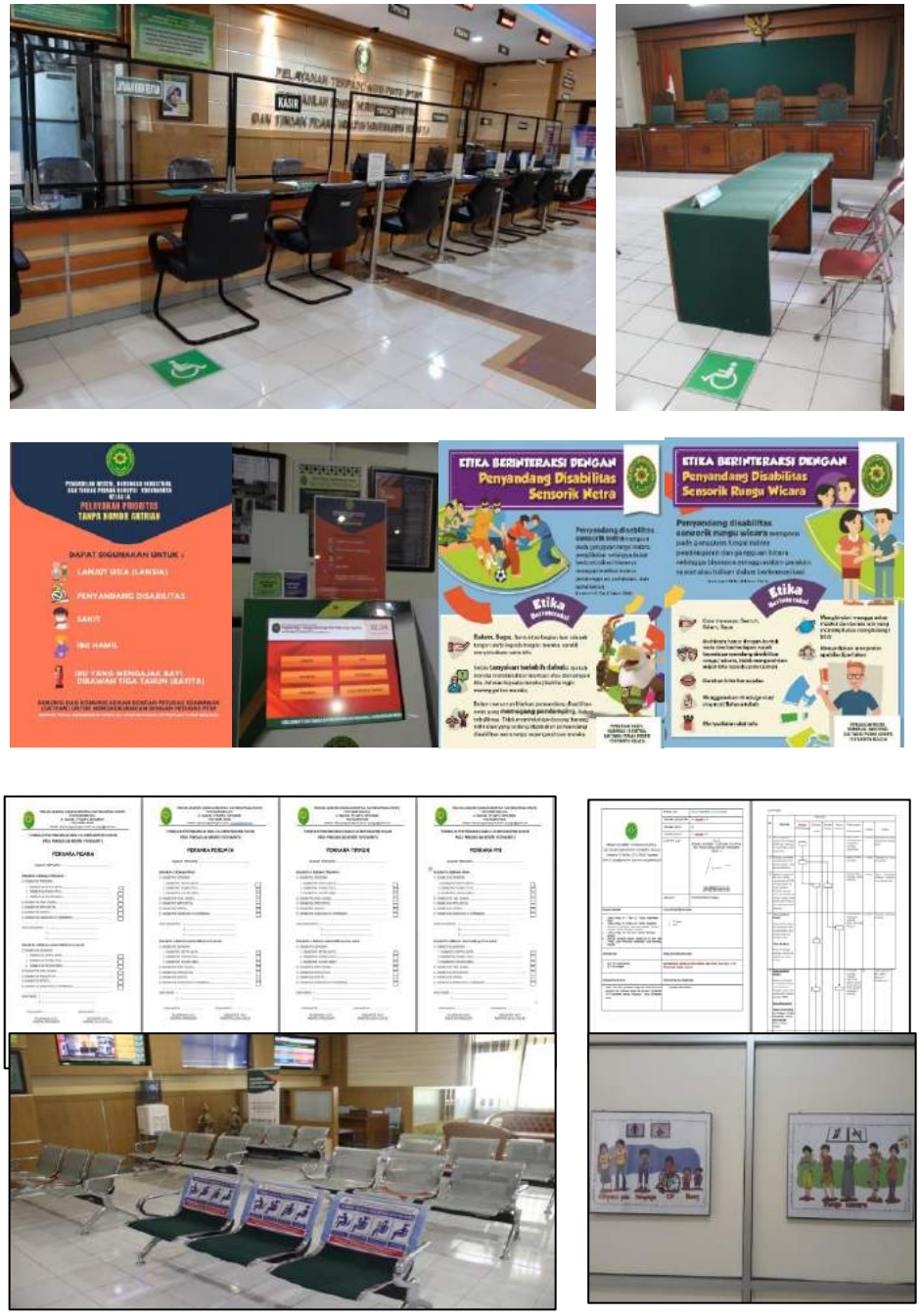

Gambar 98 Sarana Prasarana Disabilitas

Gambar 99 Sarana Prasarana Disabilitas

Gambar 100 Sarana Prasarana Disabilitas

E. EVALUASI PELAYANAN PUBLIK

Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Yogyakarta belum mendapat kesempatan untuk menjadi satker uji petik terhadap Evaluasi Pelayanan Publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Namun demikian, Pengadilan Negeri Yogyakarta berusaha untuk tetap melakukan perbaikan berkelanjutan. Selain itu, untuk menjamin terwujudnya harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik, berdasarkan amanat UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Kementerian PAN RB melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dilakukan untuk memberikan percontohan bagi unit penyelenggara pelayanan publik lainnya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Keenam aspek tersebut meliputi: Kebijakan pelayanan publik, Profesionalisme sumber daya manusia, Sarana dan prasarana, Sistem informasi pelayanan publik, Mekanisme konsultasi dan pengaduan, Inovasi pelayanan publik.

Indikator penilaian diperoleh dari persilangan antara aspek dan enam prinsip dalam melakukan evaluasi: Keadilan, pertisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdayaguna, dan aksesbilitas.

Pada aspek kebijakan pelayanan, penilaian akan melihat pada standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan survei kepuasan masyarakat. “Standar pelayanan yang disusun harus melibatkan masyarakat dan dipublikasikan.

F. POSBAKUM

Pos bantuan hukum adalah layanan yang dibentuk oleh setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap. Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Pengadilan harus menyediakan akses bagi terdakwa yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses layanan Posbakum Pengadilan.

Pos Layanan Hukum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Anggaran Posbakum Pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tertuang dalam DIPA No.005.03.099128/2021.

Dalam tahun 2021, alokasi angggaran yang tersedia sejumlah Rp. 48.000.000,00 dan telah terealisasi Rp. 48.000.000,00 terdapat 534 kegiatan dengan jenis pelayanan advice, konsultasi, pembuatan dokumen hukum.

Pelayanan dari Posbakum adalah sebagai berikut:

a. Melayani konsultasi hukum baik perkara pidana maupun perdata

b. Membantu pembuatan dokumen hukum

c. Memberikan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang Pengadilan Negeri

d. Memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan Negeri Masyarakat tidak mampu secara ekonomi hanya perlu menyiapkan salah satu dokumen sebagai berikut:

a. Surat Keterangan Tidak Mampu

b. Jamkesmas/KKM/Kartu Raskin/PKH

c. Dokumen lain yang terkait dengan keterangan tidak mampu.

G. INOVASI & KREATIVITAS PELAYANAN

I. INOVASI PROSES

1. PERUBAHAN DARI PELAYANAN SATU ATAP MENJADI PELAYANAN SATU PINTU

Untuk meningkatkan pelayanan yang prima, Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas I A telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatukan pelayanan yang tersebar dibeberapa kepaniteraan disatukan dalam satu pintu dan satu tempat mulai dari proses permohonan /pelimpahan perkara sampai terbitnya dokumen /selesainya proses (ONE STOP SERVICE). Pelayanan dilaksanakan dalam satu meja pelayanan baik itu untuk pelayanan teknis perkara maupun pelayanan umum. Wujud keseriusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang

lingkup PTSP di Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk: 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PTSP merupakan salah satu program dalam rangka peningkatan pelayanan public, memangkas birokrasi pelayanan dan sebagai upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik.

Jenis-jenis pelayanan :

Pelayanan Kepaniteraan Pidana
Pelayanan Kepaniteraan Perdata
Pelayanan Kepaniteraan Hukum
Pelayanan Surat Masuk (Bagian Umum)
Pelayanan Kepaniteraan PHI
Pelayanan Kepaniteraan Tipikor
Untuk mendukung terselenggaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA telah menerapkan aplikasi PTSP dari Dirjen Badilum, E-Skum, Kios-K SIPP, Antrian Sidang ElektroniK, Antrian PTSP, Aplikasi IKM serta media informasi dan sosialisasi.

- ✓ Reformasi Regulasi :

  Menyatukan pelayanan yang tersebar dibeberapa kepaniteraan disatukan dalam satu pintu dan satu tempat mulai dari proses permohonan /pelimpahan perkara sampai terbitnya dokumen /selesainya proses (ONE STOP SERVICE)
- ✓ Reformasi Birokrasi :

  Penyederhanaan prosedur pelayanan yang lebih efisien, efektif, murah, transparan, akuntabel, menghindari biaya tinggi (penghematan) dan penyelewengan.
- ✓ Reformasi Birokrasi -> Pelayanan Publik yang Prima
- ✓ Amanat Peraturan Perundang-undangan

✓ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program Dirjen Badan Peradilan Umum dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan dan sebagai upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik.

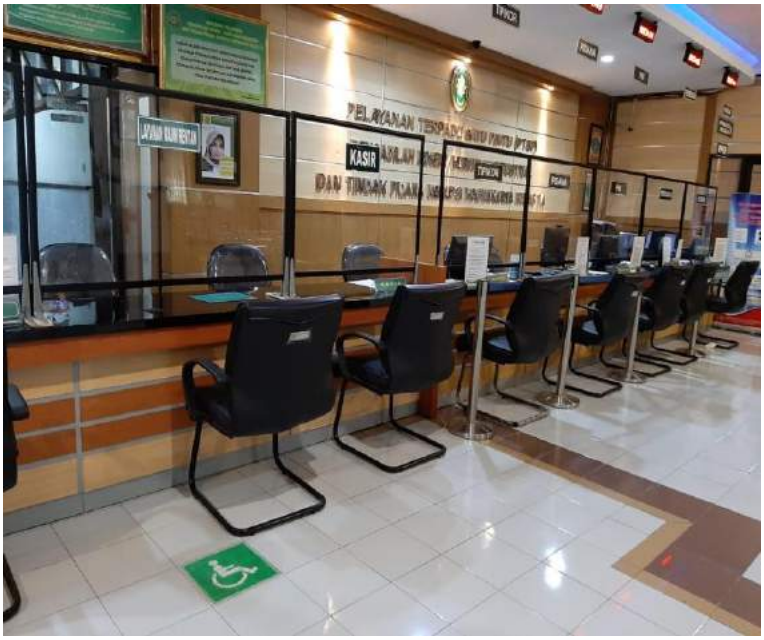

Gambar 101 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

2. PEMBENAHAN RUANGAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN NAMUN STERIL

Pemisahan ruang pelayanan administrasi (PTSP) dan ruang pelayanan persidangan, dimana telah disediakan ruang tunggu masing-masing sesuai dengan jenis layanannya.
Pengunjung sudah tidak bisa masuk ke ruangan masing-masing.

Gambar 102 Ruang Tamu Terbuka dan Doorlck Setiap Selasar Ruangan

3. SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

Implementasi SNI ISO 37001 : 2016 telah dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan penetapan Inpres No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang diikuti dengan adopsi ISO 37001 : 2016 menjadi SNI ISO 37001 : 2016 melalui Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional No.248/KEP/BSN/11/2016 pada bulan November 2016. SNI ISO 37001 dirancang bagi organisasi untuk menaati peraturan perundang-undangan serta memiliki kemampuan untuk mencegah (*prevent*), mendeteksi (*detect*), dan menangani (*respond*) terjadinya tindak pidana suap dengan berdasar pada 6 prinsip yaitu prosedur yang proporsional, komitmen pimpinan, manajemen risiko, uji kelayakan (*due diligence*), komunikasi yang efektif, serta monitoring dan review/evaluasi. Penerapan keenam prinsip tersebut dilakukan dalam sebuah proses yang disebut PDCA yaitu *Plan, Do, Check,* dan *Act*. SMAP mendasarkan pada 44 klausul yang menjadi kriteria SMAP yang mana dalam penerapannya di Pengadilan Negeri hanya dilakukan pada 43 klausul karena 1 klausul yaitu adanya organ lain di bawah Pengadilan Negeri tidak diterapkan dalam penilaian.

Pada tahapan penerapan SNI ISO 37001 dilakukan persiapan yang meliputi training dan gap analysis, pengembangan sistem yang meliputi pengembangan kebijakan dan pengembangan dokumentasi, implementasi yang meliputi sosialisasi dan implementasi sistem, review sistem yang meliputi audit internal, tinjauan manajemen, dan persiapan sertifikasi, serta Sertifikasi yang meliputi pemilihan lembaga sertifikasi, pelaksanaan audit, perbaikan hasil audit, dan keputusan sertifikasi. Pengadilan negeri yang diajukan sebagai *pilot project* saat itu diminta untuk melakukan *bribery assement* terhadap titik-titik rawan suap serta membuat program kerja untuk mengawasi titik-titik rawan suap tersebut. Dalam penerapannya, sistem yang telah ada dalam rangka melakukan pencegahan, pendeteksian, dan penindakan atas perilaku suap disinergikan dalam rangka pengendalian suap dan gratifikasi serta penanganan atas pelanggaran yang terjadi. Terhadap sistem yang telah terbangun dan mendapatkan akreditasi maka akan dilakuykan *surveillance* pada setiap 1 tahun dan jika ditemukan pelanggaran maka sertifikat SNI ISO 37001 : 2016 bisa dicabut.

4. KERJASAMA PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BERHADAPAN HUKUM DENGAN DINAS PMPPA (PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA)

- ✓ Kerjasama penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak berhadapan hukum.
- ✓ Mou antara Pemkot Yogyakarta, Peradi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditantadangani tanggal 29 Maret 2018.
- ✓ Pengadilan Negeri Yogyakarta mendukung terwujudnya Yogyakarta menjadi Kota Layak Anak.
- ✓ Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mempersiapkan sejumlah prasarana yang disiapkan seperti ruang sidang anak, ruang tahanan ramah anak, ruang anak tidak ditahan, ruang untuk anak sebagai korban, ruang tahanan untuk perempuan, ruang teleconfrence, ruang tunggu Bapas/Peksos, Pojok Baca, Klinik Kesehatan, Ruang Pengasuhan Anak dan lain-lain.
- ✓ Pemkot Yogyakarta memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak yang berhadapan hukum di Kota Yogyakarta.

5. KERJASAMA PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DENGAN LSM RIFKA ANNISA

- ✓ Kerjasama Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan LSM Rifka Annisa tertanggal 13 Maret 2018.
- ✓ Pendampingan psikologi anak yang berhadapan dengan hukum.
- ✓ Pendampingan psikososial dan atau bimbingan konseling terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum
- ✓ Pemberian layanan konseling laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari upaya menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis Gender.

6. PENANDATANGANAN MOU PENANGANAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KEPADA PEREMPUAN DAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- Kerjasama Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan LSM SAPDA sejak 12 Juli 2018.

- Pendampingan psikososial dan proses pemulihan perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- Asistensi dan dukungan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta menjadi pengadilan yang aksesibel terhadap kaum disabilitas
- Peningkatan sarana prasarana untuk kaum disabilitas.

7. PENANDATANGANAN MOU PENYULUHAN HUKUM MELALUI RADIO (ON-AIR)

- ✓ Kerjasama dengan Radio Retjo Buntung dalam penyuluhan hukum sejak 1 Agustus 2018
- ✓ Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat Kota Yogyakarta untuk memperoleh informasi masalah hukum dengan memberikan penyuluhan hukum melalui siaran radio.
- ✓ Kesepakatan bersama ini bermaksud untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk taat dan sadar kepada hukum yang berlaku di Indonesia serta sebagai sarana untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dibidang hukum.
- ✓ Untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dibidang hukum, Pengadilan Negeri Yogyakartan menyediakan narasumber untuk memberikan penyuluhan di bidang hukum.
- ✓ Pihak Radio Retjo Buntung memberikan waktu jam siaran secara langsung (on air) dengan durasi 1 (satu) jam setiap hari Kamis ke-1 pukul 09.00-10.00 WIB, serta akan dipertimbangkan untuk melakukan siaran satu bulan lebih dari satu kali dengan melihat situasi dan kondisi.

8. PEMBAYARAN PNBP FUNGSIONAL KERJA SAMA DENGAN PT POS INDONESIA

- Kerjasama dalam penerimaan layanan PNBP Fungsional pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak 1 Agustus 2018
- Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mendukung peningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pembayaran PNBP Fungsional serta demi terciptanya tertib administrasi pengelolaan PNBP Fungsional yang efektif dan efisien pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- Kesepakatan bersama ini ditujukan dalam rangka transparansi dan keterbukaan informasi terkait pengelolaan PNBP yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta;

- Pihak PT. Pos Indonesia memberikan dukungan dengan menempatkan pegawainya dan sarana yang diperlukan untuk memenuhi penerimaan PNBP Fungsional di kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta

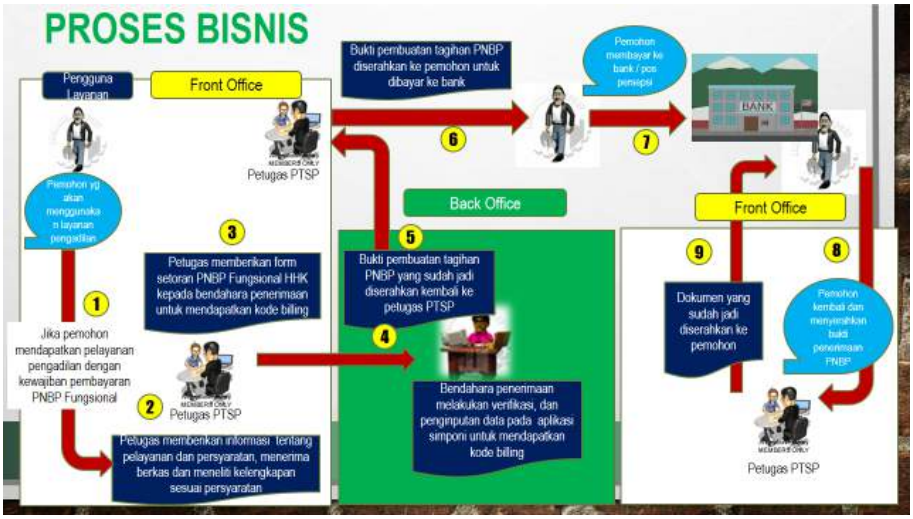

Gambar 103 Proses Bisnis Pos Extension

BENTUK KERJASAMA LAIN DENGAN KANTOR POS :

- ✓ **Nazegelen**, pematereian barang bukti, yang selama ini dilakukan di Kantor Pos Besar. Hal itu sangat memudahkan dan memepercepat para pihak dalam pelayanan.
- ✓ Pengiriman Wesel Delegasi Keluar, dimana sangat membantu sekali pihak koordinator delegasi dan JSP dalam mengurangi kegiatan keluar kantor.
- ✓ Mempercepat pengiriman surat keluar dan mengurangi korupsi waktu petugas kurir.

9. KERJASAMA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA

- Sebagai landasan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Kota Yogyakarta .
- Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya para pihak dalam meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap hukum.

- Mou antara Pemkot Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditantadangani tanggal 6 September 2018.
- Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kerjasama di bidang hukum, integrasi data dan pelayanan terpadu.
- Kerjasama ini merupakan dasar untuk dijadikan sebagai dasar hukum untuk perjanjian kerjasama dengan SKPD dilingkungan Pemkot Yogyakarta.

10. KERJASAMA PENINGKATAN PELAYANAN TERPADU IDENTITAS HUKUM BAGI MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA.

- Kesepakatan ini bermaksud untuk meningkatkan efektifitas, koordinasi dan kerjasama para pihak dalam pelayanan kepemilikan status hukum, kepemilikan hukum bagi masyarakat kota yogyakarta. Kesepakatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh status hukum dan identitas hukum secara mudah, cepat dan biaya ringan. Memudahkan masyarakat dalam memenuhi identitas hukum dalam melakukan perbuatan hukum di masyarakat dengan pelaksanaan pelayanan terpadu. Untuk mensinergikan program peran masing-masing pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan status hukum dan identitas hukum bagi masyarakat kota yogyakarta. Memudahkan pelaporan data perkara yang diputuskan / ditetapkan oleh pengadilan Negeri Yogyakarta ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta secara cepat dan akurat setelah mempunyai keuatan hukum tetap.
- Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 25 Oktober 2018.

11. KERJASAMA SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (SPPT)

- Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Rumah Tahanan Klas II Yogyakarta.
- Maksud dan tujuan kerjasama tersebut adalah :

- Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia para pihak dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- Optimalisasi fungsi koordinasi antara Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dan Rumah Tahanan Klas II Yogyakarta
- Menciptakan sistem peradilan pidana terpadu dalam memanfaatkan teknologi.

- Mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang berlaku.

- Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi kegiatan penyuluhan hukum, kerjasama di bidang hukum, pelayanan sidang terpadu dan sistem peradilan pidana terpadu agar masyarakat taat terhadap hukum yang berlaku.

12. PERJANJIAN KERJASAMA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAN DEWAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- ✓ Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta dan Dewan Pimpinan Cabang Kota Yogyakarta ditandatangani tanggal 29 Maret 2018
- ✓ Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama para pihak dalam melaksanakan program kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
- ✓ Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama para pihak dalam penyelenggaraan penangaanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindunagn anak yang berhadapan dengan hukum.
- ✓ Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kerjasama di bidang hukum, sosialisasi, pendidikan hukum dan pemberian bantuan hukum pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

13. KESEPAKATAN KERJASAMA KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA, KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B YOGYAKARTA, KEPALA RUMAH TAHANAN KELAS II A YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANAAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK / TELECONFRENCE

- Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Rumah Tahanan Klas II Yogyakarta, Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II B Yogyakarta tanggal 1 April 2020
- Maksud dan tujuan kerjasama tersebut adalah : untuk tetap terselenggaranya persidangan perkara pidana dan dalam rangka mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2020

(COVID-19) sesuai dengan peraturan perundangan-udangan yang berlaku yaitu dengan persidangan secara elektronik / teleconference.

- Optimalisasi fungsi koordinasi antara Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Rumah Tahanan Klas II Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B
- Menciptakan sistem peradilan pidana terpadu dalam memanfaatkan teknologi.
- Mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang berlaku.

14. KESEPAKATAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, DAN KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TERDAKWA DAN TERPIDANA TERKAIT DENGAN PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19

- ✓ Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 23 Juli 2020
- ✓ Maksud kerjasama tersebut adalah : melakukan sinergi dalam rangka pelayanan kesehatan dalam rangka mencegah penularan covid-19 kepada terdakwa dan terpidana. Tujuan kerjasama ini adalah melakukan pencegahan penyebaran covid-19 di Kota Yogyakarta.
- ✓ Rung lingkup : penataan mobilisasi terdakwa dan terpidana, penatalaksanaan pengamanan terdakwa dan terpidana, penyelenggaraan rapid diagnostic test (RDT), penyelenggaraan RT-PCR bagi terdakwa/terpidana reaktif, penyelenggaraaan isolasi bagi terpidana / terdakwa positif.

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA SEBAGAI PENGADILAN PENDIDIKAN

Pengadilan Pendidikan adalah pengadilan yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan masyarakat secara terpadu dalam bidang pendidikan semua disiplin ilmu, khususnya hukum / peradilan dan secara multiprofesi.

Latar belakang dibentuknya **:**

1. Kota Yogyakarta adalah kota pendidikan, sebagian besar penduduknya adalah pelajar dan mahasiswa
2. Banyaknya permohonan Informasi Akademis di Pengadilan Negeri Yogyakarta
3. Banyakanya praktik siding, dan magang di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Gambar 104 Milestone Pengadilan Pendidikan

Gambar 105 Rapat Koordinasi Dengan Dekan-Dekan Universitas

Rapat Koordinasi Dengan Dekan-Dekan Universitas Untuk Meningkatkan Pelayanan, Dalam Penyediaan Informasi Akademisi Dan Mendukung Pengadilan Negeri Yogyakarta Sebagai Pengadilan Pendidikan

15. **PERJANJIAN KERJASAMA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN (UAD) TENTANG PROGRAM KULIAH LAPANGAN (FIELD STUDY) DAN PENELITIAN MAHASISWA PADA LAYANAN PENGASUHAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

- ✓ Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditantadangani tanggal 14 Juli 2015.
- ✓ Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang Psikologi yaitu Penyelenggaraan Program Kuiah Lapangan dan Penelitian Mahasiswa pada Layanan Pengasuhan Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan (UAD), khususnya dalam pengembangan dan pelaksanaan Mata Kuliah Lapangan (*Field Study*).
- ✓ Para Pihak setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka Program Kuliah Lapangan dan Penelitian Mahasiswa Pada Layanan Pengasuhan Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta, khususnya pendampingan anak yang orangtuanya sedang beraktifitas ata berperkara (pengguna layanan) di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Mahasiswa melakukan praktik kuliah lapangan, penelitian atau melaksanakan pelayanan konsultansi dan pengasuhan anak pada layanan pengasuhan anak yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- ✓ Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing pihak, secara bersama-sama melaksanakan kerjasama ini, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak baik di tempat Pihak Kesatu maupun di tempat Pihak Kedua.

16. **KERJASAMA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN HUKUM DENGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

- ✓ Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditantadangani tanggal 27 September 2018.
- ✓ Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang kemahiran hukum kepada Fakulas Hukum Universitas Islam Indonesia, khususnya dalam pengembangan dan pelaksanaan Mata Kuliah Pemagangan.
- ✓ Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing pihak, secara bersama-sama melaksanakan pendidikan atau perkuliahan Mata Kuliah Pemagangan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak baik di tempat Pihak Kesatu maupun di tempat Pihak Kedua.

17. **PERJANJIAN KERJASAMA PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) DAN TUGAS AKHIR (TA) BAGI MAHASISWA AKADEMI AKUNTANSI YKPN YOGYAKARTA DENGAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

- ✓ Perjanjian Kerjasama Antara Akademi Akuntansi Ykpn Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditantadangani tanggal 30 Oktober 2020.
- ✓ Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang Ekonomi Akuntansi yaitu Penyelenggaraan Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) (*Field Study*).
- ✓ Para Pihak setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka Program Kerja Lapangan dan Penelitian Mahasiswa dan penyediaan infformasi tentang praktik akuntansi tertentu atau informasi yang berhubungan dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan perusahaan, yang menjadi peminatan bahan kajian mahasiswa dalam penulisan Tugas Akhir.
- ✓ Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing pihak, secara bersama-sama melaksanakan kerjasama ini, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak baik di tempat Pihak Kesatu maupun di tempat Pihak Kedua.

18. **KERJASAMA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT MAHASISWA.**

- ✓ Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditantadangani tanggal 15 Oktober 2020.
- ✓ Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya dalam pengembangan dan pelaksanaan Mata Kuliah Praktik Peradilan oleh mahasiswa termasuk didalamnya pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk kepentingan kerjasama tersebut.
- ✓ Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing pihak, secara bersama-sama melaksanakan pendidikan atau perkuliahan Mata Kuliah Monitoring Persidangan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak baik di tempat Pihak Kesatu maupun di tempat Pihak Kedua.

19. **KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN TENTANG KERJASAMA KEGIATAN DI BIDANG PENDIDIKAN.**

- ✓ Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditantadangani tanggal 25 November 2020
- ✓ Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang Hukum yaitu Penyelenggaraan Program Kuliah Praktik Peradilan / Persidangan kepada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD).
- ✓ Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing pihak, secara bersama-sama melaksanakan kerjasama ini, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak baik di tempat Pihak Kesatu maupun di tempat Pihak Kedua.

20. **PERJANJIAN KERJASAMA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANAAN MONITORING PERSIDANGAN.**

- ✓ Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditantadangani tanggal 15 Oktober 2020.
- ✓ Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang kemahiran hukum yaitu Monitoring Persidangan kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya dalam pengembangan dan pelaksanaan Mata Kuliah Praktik Peradilan.
- ✓ Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing pihak, secara bersama-sama melaksanakan pendidikan atau perkuliahan Mata Kuliah Monitoring Persidangan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak baik di tempat Pihak Kesatu maupun di tempat Pihak Kedua.

21. **PERJANJIAN KERJASAMA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GAJAH MADA YOGYAKARTA**

- ✓ Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditantadangani tanggal 5 September 2020.

- ✓ Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang kemahiran hukum yaitu Pendidikan, penelitian dan Magang kepada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- ✓ Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing pihak, secara bersama-sama melaksanakan pendidikan atau perkuliahan Mata Kuliah Monitoring Persidangan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak baik di tempat Pihak Kesatu maupun di tempat Pihak Kedua.

22. **PERJANJIAN DENGAN LAPAS**

Jumat, 26 Februari 2021 pukul 16.00 WIB, Pengadilan Negeri Yogyakarta mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan Rumah Tahanan Negara Kelas II A Yogyakarta. Kegiatan dilakukan di Ruang Rapat Lantai 2 Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peningkatan sinergitas antar Instansi Penegak Hukum dalam hal ini dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan Rumah Tahanan Negera Kelas II A Yogyakarta , sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Gambar 106 Perjanjian Kerjasama dengan LAPAS Kelas II A Yogyakarta

23. **KERJASAMA DENGAN UNIVERSITAS ATMAJAYA**

Gambar 107 Perjanjian Kerjasama Dengan Universitas Atmajaya

Kamis 10 Juni 2021, bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Negeri Yogyakarta telah dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Kegiatan yang dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum ini merupakan perpanjangan nota kesepakatan yang telah ada sebelumnya. Salah satu poin yang ada didalam kesepakatan tersebut adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa Atma Jaya selama menjalani proses magang di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

II. INOVASI PELAYANAN

1. MEMBUAT STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Berbicara tentang pelayanan publik, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik yang memiliki 4 tujuan, yakni memberikan batasan dan hubungan yang jelas terkait hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik yang berasaskan pemerintahan dan korporasi yang baik, terpenuhinya pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan meberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelayanan publik. Lebih rinci lagi, Undang-Undang tersebut mengatur hak dan kewajiban baik penyelenggara maupun pengguna pelayanan publik. Setidaknya ada 12 kewajiban penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan.

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik tentunya memberikan arahan kepada seluruh penyelenggara pelayanan baik penyelenggara negara, BUMN, BUMD, BHMN hingga swasta maupun persorangan menyelenggaran pelayanan yang terstandarisasi dengan memenuhi komponen standar pelayanan.

Setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memenuhi 14 komponen standar pelayanan yang meliputi : 1) dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan; 2) persyaratan, syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun admnistratif; 3) sistem, mekanisme dan prosedur, tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan; 4) jangka waktu penyelesaian, jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaiakan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan; 5) biaya/tarif, ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat; 6) produk pelayanan,

hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 7) sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas bagi kelompok rentan; 8) kompetensi pelaksana, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman; 9) pengawasan internal, pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana; 10) penanganan pengaduan, saran, dan masukan, tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya; 11) jumlah pelaksana, tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja; 12) jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; 13) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan; dan 14) evaluasi kinerja pelaksanan, penilaian untuk mengetahuai seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai standar pelayanan.

Saat ini Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mempunyai standart pelayanan, namun sedang direview disesuaikan dengan pemenuhan 14 komponen tersebut dan disesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ada.

Gambar 108 Standar Pelayanan Publik

2. COWORKING SPACE DAN MEDIA CENTER PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Fasilitas ruang publik yang dapat dipergunakan untuk bekerja oleh mereka yang berkunjung ke pengadilan tersebut, dimana terdapat beberapa meja dan kursi layaknya di sebuah café. Fasilitas yang disediakan berupa stopkontak untuk mengisi daya listrik ke laptop maupun telepon genggam, free wifi. Di pojok kiri ruangan terdapat pajangan berbagai plakat yang diraih PN Yogyakarta terutama berkaitan dengan pencegahan korupsi dan gratifikasi. Sementara di sebelah kanannya terdapat kantin kejujuran / *honesty coffeeshop* dengan menu teh dan kopi lengkap dengan persediaan air panas, sehingga yang ingin bekerja sambil menikmati minuman hangat tinggal membeli dan menyeduhnya langsung di tempat.

Perkembangan peradilan yang mengarah kepada sistem peradilan elektronik. Meski telah disediakan pojok *e-court* (*e-court corner*), para advokat masih mungkin untuk berfikir menyelesaikan pekerjaannya terkait *e-court* di pengadilan.

Ruangan tersebut akan menjadi fasilitas lain untuk mendukung terlaksananya sistem peradilan elektronik dengan lebih baik. Jika *e-court corner* dimaksudkan untuk melayani pengguna terdaftar dan pengguna lain yang baru mendaftar, fasilitas ini justeru untuk selama proses persidangan secara elektronik.

Ruangan Multifungsi

Ruangan tersebut bukan hanya untuk bekerja para mitra pengadilan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai media center dan ruang pertemuan. Bilamana terdapat perkara-perkara yang menarik perhatian publik, bagian Humas Pengadilan akan mempersiapkan *press release* dan memberikan keterangan pers di ruangan tersebut. Hal tersebut akan terasa lebih baik ketimbang para awak media mendapatkan informasi di sembarang tempat atau dari sumber-sumber yang tidak jelas.

Dan jika ada mahasiswa yang melakukan penelitian atau membutuhkan penjelasan secara klasikal, ruangan tersebut dapat dimanfaatkan, karena Yogyakarta adalah kota pendidikan, banyak mahasiswa yang datang untuk observasi maupun penelitian. Mahasiswa atau peneliti dapat menggunakan fasilitas ini untuk mengerjakan tugas-tugasnya tanpa harus membuang-buang waktu ke tempat lain.

Infografis Co-working space

Gambar 109 Kapas-10 Coworking Space

MEDIA CENTER UNTUK PERSS CONFERENCE

Gambar 110 Infografis Co-Working Space

3. PENGUATAN ANTI KORUPSI DAN ANTI SUAP DENGAN HIMBAUAN

Gambar 111 Penguatan Anti Korupsi dan Anti Suap

4. PHOTOBOTH

Gambar 112 Photoboth

Photoboth untuk masyarakat / pengguna layanan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah disediakan meskipun sederhana dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, dan menampilkan pencapaian-pencapaian yang telah diraih Pengadilan Negeri Yogyakarta beserta piagam / komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta

Photoboth dibuat dengan maksud agar mendekatkan pengadilan dengan masyarakat. Pengadilan tidak lagi menjadi tempat orang bermasalah, “serem & ngeri” tetapi kebih “hommyy”.

II. INOVASI SISTEM

Pembenahan dan Penyempurnaan Teknologi Informatika

1. ANTRIAN SIDANG dan ANTRIAN PTSP

Gambar 113 Antrian Sidang

Antrian Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah layanan kepada Pencari Keadilan dimana Para Pihak yang berperkara akan dipanggil dan disebut nama pihak untuk memasuki ruang sidang dengan sistem yang sudah terkoneksi dengan Aplikasi Absensi Pihak (Roll Sidang) di Meja Informasi dan Terkoneksi dengan data perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Aplikasi ini berdasarkan kedatangan dan kelengkapan para pihak, yaitu dengan cara para pihak melaporkan kedatangan ke meja informasi. Para pihak yang sudah lengkap akan disidangkan terlebih dahulu, disamping itu masyarakat dapat mengetahui persidangan suatu perkara berkaitan dengan ruang sidang, status persidangan atau sudah selesai sidang.

Pemanggilan Pihak dapat dilakukan dengan menggunakan Personal Komputer, Laptop atau Handphone Android. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan adanya peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Gambar 114 Antrian PTSP

2. APLIKASI TRANSKRIP PERSIDANGAN

Aplikasi Transkrip Persidangan (ATP) adalah sebuah inovasi aplikasi peradilan yang dibuat untuk merubah proses administratif peradilan dari konvensional menjadi berbasis teknologi informasi.

Cara kerja ATP (Aplikasi Transkrip Persidangan) yaitu pengenalan suara pembicara dan dikonversi dalam bentuk text didalam komputer

Terdiri dari beberapa panel yang ditampilkan, dan pembicara dalam ruang sidang dapat berbicara bersamaan sekaligus.

Gambar 115 Aplikasi Transkrip Persidangan

3. E-SKUM

e-SKUM adalah Sistem Aplikasi Menghitung Sendiri Panjar Biaya Perkara yang dilakukan oleh Para Pencari Keadilan di Loby Utama dengan menggunakan alat e-SKUM.

Maksud dan Tujuan dalam penerapan Sistem Aplikasi e-SKUM adalah untuk memberikan pelayanan terbaik serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan akhir terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik di pengadilan agar pelayanan peradilan dapat terselenggara lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan.

Gambar 116 e-SKUM

4. E-COURT & ERATERANG CORNER

Gambar 117 e-Court & eraterang Corner

\

5. VOICE WARNING SYSTEM (SMAP)

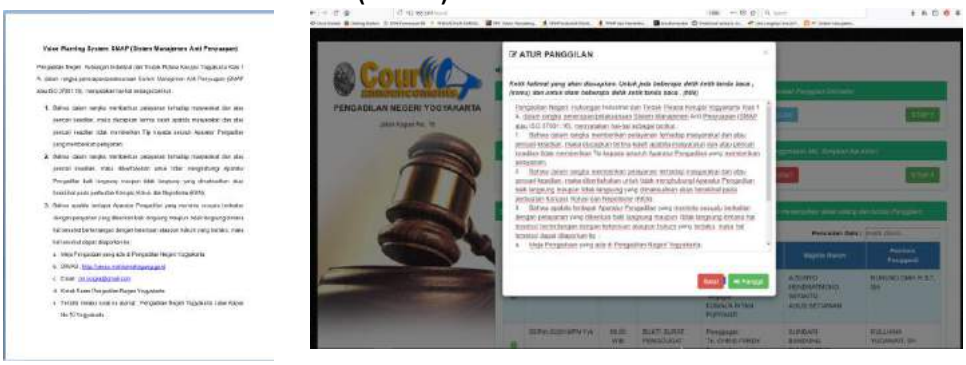

Gambar 118 Voice Warning System

Voice Warning System SMAP(Sistem Manajemen Anti Penyuapan) diumumkan 1 jam sekali secara rutin di hari kerja.

6. AUDIO GRATIFIKASI

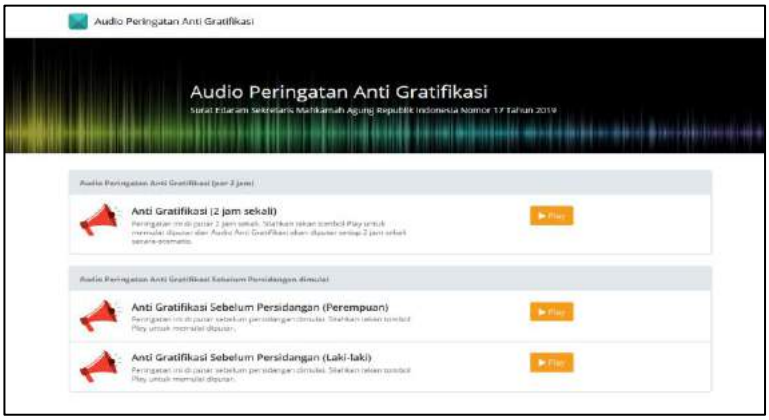

Gambar 119 Audio Gratifikasi

Audio Peringatan Anti Gratifikasi diumumkan 2 jam sekali secara rutin di hari kerja.

7. JOGJA SMART SERVICE

Integrasi Aplikasi Layanan Pengadilan pada Aplikasi Jogja Smart Services (JSS), kerjasama dengan Diskominfo Kota Yogyakarta

Aplikasi JSS adalah jalur tambahan untuk menginformasikan dan memberikan pelaporan kejadian kedaruratan diluar jalur pelaporan konvensional (melalui telepon). Daftar layanan Pemerintah Kota yang dapat diakses langsung oleh masyarakat dengan mengedepankan pelayanan mandiri (Swalayan) dengan Single Sign On (SSO)

Gambar 120 Jogja Smart Service

8. MEDIA INFORMASI DIGITAL

Gambar 121 Media Informasi Digital

Informasi baik berupa prosedur layanan, standart pelayanan, persyaratan, video sosialisasi dan sebagainya disajikan dengan digital dan dapat diakses dengan QR Code baik pada lingkungan pengadilan maupun pada website.

9. WEBSITE AKSESIBLE BUAT PENYANDANG DISABILITAS

Situs Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri

Gambar 122 Website Aksesible untuk Penyandang Disabilitas

10. E-PERMOHONAN INFORMASI AKADEMISI

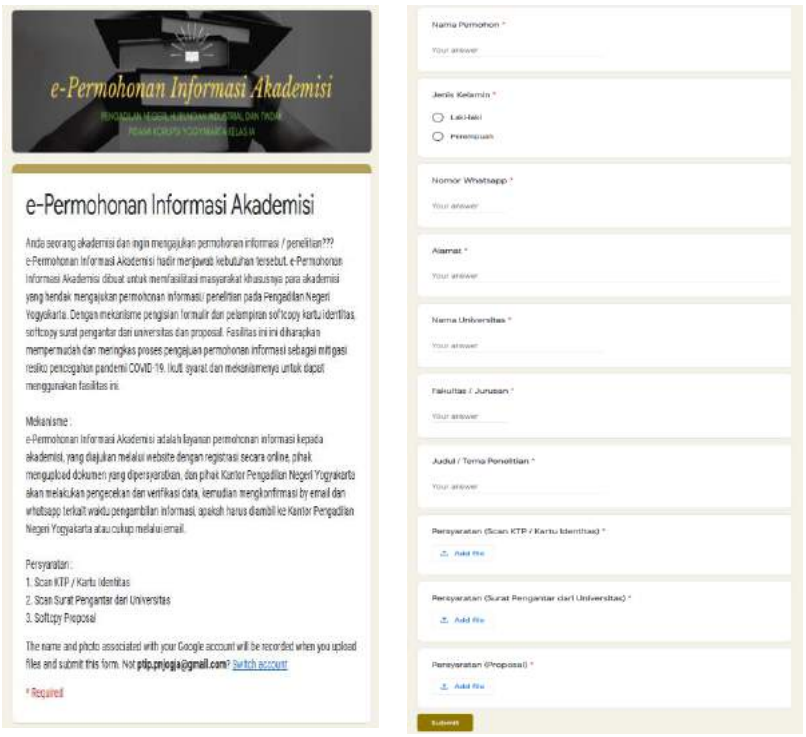

Gambar 123 e-Permohonan Informasi Akademisi

e-Permohonan Informasi Akademisi dibuat untuk memfasilitasi masyarakat khususnya para akademisi yang hendak mengajukan permohonan informasi/ penelitian pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dengan mekanisme pengisian formulir dan pelampiran softcopy kartu identitas, softcopy surat pengantar dari universitas dan proposal. Fasilitas ini diharapkan mempermudah dan meringkas proses pengajuan permohonan informasi sebagai mitigasi resiko pencegahan pandemi COVID-19.

Mekanisme : e-Permohonan Informasi Akademisi adalah layanan permohonan informasi kepada akademisi, yang diajukan melalui website dengan registrasi secara online, pihak mengupload dokumen yang dipersyaratkan, dan pihak Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta akan melakukan pengecekan dan verifikasi data, kemudian mengkonfirmasi by email dan whatsapp terkait waktu pengambilan informasi, apakah harus diambil ke Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta atau cukup melalui email.

Persyaratan :

1. Scan KTP / Kartu Identitas
2. Scan Surat Pengantar dari Universitas
3. Softcpy Proposal

11. E-PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

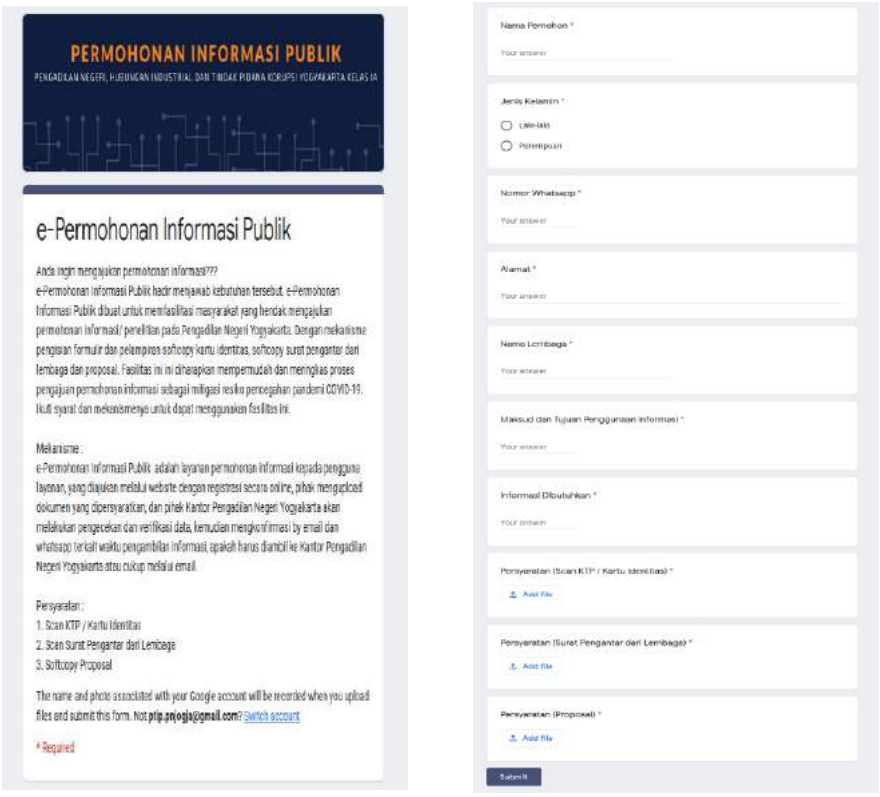

Gambar 124 e-Permohonan Informasi Publik

- ✓ e-Permohonan Informasi Publik hadir menjawab kebutuhan permohonan informasi. e-Permohonan Informasi Publik dibuat untuk memfasilitasi masyarakat yang hendak mengajukan permohonan informasi/ penelitian pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dengan mekanisme pengisian formulir dan pelampiran softcopy kartu identitas, softcopy surat pengantar dari lembaga dan proposal. Fasilitas ini ini diharapkan mempermudah dan meringkas proses pengajuan permohonan informasi sebagai mitigasi resiko pencegahan pandemi COVID-19.
- ✓ Mekanisme :

  e-Permohonan Informasi Publik adalah layanan permohonan informasi kepada pengguna layanan, yang diajukan melalui website dengan registrasi secara online, pihak mengupload dokumen yang dipersyaratkan, dan pihak Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta akan melakukan pengecekan dan verifikasi data, kemudian mengkonfirmasi by email dan whatsapp terkait waktu pengambilan informasi, apakah harus diambil ke Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta atau cukup melalui email.

  Persyaratan :

  1. Scan KTP / Kartu Identitas
  2. Scan Surat Pengantar dari Lembaga
  3. Softcopy Proposal

12. E-POSBAKUM

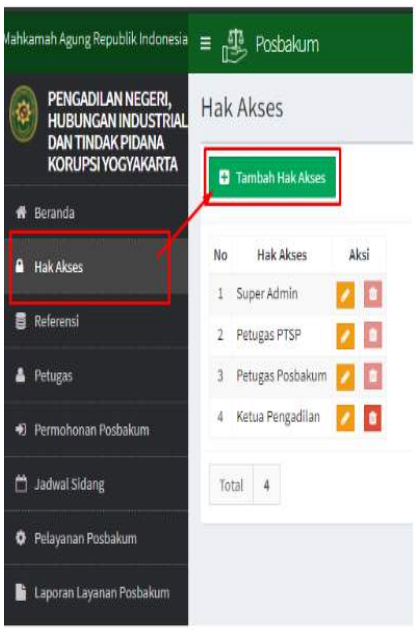

Gambar 125 e-Posbakum

E-Posbakum adalah aplikasi yang digunakan untuk adminitrasi layanan Posbakum yang selama ini masih dilaksanakan secara manual.

Administrasi ini ditujukan untuk memonitoring pelaksanaan posbakum, baik dari jenis layanan, advise yang diberikan maupun jumlah pengguna layanan.

Dengan e-Posbakum ini diharapkan Panmud Hukum, Panitera, Kasub PTIP, PPK, Sekretaris maupun Ketua Pengadilan dapat memonitoring pelaksanaan Posbakum.

Adapun manfaat dari aplikasi ini adalah :

1. Bagi Panmud Hukum dan Kasub PTIP : Memudahkan dalam pelaporan.
2. Bagi PPK : monev realisasi anggaran posbakum
3. Bagi Sekretaris : monev realisasi anggaran posbakum
4. Bagi Panitera : monev pelaksanaan bantuan hukum kepada pengguna layanan agar tepat sasaran
5. Bagi Ketua : monev pelaksaaan bantuan hukum dan realisasi anggaran agar tepat sasaran

13. LIDYA

Asisten virtual, tidak berbentuk secara fisik, namun dia bisa berinteraksi layaknya manusia melalui percakapan pada aplikasi Whatsapp setiap hari selama 24 jam dan bebas biaya.

Merupakan engine/bot yang bekerja layaknya humas, terintegrasi dengan beberapa sistem terkait sehingga dapat memberikan segala kebutuhan informasi dan layanan yang berhubungan dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Simpel, Mudah & Responsif.

Gambar 126 Layanan Informasi DIgital Pengadilan Negeri Yogyakarta

G. PERMOHONAN INFORMASI

Disamping pelayanan utama penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Yogyakarta juga melayani permohonan informasi dari masyarakat. Adapun rekapitulasi permohona informasi sebagai berikut:

Tabel 52 Permohonan Informasi

No	Jenis Informasi	Jumlah
1	Informasi Perkara dan Putusan Perkara Minutasi	226
2	Informasi Perkara dan Putusan Perkara Pidana	612
3	Informasi Perkara dan Putusan Perkara PHI	146 (G), 20 (K)
4	Informasi Perkara dan Putusan Perkara Perdata	480 (G), 51 (B), 24 (K)
5	Informasi Kepegawaian	2
6	Informasi Pengawasan Dan Disiplin	2
7	Informasi Anggaran dan Aset	2
8	Informasi Eraterang (lain-lain)	131
9	Surat Keterangan Inkract (lain-lain)	6
10	Surat Keterangan Penelitian (lain-lain)	17
11	Informasi PTIP (lain-lain)	9

H. SIDANG TELECONFERENCE

Tabel 53 Sidang Teleconference

NO	KLASIFIKASI	Jumlah
1	Jumlah Perkara Pidana Biasa Masuk	407
2	Jumlah Perkara Pidana Biasa Putus	368
3	Jumlah Perkara Pidana Biasa yang disidangkan secara teleconference	388

I. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Yogyakarta selama Tahun 2021 : 3.94 dengan jumlah responden 551 orang dan Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi selama Tahun 2021 : 3.94 dengan jumlah responden sebanyak 595 orang.

BAB IV

PENGAWASAN

A. PENGAWASAN INTERNAL

Dalam hal Pengawasan, Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA pelaksanaan pengawasan melekat telah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris. Untuk Hakim-Hakim pelaksanaan pengawasan melekat ada pada Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA, sedangkan pada Kepaniteraan, pejabat struktural maupun tenaga fungsional lainnya dilakukan oleh Panitera untuk Kepaniteraan dan Sekretaris untuk Kesekretariatan.

Sedangkan untuk Pengawas bidang telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang. Hakim Pengawas Bidang ini membuat laporan pengawasan setiap bulan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

Untuk Pengawasan Keuangan sesuai dengan pedoman pengawasan telah dilakukan pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan pemeriksaan atas laporan realisasi APBN dan Neraca.

Adapun selama Periode bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021, di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA telah dilakukan Pengawasan dan Pembinaan oleh Tim:

1. Pemeriksaan Reguler dari Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 30 April – 3 Mei 2021
2. Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tanggal 4 Maret 2021
3. Audit Internal Akreditasi Penjaminan Mutu dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan oleh Tim Audit Internal 9 Maret 2021, 5 Agustus 2021
4. Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang 6 September 2021

B. EVALUASI INTERNAL

Pada umumnya pengawasan di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA telah berjalan dengan baik, karena Pengawasan melekat telah berjalan dan dilaksanakan oleh Pimpinan dan pejabat yang bertanggung jawab.

Untuk Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang telah berjalan dengan baik, karena Pengawas Bidang telah menjalankan tugasnya untuk memberikan pengawasan dan arahan –arahan untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas selanjutnya membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA setiap satu bulan sekali.

Selain Pengawasan Internal, terdapat evaluasi dari Internal antara lain:

1. **Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara keseluruhan melalui Rapat Bulanan :**

   - 25 Februari 2021 Rapat Rutin Bulan Februari
   - 25 Maret 2021 Rapat Rutin Bulan Maret
   - 25 Mei 2021 Rapat Rutin Bulan Mei
   - 30 Juni 2021, Rapat Rutin Bulan Juni
   - 26 Juli 2021, Rapat Rutin Bulan Juli
   - 10 Agutus 2021, Rapat Rutin Bulan Agustus
   - 9 September 2021, Rapat Rutin Bulan September
   - 14 Oktober 2021, Rapat Rutin Bulan Oktober
   - 22 November 2021, Rapat Rutin Bulan November
   - 27 Desember 2021, Rapat Rutin Bulan Desember

2. **Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyelesaian Perkara** yang dilaksanakan setiap hari melalui Aplikasi Monitroing dan Evaluasi Kinerja (MIS) oleh Pimpinan secara berjenjang.
   - 19 Oktober 2021 : Rapat koordinasi teknis penyelesaian pelaksaaan delegasi dan rogatory pengadilan negeri Yogyakarta
3. **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Akreditasi Penjaminan Mutu, Zona Integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)**
   - 25 Januari 2021 : Monitoring Program APM, Zona Integritas dan SMAP
   - 1 Februari 2021 : Monitoring Progrram APM, Zona Integritas dan SMAP
   - 1 Maret 2021 : Rapat Pleno Pengesahan Rencana Aksi / Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
   - 9-16 Maret 2021 : Audit Internal APM dan SMAP
   - 31 Maret 2021 : Rapat Tinjauan Manajemen
   - 2 Juni 2021 : Rapat Koordinasi Pemenuhan Dokumen Zona Integritas

- 23 Juni 2021 : Rapat Tindak Lanjut Hasil Audit Internal dan persiapan surveillance APM
- 28 Juli 2021 : Rapat ZI, APM dan SMAP Pengadilan Negeri Yogyakarta
- 05 Agustus 2021 : Opening Meeting Audit Internal Pengadilan Negeri Yogyakarta
- 16 Agustus 2021 : Rapat Tindak Lanjut Hasil Surveilance Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum
- 23 Agustus 2021 : Rapat Tindak Lanjut Hasil Surveilance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Bidang Kepaniteraan
- 23 Agustus 2021 : Rapat Tindak Lanjut Hasil Surveilance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Bidang Kesekretariatan
- 30 Agustus 2021 : Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
- 6 September 2021 : Rapat Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021
- 14 - 17 September 2021 : Audit Internal SMAP 2021
- 16 September 2021 : Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Internal SMAP
- 21 September 2021 : Rapat Tinjauan Manajemen Akreditasi Penjamian Mutu (APM) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
- 30 September 2021 : Rapat Koordinasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Pengadilan Negeri Yogyakarta
- 01 Oktober 2021 : Rapat Persiapan Surveilance Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
- 31 Desember 2021 : Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program APM, ZI dan SMAP

4. **Monitoring dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah**
   - 1 Maret 2021 : Raoat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
   - 3 Agustus 2021 : Rapat Koordinasi E-SAKIP
5. **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum** pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diselenggarakan pada :
   - 23 April 2021 : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum
   - 17 Mei 2021 : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum
   - 20 Mei 2021 : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum
   - 28 Mei 2021 : Pembinaan dan evaluasi Posbakum
   - 1 Desember 2021 : Monitoring dan Evaluasi Pos Bantuan Hukum
6. **Monitoring dan Evaluasi PTSP**
   - 28 Mei 2021 : Monitoring dan Evaluasi PTSP
   - 4 Juni 2021 : Rapat Koordinasi Persiapan Lomba PTSP
   - 26 November 2021 : Monitoring dan Evalusi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
7. **Monitoring dan Evaluasi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat maupun Survei Persepsi Anti Korups**i pada tanggal 14 Juli 2021 yang menganalisis 3 (tiga) nilai terendah berikut tindak lanjutnya.
8. **Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP)**
   - 22 Februari 2021 : Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

- 3 Maret 2021 : Rapat Tim Kreative
- 3 Maret 2021 : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaran Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)
- 10 Maret 2021 : Rapat Penggunaan dan Pelaksanaan Teknologi Informasi, website dan Media Sosial
- 24 Mei 2021 : Rapat Koordinasi Penilaian Keterbukaan Informasi Publik
- 24 Mei 2021 : Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik
- 28 Mei 2021 : Rapat Pemulihan Database SIPP MA -RI
- 08 November 2021 : Rapat Kegiatan Koordinasi Teknis Pelaksanaan SPPT-TI Pengadilan Negeri Yogyakarta
- 11 November 2021 : Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan SPPT -TI Pengadilan Negeri Yogyakarta
- 10 Desember 2021 : Rapat pembahasan pencapaian EIS menuju e- register pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

9. **Monitoring Kedisiplinan Pegawai:**
   - 19 Mei 2021 : Monev Kedisiplinan Hakim
   - 20 Mei 2021 : Monev Kedisiplinan Kepaniteraan
   - 21 Mei 2021 : Monev Kedisiplinan Kesekretariatan
   - 22 Juli 2021 : Rapat Sosialisasi Peremajaan Data Pegawai pada SIKEP,SAPK BKN dan SITARA TAPERA
   - 30 Agustus 2021 : Rapat Monitoring dan Evaluasi Tugas Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta
   - 1 Oktober 2021 : Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada MA dan badan peradilan di bawahnya
   - 4 Oktober 2021 : Monev dan sosialisasi Perma 7,8,9 Tahun 2016, pedoman perilaku hakim, panitera, panitera pengganti, jurusita dan penerapan SMAP
   - 23 Desember 2021 : Pembinaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
10. **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran**
   - 24 Februari 2021 : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
   - 22 Maret 2021 : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
   - 8 Juni 2021 : Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal 2021
   - 26 Agustus 2021 : Rapat Evaluasi Anggaran DIPA Triwulan ke III
   - 28 September 2021 : Rapat Anggaran dan Program DIPA 03 Pengadilan Negeri Yogyakarta
   - 12 Oktober 2021 : Rapat Evaluasi dan Realisasi Anggaran Triwulan ke 3 dan Rapat Pelaksanaan atas anggaran pada DIPA 03 Dirjen Badilum
   - 30 November 2021 : Rapat Monitoring dan Evaluasi Realisasi DIPA 2021

11. **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Eksekusi**
    - 22 Januari 2021 : Monitoring dan Evaluasi Pelakasanaan Eksekusi
    - 28 Januari 2021 : Monitoring dan Evaluasi Pekasanaan Eksekusi
    - 7 Mei 2021 : Monitoring dan Evaluasi Pekasanaan Eksekusi
    - 13 Oktober 2021 : Monitoring dan Evaluasi Pekasanaan Eksekusi
    - 18 Oktober 2021 : Rapat Persiapan Penyelesaian Permasalahan Eksekusi dan Relaas Panggilan
    - 22 Desember 2021 : Rapat Pembahasan Eksekusi, Delegasi dan Penyelesaian Panjar Biaya Perkara
12. **Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Covid-19**
- 19 Juli 2021 : Rapat Satgas Pencegahan Penyebaran Covid
- 23 Juli 2021 : Rapat Tim Satgas Covid-19
- 5 Agustus 2021 : Rapat Koordinasi Pencegahan, Penularan dan Penanganan Covid-19
- 28 September 2021 : Rapat Satgas Covid-19 Pengadilan Negeri Yogyakarta
13. **Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerjasama (MoU) Program Magang Mahasiswa** dan Stakeholder tanggal 29 Desember 2021 sebagai salah satu bentuk perwujudan Pengadilan Pendidikan

C. EVALUASI EKSTERNAL

1. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 26 Februari 2021
2. Evaluasi Penilaian PTSP oleh Tim Penilai dari Badan Peradilan Umum tanggal 13 Agustus 2021
3. Surveilance Akreditasi Penjaminan Mutu oleh TAPM Badilum MA RI tanggal 13 Agustus 2021
4. Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
5. Monitoring dan Evaluasi Kompetensi SDM oleh Biro Kepegawaian MA RI tanggal 10 – 18 November 2021
6. Monitoring dan Evaluasi Program Pengadilan Ramah Kaum Rentan / Disabilitas
- 8 Maret 2021 : Rapat Koordinasi Peradilan Semu (Moot Court) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bagi Penyandang Disabilitas
7. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kemudahan Berusaha dari Bappenas tanggal 16 November 2021
8. Monitoring dan Evaluasi oleh Satuan Tugas Pungli dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pelaksananan keseluruhan program Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2021, maka dapat disimpulkan :

1. Secara umum seluruh program dan kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat beberapa hambatan.
2. Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan baik antara pegawai, pejabat struktural, pejabat teknis belum optimal sehingga masih banyak kekurangan baik dalam pengelolaan sarana prasarana, anggaran, penyelesaian perkara maupun pelayanan publik.
3. Program-program yang sudah ada telah dipelihara dan ditingkatkan dengan pengembangan program-program yang baru yang mendukung peningkatan pelayanan publik.
4. Konsistensi pelaksanaan kegiatan maupun program-program berdasarkan perencanaan, juklak, juknis maupun peraturan yang ada sangat bergantung pada SDM dan Anggaran.
5. Komitmen pimpinan dan komunikasi internal sangat berpengaruh terhadap suksesnya suatu program.

B. REKOMENDASI :

Menghadapi pelaksanaan program Tahun 2022, dan berangkat dari pelaksanaan kegiatan Tahun 2021, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan setiap bidang perlu direview dan disesuaikan tupoksi sehingga tidak terjadi tumpang tindih penanganan program dan kegiatan.
2. Penunjukan personil/pegawai pada setiap kegiatan perlu memperhatikan tingkat kompetensi, dedikasi, tangungjawab terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan.
3. Koordinasi perlu dilakukan lebih intensif antara seluruh komponen pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Dukungan sarana prasarana, anggaran dan peningkatan kompetensi melalui bimbingan teknis sangat perlu direncanakan dan direalisasikan.
5. Program-program yang telah berjalan agar ditingkatkan dan dipelihara.